RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERUBAHAN

TAHUN 2019 - 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266

Sumber 45611

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas rakhmat-Nyalah penyusunan dokumen Rencana Stategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 Perubahan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Renstra merupakan dokumen penting untuk memberikan arah bagi setiap pengelola pendidikan dalam merealisasikan cita-cita mencerdaskan bangsa sesuai komitmen bersama antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Dengan demikian semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah semestinya tetap mengacu pada Renstra tersebut.

Untuk merealisasikan Renstra Dinas Pedidikan Kabupaten Cirebon perlu dukungan dan kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat, karena tanpa adanya dukungan maka akan menemui kesulitan dan kendala yang tidak sedikit.

Renstra Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon berisi mengenai pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan yang diuraikan secara ringkas dan jelas agar dapat mudah dipahami untuk dipedomani.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra Perubahan ini sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Sumber, Agustus 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
CIREBON

H. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina UtamaMuda
NIP. 19620209 199003 1 004

Lampiran IV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2019-2024

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tercapainya pembangunan daerah tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dibekali dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dapat dicapai salah satunya melalui pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai ***usaha sadar dan terencana*** untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan beradasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumberdaya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi kemasa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan managamen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan secarah umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan juga diarahkan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknonogi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan diatur dalam Standar Pelayanan Mutu Bidang Pendidikan perihal minimal pelayanan bidang pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa mutu pelayanan dasar untuk bidang Pendidikan sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa, standar jumlah dan kualitas tenaga

Pendidik dan Kependidikan serta petunjuk teknis atau cara pemenuhan standar.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. **Rencana strategi (Renstra)** SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, SKPD berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Daerah. **Renstra sendiri berfungsi** sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Secara rinci Rencana Strategis (Renstra) mempunyai fungsi :

1. Sebagai pedoman dalam Implementasi Operasional RPJMD Pemerintah Daerah;
2. Sebagar dasar dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah;
3. Sebagai Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Dareah;
4. Sebagai Kontrak kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah; dan
5. Sebagai Landasan dalam mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud

perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara top-down planning dan bottom up planning.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mendorong Dinas Pendidikan untuk segera mengimplementasikan langkah pelayanan menuju terraihnya target IPM khususnya dibidang pendidikan dengan menyusun dan merumuskan rencana program strategis penyelenggaraan teknis di bidang pendidikan. Untuk maksud tersebut perlu adanya Rencana Strategis bidang Pendidikan yang merupakan penjabaran visi, misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

<u>Skema Keterkaitan dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra PD</u>

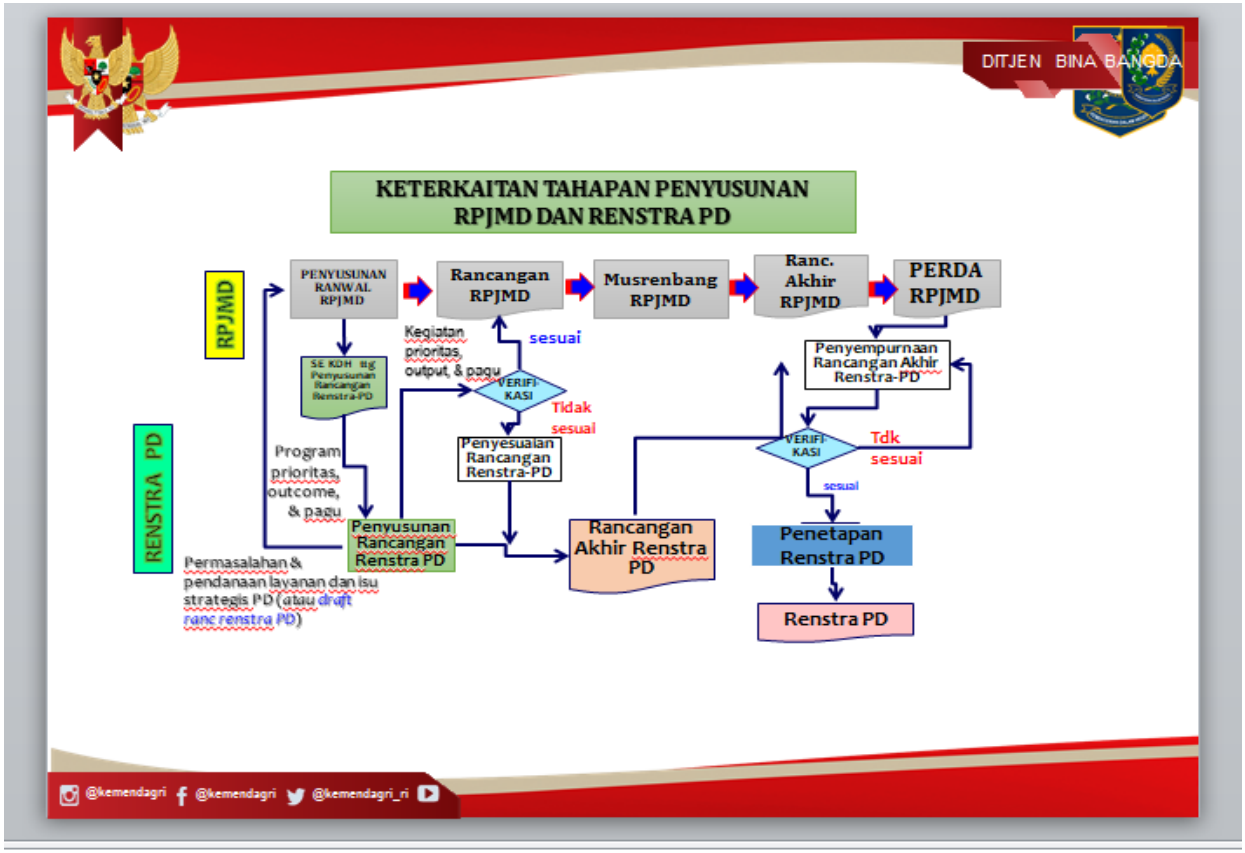

Skema Keterkaitan dalam Penyusunan Renstra dengan RPJMD dan Renstra Kementrian/Lembaga.

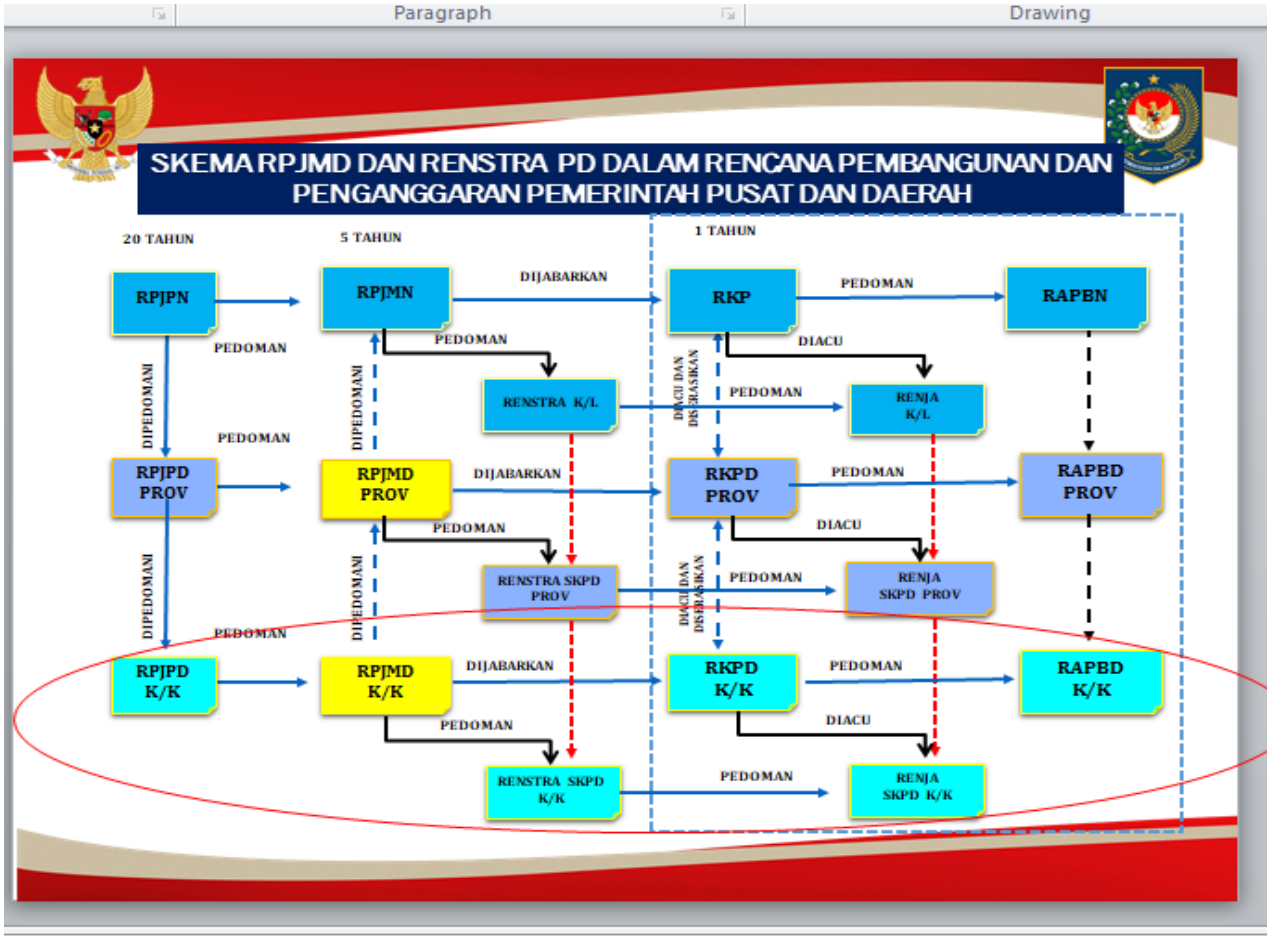

Dalam pelaksanaannya, Renstra akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada *stakeholders*, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj). Hal tersebut seperti tercantum dalam bagan di bawah ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk kurun waktu periode Tahun 2019–2024, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Rencana Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Seri E.5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7 Seri E.5);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri, D.11).
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).
25. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
26. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon adalah untuk memberikan arah bagi seluruh dimensi kebijakan Dinas Pendidikan pada periode tahun 2019 - 2024 serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan Perangkat

Daerah, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 pasal 3 bahwa maksud ditetapkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 adalah :

a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2019 – 2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas an fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalisasikan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Sehingga dengan ditetapkannya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 dapat dijadikan dasar :

1. memberikan pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dlm mendukung Visi dan Misi Bupati.
3. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2019-2024

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan.

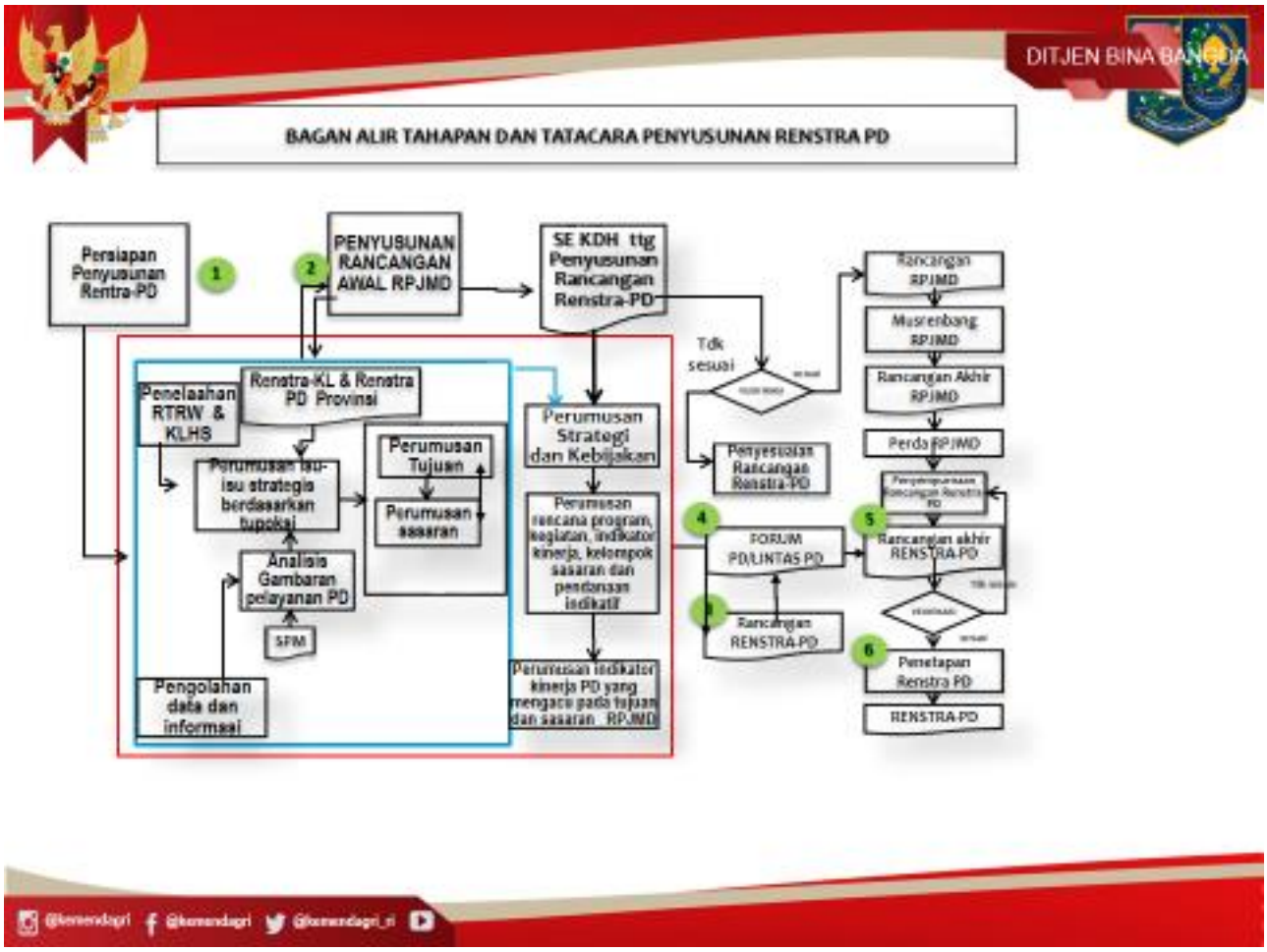

Tahapan dalam penyusunan Renstra-Perangkat Daerah

1. Persiapan Penyusunan
2. Penyusunan Rancangan Awal
3. Penyusunan Rancangan
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

1. **Persiapan Penyusunan**
   - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra –PD
   - Oientasi mengenai Renstra-PD
   - Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra-PD
   - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2. **Penyusunan Rancangan Awal**
   - Penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
   - Dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

CAKUPAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENSTRA-PD

1. Analisis gambaran pelayanan;
2. Analisis permasalahan;
3. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
4. Analisis isu strategis;
5. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
6. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
7. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Substansi utama Rensta adalah memuat visi dan misi SKPD, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dilengkapi dengan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif.

Penyempurnaan Renstra SKPD :

- Rancangan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD (visi, misi dan program Gubernur terpilih)
- Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda.
- Penyempurnaan penyesuaian Renstra SKPD meliputi: visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

KERANGKA PIKIR

Renstra Dinas Pendidikan dirumuskan dengan memperhatikan dokumen perencanaan baik tingkat Provinsi maupun Pusat, kondisi dan potensi serta masukan-masukan dari stakeholders untuk bersama-sama menggagas peningkatan kualitas pendidikan melalui rapat/pertemuan , rakoor dan serta kegiatan lain dengan tujuan menjaring keinginan-keinginan stakeholders untuk kemudian dianalisis dan diformulasikan kedalam perumusan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan kebijakan Dinas Pendidikan.

Setelah perumusan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dan kebijakan disepakati, kemudian dilakukan analisis lingkungan strategis untuk menentukan strategi umum dan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical succes factor/ CSF). CSF ini menjadi acuan dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran serta cara mencapainya yang mencakup kebijakan dan program-program pembangunan Dinas Pendidikan tahun 2019 – 2024.

Agar perumusan tujuan dan sasaran menjadi terukur, dirumuskan indikator kinerja, terutama indikator kinerja pada tingkat sasaran. Indikator kinerja sasaran ini merupakan gambaran prestasi kerja yang akan dicapai dengan pendekatan outcome (hasil) dari program-program bidang kewenangan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan.

Sistematika penulisan dan penyusunan dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024 mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan.

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Renstra, tujuan dan sasaran, landasan hukum penyusunan, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Berisi tentang struktur organisasi, fungsi dan tugas pokok, kinerja dinas serta karakteristik pendidikan di Kabupaten Cirebon.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menyajikan uraian permasalahan baik internal maupun eksternal serta uraian isu strategis yang dihadapi.

BAB. IV TUJUAN, SASARAN

Berisi tentang penjelasannya tujuan dan sasaran strategis Dinas Pendidikan lima tahun kedepan.

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi tentang strategi dalam mencapai tujuan pembangunan pendidikan serta arah kebijakan pendidikan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Kerja Dinas Pendidikan

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016, Seri D 13 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Seri D tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Fungsi Dinas Pendidikan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan azaz otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan **Tugas Pokok Dinas** adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan,

mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 Nomor Seri D 13), susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja bidang pendidikan;
b. perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang pendidikan,
c. perencanaan dan pengendalian anggaran Dinas;
d. pengendalian urusan administrasi Dinas;
e. penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang pendidikan, (PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Non Formal) sesuai aturan yang berlaku;
f. penyelenggaraan dan pengelolaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) Tahun;
g. pengendalian bidang pendidikan serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama Bidang pendidikan di antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
i. pemantauan dan evaluasi kinerja bidang pendidikan, serta UPT sesuai dengan lingkup tugas;
j. penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan meliputi: merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pendidikan.

2. SEKRETARIAT

(1) Sekretariat mempunyai fungsi:

a. perumusan rencana kerja/program Sekretariat;
b. penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Dinas;
c. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
d. pengendalian dan pengelolaan urusan administrasi umum, ketatausahaan dan kepegawaian Dinas;
e. pengelolaan perlengkapan dan sarana kerja dan aset Dinas dan UPT Pendidikan Kecamatan;
f. pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas;
g. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
h. pengendalian data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik;
i. pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
j. Pengelolaan web site Dinas;
k. pengendalian Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris sebagai unsur staf yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretariat mempunyai tugas pokok mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan sarana kerja/aset, keuangan, dan program/rencana kerja Dinas.

2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Subbag Umum dan Kepegawaian;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan umum dan ketatalaksanaan dinas;
c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan kearsipan Dinas;
e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
f. pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, sarana dan rumah tangga Dinas dan UPT Pendidikan Kecamatan;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi umum, perlengkapan, sarana, kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas.

2.2 Subbagian Keuangan dan Aset

(1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan aset;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
c. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
d. pelaksanaan verifikasi SPP;

e. penyiapan surat perintah membayar;
f. pelaksanaan verifikasi;
g. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
h. penyusunan laporan keuangan Dinas;
i. pelaksanaan penatausahaan (pencatatan dan pelaporan) barang/asset Dinas;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dan penatausahaan keuangan serta pencatatan/pelaporan barang/aset Dinas.

3.3 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan pengoordinasian perencanaan program Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Dinas;
b. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
c. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
d. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas;
e. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
f. pengelolaan data dan informasi Dinas;
g. pengelolaan sistem informasi/ web site Dinas;
h. penyusunan profil Dinas;
i. penyusunan laporan Dinas;

j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian (unsur staf) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

3. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

(1) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar);

b. perumusan rencana dan program kerja bidang Pendidikan Sekolah Dasar;

c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);

d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;

e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;

f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar (SD);

g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dan sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;

h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Dasar;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok mengelola (merumuskan, menyusun dan melaksanakan) kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Dasar.

3.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah Dasar;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Dasar;
e. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Dasar;
f. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi pendidikan SD;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Dasar;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah dasar;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Dasar
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan sekolah dasar.

3.2 Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan Sekolah Dasar;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada pendidikan Sekolah Dasar (SD);
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar sesuai kewenangannya ;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan Sekolah Dasar;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan sekolah dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan sekolah dasar;

3.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan Sekolah Dasar;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SD;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan sekolah dasar;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset sekolah dasar;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana serta penatausahaan/pencatatan aset pendidikan SD.

4. BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

(1) Bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) (kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data SMP);
b. perumusan rencana dan program kerja/kegiatan bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
c. perumusan norma, standar operasional, kriteria, pedoman dan prosedur pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama (SMP)
e. penyusunan bahan akreditasi, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
f. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data sekolah menengah pertama(SMP);
g. pengendalian, pemantauan dan evaluasi mutu guru, kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
h. pelaporan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data Sekolah Menengah Pertama (SMP);
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas pokok menyusun, mengelola dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
d. pengelolaan kalender pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
e. pembinaan teknis perpustakaan dan laboratorium sekolah bagi pendidikan SMP
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
g. pelaksanaan dan pembinaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
h. pembinaan prestasi gugus Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
i. pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
j. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku;
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

4.2 Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan SMP;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP sesuai kewenangannya;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;
e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan SMP;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan SMP;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMP;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan Kependidikan SMP;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi tenaga pendidik dan kependidikan SMP; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan SMP mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan SMP.

4.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data SMP mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan SMP;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan SMP;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan SMP;
g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset SMP;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan SMP sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan SMP.

(3) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP mempunyai tugas pokok tugas pokok menyusun rencana, mengolah data, mengkaji, dan memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana pendidikan SMP.

5. BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;

b. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;

c. penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini;

d. penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Pendidikan Anak Usia Dini;

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini; dan

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan anak usia dini.

5.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;

b. penyusunankebijakan teknis kurikulum pendidikan PAUD;

c. pembinaan teknis sarana bermain bagi pendidikan PAUD;

d. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan PAUD;
e. pengelolaan kalender pendidikan PAUD;
f. penyelenggaraan, pengendalian dan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan PAUD;
g. pembinaan prestasi gugus PAUD;
h. pembinaanminat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD;
i. pengendalian, penyelenggaraan dan penerimaan peserta didik/siswa baru, mutasi siswa PAUD;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan PAUD sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

5.2 Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD

(1) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis tenaga teknis pendidik dan kependidikan PAUD;
b. pendataan dan pemetaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pada pendidikan PAUD;
c. penyusunan petunjuk teknis operasional, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) kegiatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD sesuai kewenangannya ;
d. penyusunan rencana kebutuhan Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;

e. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
f. pengusulan/ rekomendasi pemindahan, pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
g. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan PAUD;
h. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD;
i. pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan Kependidikan PAUD;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi tenaga pendidik dan kependidikan PAUD; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan PAUD, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini.

(3) Kepala Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan PAUD.

5.3 Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD

(1) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja/kegiatan Seksi;
b. penyusunan data dan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
c. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
d. penyelenggaraan dan pengawasan bantuan PAUD;
e. penyusunan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan PAUD;
f. pencatatan dan pelaporan (penatausahaan) sarana dan prasarana/aset pendidikan PAUD;

g. pelaksanaan sistem aplikasi pengelolaan dan inventarisasi aset PAUD;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PAUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PAUD melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Sarana Prasarana, Aset dan Data PAUD mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana, mengelola dan engolah data, mengiventarisasi, memfasilitasi pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana/aset PAUD.

6. BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

(1) Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis kurikulum, keaksaraan dan kesetaraan, dan kursus dan kelembagaan bidang Pendidikan Non Formal;
b) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang pendidikan Non Formal;
c) penyusunan dan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal;
d) penyelenggaraan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Non Formal;
e) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang pendidikan Non Formal;
f) pelaporan pelaksanaan kegiatan kurikulum, tenaga teknis pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, aset dan data di bidang Non Formal;

g) pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal mempunyai tugas pokok mengelola, melaksanakan urusan/kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan Non Formal.

6.1 Seksi Kurikulum

(1) Seksi Kurikulum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi kurikulum;
b. penyusunan kebijakan teknis kurikulum pendidikan Non Formal;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan Non Formal;
d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar Paket C setara SMA dan Keaksaraan;
e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pelaksanaan pembinaan Tutor Kejar Paket A, Paket B dan Paket C;
h. pelaksanaan ujian nasional Kejar Paket A, Paket B dan Paket C dan keaksaraan;
i. pengendalian data dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan pendidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;

j. pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
k. pelaksanaan kompetensi pendidik dan Kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kurikulum Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP, Kejar Paket C setara SMA dan keaksaraan;
m. pengelolaan kalender pendidikan Non Formal;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi Kurikulum, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

(2) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(3) Kepala Seksi Kurikulum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penetapan dan pengurusan kurikulum Pendidikan Non Formal.

6.2 Seksi Kesetaraan Dan Keaksaraan

(1) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan Mempunyai Fungsi :

a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;
b. penyusunan kebijakan teknis Kesetaraan dan Keaksaraan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan Kesetaraan dan Keaksaraan
d. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
e. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;

f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, program Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan;
g. pelaksanaan lomba pendidik dan kependidikan Kejar Paket A setara SD, Kejar Paket B setara SMP dan Kejar paket C setara SMA dan Keaksaraan; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.

(3) Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengurusan keaksaraan dan kesetaraan.

6.3 Seksi Kursus dan Kelembagaan

(1) Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kegiatan seksi;
b. penyusunan kebijakan teknis kursus dan kelembagaan;
c. pembinaan, penetapan dan pelaksanaan kursus dan kelembagaan;
d. perencanaan dan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
e. pembinaan tenaga teknis pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
f. pengendalian usulan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan kelembagaan;
g. pelaksanaan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggaraan kursus dan kelembagaan;
h. penyusunan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian kursus dan kelembagaan;
i. pelaksanaan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi;

j. pelaksanaan monitoring kompetensi pada lembaga kursus; dan
k. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga kursus dan kelembagaan;

(2) Seksi Kursus dan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Non Formal melalui Sekretaris Dinas.

(3) Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyusun rencana, mengelola dan mengolah data, pembinaan kursus dan kelembagaan di Bidang Pendidikan Non Formal.

Struktur organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

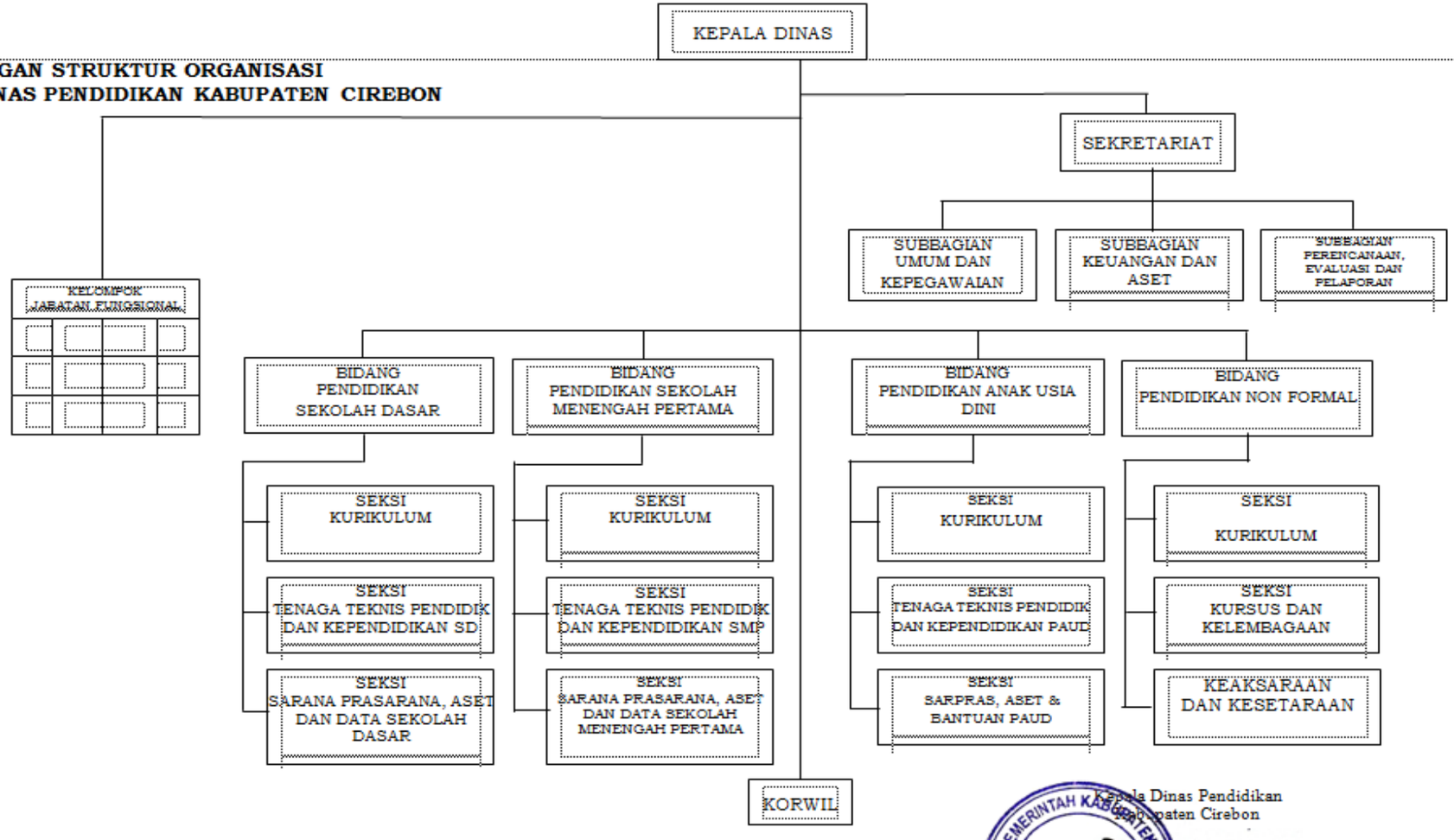

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ASDULLAH SA.,MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Seri D tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan komposisi jabatan : 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang serta 15 orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubbag, dan 12 (dua belas) orang Kasi, dengan Susunan Tatakerja :

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat membawahi:
   a) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
   b) Sub Bagian Keuangan
   c) Sub Bagian Umum
3) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Membawahi:
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset
   c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
4) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Sarana Prasarana dan Pengelolaan Aset
   c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Sarana prasarana, aset dan data PAUD
   c) Seksi Tenaga Teknis Pendidik dan Kependidikan
6) Bidang Pendidikan Non Formal
   a) Seksi Kurikulum
   b) Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan
   c) Kursus dan Kelembagaan

2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan (SDM dan Infut lainnya)

Sumber Daya Manusia (SDM) Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon merupakan unsur Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diberi tanggungjawab secara teknis dan administratif dalam bidang pendidikan. Dinas ini dipimpin oleh seorang kepala dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sesuai **Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2021, Seri D tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon**, tersebut di atas dengan komposisi jabatan : 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang kepala bidang serta 15 orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kasubbag, dan 12 (dua belas) orang Kasi .

2.2.1. Jumlah Pegawai Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem tata kelola pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten , kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedianya data tata kelola pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan tatakelola manajeman pendidikan yang terpadu antara Dinas Pendidikan sampai ke sekolah-sekolah dengan

memanfaatkan teknologi komunikasi dan sumber daya manusia yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen tatakelola pendidikan ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melakasanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengeloaan sekolah.

Tabel. 2.2.1 Jumlah Pegawai Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana Dinas Pendidikan Kab. Cirebon

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS		JML. PEGAWAI MENURUT JABATAN			CATATAN
		PNS / ASN	NON ASN	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAFF / PELAKSANA	
	H. Denny Supdiana, SE, M.Si.	1	-	1		-	Kepala Dinas
	Sudiharjo, S.AP.	1	-	1		-	Sekertaris Dinas
SEKRETARIAT		-	-	-		-	
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN		-	-	-		-	
1	Asep Saepullah, S.Pd., M.Pd.	1	-	1		-	Kasubbag Umum & Kepegawaian
2	Jojo Suryaatmaja	1	-	-		1	
3	Selamet Pramono, S.IP	1	-	-		1	
4	Heru Purwanto, S.AP	1	-	-		1	
5	Ayi Suryaningsih, S.IP	1	-	-	1	-	Analis Kepegawaian
6	Didi Junaedi, S.sos.	1	-	-	1	-	Analis Kepegawaian

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS		JML. PEGAWAI MENURUT JABATAN			CATATAN
		PNS / ASN	NON ASN	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAFF / PELAKSANA	
7	Siti Khodijah, M.Pd.I	1	-	-		1	
8	Dasam	1	-	-		1	
9	Akhmad Setiyono, SE.	1	-	-		1	
10	Akhmad Jaelani	1	-	-		1	
11	Selamet Pramono, S.IP	1		-		1	
12	Andri Irawan, SE.	-	1	-		1	
13	Kaenisah	-	1	-		1	
14	Uhi Syahrudin, S.AP	-	1	-		1	
15	Ono Erawan	-	1	-		1	
16	Iman Hanura	-	1	-		1	
17	Philip Sanjaya, ST	-	1	-		1	
18	Renaldi	-	1	-		1	
19	Yoyo Sunaryo	-	1	-		1	
20	Mohammad Imam Muqofa	-	1	-		1	
21	Widiya Destriana	-	1	-		1	
22	Moh. Iman Safei	-	1	-		1	
23	Dia Ayu Lestari, S.Ak	-	1	-		1	
24	Prabowo Ilham Dani, S.Pd	-	1	-		1	
25	M.Rizki Saksabila	-	1	-		1	
26	Maulana, A.Md	-	1	-		1	
SUB BAGIAN KEUANGAN & ASET		-	-	-		-	
27	Tarsidi, S.AP.	1		1			Kasubbag Keuangan & Aset
28	Nurhawa	1	-	-		1	

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS		JML. PEGAWAI MENURUT JABATAN			CATATAN
		PNS / ASN	NON ASN	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAFF / PELAKSANA	
29	Chairunisyah, A.Md.	1	-	-		1	
30	Sukarminto	1	-	-		1	
31	Iin Kuraesin, S.Sos.	1	-	-		1	
32	Mohammad Husain	1	-	-		1	
33	Jumenah	1	-	-		1	
34	Hadima	1	-	-		1	
35	Hendriana, S.IP	-	1	-		1	
36	Wawan Suwanto, A.Md	-	1	-		1	
37	Sukmasari, S.IP	-	1	-		1	
38	Amran halim Pranoto, A.Md	-	1	-		1	
39	Sabar, A.Md.	-	1	-		1	
40	Araafi Nurputrieana, SE.	-	1	-		1	
41	Doni Nugraha Hidayat, M.Pd	-	1	-		1	
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN		-	-	-		-	
42	Rohiman, SE.Sy	1	-	1		-	Kasubbag PEP
43	Adi Saidi	1	-	-		1	
44	Adis Rusyanto, S.Kom	-	1	-		1	
45	Ratih Komala, S.Sos.	-	1	-		1	
46	Opik Taufiqurohman, SE.	-	1	-		1	
47	Elisah, S.Pd.	-	1	-		1	
48	Mohammad Zulfikar Ariadi	-	1	-		1	

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS		JML. PEGAWAI MENURUT JABATAN			CATATAN
		PNS / ASN	NON ASN	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAFF / PELAKSANA	
BIDANG PENDIDIKAN PAUD		-	-	-		-	
49	Pancawala Sulistianto, ST.	1	-	1		-	Kabid Paud
50	Abdul Basith, SPd.I.	1	-	1		-	Kasi
51	Kabarudin Hamzah, S.Pd.	1	-	1		-	Kasi
52	Wandono, S.Pd.I.	1	-	1		-	Kasi
53	Nena Aris Septiani, S.Pd.	1	-	-		1	
54	Toto Riyanto, ST.	1	-	-		1	
55	Supendi, S.Pd.	1	-	-		1	
56	Arif Ikhwani	1	-	-		1	
57	Suandi, SE.	-	1	-		1	
58	Listriani Augstine, S.Pd.	-	1	-		1	
59	Nanang Saputa, SH.	-	1	-		1	
60	Achmad Rifqi Afwan	-	1	-		1	
BIDANG PENDIDIKAN SD		-	-	-		-	
61	Drs. Mustopa	1	-	1		-	Kabid SD
62	Kanadi, ST.	1	-	1		-	Kasi
63	Wanudin, S.IP.	1	-	1		-	Kasi
64	R.Moh. Al Bana, S.Pd.I.	1	-	1		-	Kasi
65	Sujadi, S.IP.	1	-	-		1	
66	Suryadi, S.Kom.	1	-	-	1	-	Analis Kepegawaian
67	Sunarti	1	-	-		1	
68	Warno	1	-	-		1	
69	Maskadi	1	-	-		1	

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS		JML. PEGAWAI MENURUT JABATAN			CATATAN
		PNS / ASN	NON ASN	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAFF / PELAKSANA	
70	Agung Rafiyudin, A.Md.	-	1	-		1	
71	Muhaemin, SE.I.	-	1	-		1	
72	Aryono, S.Kom.	-	1	-		1	
73	Rangga Sutrisno, A.Md.	-	1	-		1	
74	Enda Suhenda, SE.	-	1	-		1	
75	Eggi Nuansa, S.Pd.	-	1	-		1	
76	Azalea Dwi Rahmatika, S.Pd.	-	1	-		1	
BIDANG PENDIDIKAN SMP		-	-	-		-	
77	H. Amin, S.Pd.	1	-	1		-	Kabid SMP
78	Muhammad Rukhyat Zain, S.Pd.	1	-	1		-	Kasi
79	Ismail Said, S.Pd., M.Pd.	1	-	1		-	Kasi
80	Agus Sutrisno, S.Pd.	1	-	1		-	Kasi
81	Yati Supriati	1	-	-		1	
82	Yeni Maryani, SE.	1	-	-	1	-	Analis Kepegawaian
83	Sairoh, S.Sos.	1	-	-		1	
84	Cecep Mulyadi, S.Si.	1	-	-		1	
85	Munah, S.Sos.	1	-	-		1	
86	Karliya	-	1	-		1	
87	Daud Dhohiri	-	1	-		1	
89	Mar'atus Solicha, S.IP.	-	1	-		1	
90	Adi Riana Risnadi	-	1	-		1	
91	Rifky Fauzi, S.Kom.	-	1	-		1	
92	Udimi	-	1	-		1	

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI MENURUT STATUS		JML. PEGAWAI MENURUT JABATAN			CATATAN
		PNS / ASN	NON ASN	PEJABAT STRUKTURAL	PEJABAT FUNGSIONAL	STAFF / PELAKSANA	
BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL		-	-	-		-	
93	Drs. Herri Purnama	1	-	1		-	Kabid PNF
94	Abdul Kodir, SH.	1	-	1		-	Kasi
95	Herdilah, S.AP.	1	-	1		-	Kasi
96	Drs. Dudung Ansori	1	-	1		-	Kasi
97	Saidi, S.AP.	1	-	-		1	Jumlah Tenaga Staff/Pelaksana PNS = 32 Orang.
98	Nanang Kusnandar	1	-	-		1	
99	Ukarija	1	-	-		1	
100	Lilik Rutaksi	1	-	-		1	
101	Dani Irawan, S.Kom.	-	1	-		1	Jumlah Tenaga Staff/Pelaksana Non PNS = 50 Orang.
102	Jajat Sudrajat, SE.	-	1	-		1	
103	Tedi Handoko	-	1	-		1	
104	Dessy Hermilasari, A.Md.	-	1	-		1	
105	Ajie Ibrahim Muttaqien	-	1	-		1	
106	Riska Pramana Putri, S.Tr.Si	-	1	-		1	
		57	50	21	4	82	

2.2.2. Jumlah Penduduk usia sekolah

Penduduk Kabupaten Cirebon berjumlah 2.296.999 orang, laki-laki 1.163.760 Orang dan perempuan 1.133.239 orang tersebar di 40 Kecamatan / 424 desa dan kelurahan dengan kondisi ekonomi keluarga miskin 247.940 orang atau 11,24% dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1.30 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0.24. *(Sumber BPS 2020: Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020.*

Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SM sumber data *Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020* sebanyak 728.042 orang terdiri dari laki-laki 374.756 orang dan perempuan 353.286 orang. *(Sumber/Source: Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020)*

Tabel 2.2.2.1.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah *Total*
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	101 856	96 352	198 208
5–9	89 045	83 873	172 918
10–14	89 998	84 593	174 591
15–19	93 857	88 468	182 325
Jumllah	374.756	353.286	728.042

Sumber/*Source*: Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September)

Tabel 2.2.2.2
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan diKabupaten Cirebon, 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	5.52	12.09	5.36	6.76	70.27	100.00
Perempuan	6.80	12.92	5.05	6.44	68.79	100.00

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Cirebon 2019

2.2.3. Jumlah peserta didik

Banyak sedikitnya jumlah peserta didik berpengaruh langsung pada tingkat capaian RLS sekaligus tingkat capaian APK, APM pada semua jenjang pendidikan. Dengan demikian perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan jumlah peserta didik pada semua jenjang.

Tabel 2.2.3.1

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

No.	Kecamatan	Siswa menurut Status Sekolah						
		Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
01	Waled	2,639	2,461	5,100	0	0	0	5,100
02	Ciledug	2,193	2,062	4,255	181	143	324	4,579
03	Losari	2,075	1,953	4,028	0	0	0	4,028
04	Babakan	3,510	3,178	6,688	29	15	44	6,732
05	Karangsembung	1,624	1,559	3,183	152	122	274	3,457
06	Lemahabang	2,734	2,653	5,387	272	193	465	5,852
07	Sedong	2,156	1,955	4,111	50	30	80	4,191
08	Astana Japura	2,546	2,281	4,827	298	256	554	5,381
09	Mundu	2,985	2,929	5,914	86	56	142	6,056
10	Beber	2,324	2,117	4,441	0	0	0	4,441
11	Sumber	4,224	3,923	8,147	1,208	999	2,207	10,354
12	Palimanan	2,694	2,511	5,205	0	0	0	5,205
13	Plumbon	3,388	3,079	6,467	50	30	80	6,547
14	Weru	2,950	2,691	5,641	36	26	62	5,703
15	Kapetakan	2,470	2,353	4,823	0	0	0	4,823
16	Klangenan	2,472	2,296	4,768	138	93	231	4,999
17	Arjawinangun	3,419	3,195	6,614	115	78	193	6,807
18	Ciwaringin	1,795	1,652	3,447	0	0	0	3,447
19	Susukan	3,153	3,053	6,206	235	232	467	6,673
20	Gegesik	2,860	2,568	5,428	28	7	35	5,463
21	Susukanlebak	1,751	1,622	3,373	0	0	0	3,373
22	Pabedilan	2,417	2,096	4,513	40	26	66	4,579
23	Dukupuntang	2,350	2,261	4,611	0	0	0	4,611
24	Panguragan	1,904	1,828	3,732	48	26	74	3,806
25	Kaliwedi	1,802	1,676	3,478	0	0	0	3,478
26	Pangenan	1,571	1,466	3,037	0	0	0	3,037
27	Gebang	2,734	2,653	5,387	295	304	599	5,986
28	Depok	2,919	2,722	5,641	77	46	123	5,764
29	Kedawung	1,853	1,748	3,601	556	450	1,006	4,607
30	Karangwareng	1,295	1,201	2,496	0	0	0	2,496
31	Talun	2,621	2,476	5,097	440	421	861	5,958
32	Gunung Jati	2,433	2,324	4,757	174	177	351	5,108
33	Pasaleman	1,227	1,173	2,400	0	0	0	2,400
34	Pabuaran	1,662	1,562	3,224	0	0	0	3,224
35	Tengahtani	1,820	1,759	3,579	0	0	0	3,579
36	Plered	2,879	2,607	5,486	37	26	63	5,549
37	Gempol	2,057	1,771	3,828	81	71	152	3,980
38	Greged	3,104	2,802	5,906	0	0	0	5,906
39	Suranenggala	2,138	1,971	4,109	39	25	64	4,173
40	Jamblang	1,701	1,529	3,230	57	59	116	3,346
Jumlah		**100,824**	**96,449**	**89,716**	**186,165**	**4,722**	**3,911**	**8,633**

Tabel 2.2.3.2

JUMLAH PESERTA DIDIK JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	Negeri			Swasta			Jumlah
		L	P	L+P	L	P	L+P	L+P
1	Waled	530	641	1,171	473	340	813	1,984
2	Ciledug	755	851	1,606	459	393	852	2,458
3	Losari	701	848	1,549	279	248	527	2,076
4	Babakan	650	746	1,396	563	393	956	2,352
5	Karang Sembung	728	782	1,510	129	62	191	1,701
6	Lemahabang	766	762	1,528	636	579	1,215	2,743
7	Sedong	339	401	740	0	0	0	740
8	Astana Japura	398	460	858	598	505	1,103	1,961
9	Mundu	608	704	1,312	158	78	236	1,548
10	Beber	437	552	989	365	243	608	1,597
11	Sumber	1256	1264	2,520	1085	917	2,002	4,522
12	Palimanan	1690	1774	3,464	962	670	1,632	5,096
13	Plumbon	1056	1059	2,115	172	166	338	2,453
14	Weru	915	829	1,744	1277	863	2,140	3,884
15	Kapetakan	748	713	1,461	0	0	0	1,461
16	Klangenan	732	669	1,401	70	54	124	1,525
17	Arjawinangun	740	755	1,495	575	460	1,035	2,530
18	Ciwaringin	883	986	1,869	1126	783	1,909	3,778
19	Susukan	626	685	1,311	209	274	483	1,794
20	Gegesik	1203	1235	2,438	374	308	682	3,120
21	Susukan Lebak	676	720	1,396	0	0	0	1,396
22	Pabedilan	785	747	1,532	130	170	300	1,832
23	Dukupuntang	437	443	880	1468	1390	2,858	3,738
24	Panguragan	473	500	973	289	212	501	1,474
25	Kaliwedi	543	582	1,125	128	116	244	1,369
26	Pangenan	423	412	835	317	251	568	1,403
27	Gebang	740	687	1,427	202	124	326	1,753
28	Depok	797	817	1,614	398	313	711	2,325
29	Kedawung	516	491	1,007	164	129	293	1,300
30	Karangwareng	404	345	749	18	20	38	787
31	Talun	471	509	980	31	20	51	1,031
32	Gunung Jati	1231	1208	2,439	418	371	789	3,228
33	Pasaleman	360	320	680	150	139	289	969
34	Pabuaran	675	86	761	153	87	240	1,001
35	Tengah Tani	495	438	933	44	19	63	996
36	Plered	1114	1087	2,201	62	61	123	2,324
37	Gempol	526	490	1,016	51	22	73	1,089
38	Greged	317	366	683	46	59	105	788
39	Suranenggala	747	863	1,610	0	0	0	1,610
40	Jamblang	803	818	1,621	0	0	0	1,621
JML		**28,294**	**28,645**	**56,939**	**13,579**	**10,839**	**24,418**	**81,357**

Profil Pendidikan 2020/2021

2.2.4. Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yakni " Masyarakat Kabupaten Cirebon Cerdas dan Kompetitif " diperlukan tenaga pendidik dan kependidikan dengan jumlah yang memadai. Saat ini jumlahnya masih sangat kurang atau belum sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan sehingga mayoritas sekolah mengangkat tenaga honorer untuk menutup kebutuhan tersebut. Selain itu masih terdapat berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, antara lain ; (1) adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, (2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru (3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan (4) kesejahteraan guru yang belum memadai. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut dibawah ini dapat dilihat jumlah tenaga penndidik dan kependidikan di Kabupaten Cirebon.

Jumlah Tenaga Pendidik

Tabel 2.2.4.1
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waled	2	33	89	124	99	223
2	Ciledug	0	40	87	127	94	221
3	Losari	1	31	64	96	98	194
4	Babakan	3	59	116	178	138	316
5	Karang Sembung	0	47	64	111	96	207
6	Lemahabang	1	58	84	143	138	281
7	Sedong	1	32	65	98	87	185
8	Astana Japura	3	30	79	112	115	227
9	Mundu	0	42	68	110	127	237
10	Beber	1	25	61	87	92	179
11	Sumber	7	79	163	249	317	566
12	Palimanan	1	63	108	172	124	296
13	Plumbon	2	91	135	228	110	338
14	Weru	2	54	108	164	121	285
15	Kapetakan	2	31	81	114	99	213
16	Klangenan	4	58	113	175	114	289
17	Arjawinangun	3	75	105	183	115	298
18	Ciwaringin	1	40	63	104	57	161
19	Susukan	1	49	91	141	143	284
20	Gegesik	3	88	115	206	90	296
21	Susukan Lebak	0	40	54	94	73	167

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Pabedilan	1	43	87	131	84	215
23	Dukupuntang	1	69	101	171	107	278
24	Panguragan	2	36	66	104	93	197
25	Kaliwedi	3	51	59	113	53	166
26	Pangenan	1	19	35	55	72	127
27	Gebang	1	53	86	140	148	288
28	Depok	2	62	128	192	96	288
29	Kedawung	4	31	72	107	141	248
30	Karangwareng	0	25	39	64	57	121
31	Talun	0	40	78	118	158	276
32	Gunung Jati	1	46	114	161	98	259
33	Pasaleman	0	29	47	76	42	118
34	Pabuaran	0	35	62	97	70	167
35	Tengah Tani	1	15	71	87	93	180
36	Plered	2	73	91	166	103	269
37	Gempol	1	49	74	124	77	201
38	Greged	5	33	46	84	114	198
39	Suranenggala	3	34	80	117	96	213
40	Jamblang	3	61	65	129	79	208
JML		**69**	**1,869**	**3,314**	**5,252**	**4,228**	**9,480**

Profil Pendidikan 2021/2021

Tabel 2.2.4.2

JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	PNS			Subjumlah	Non-PNS	Jumlah
		Gol II	Gol III	Gol IV			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Waled	0	14	15	29	103	132
2	Ciledug	0	10	38	48	99	147
3	Losari	0	19	28	47	96	143
4	Babakan	0	12	25	37	117	154
5	Karang Sembung	1	17	27	45	55	100
6	Lemahabang	0	22	22	44	105	149
7	Sedong	1	11	10	22	24	46
8	Astana Japura	0	10	14	24	115	139
9	Mundu	0	13	22	35	60	95
10	Beber	0	6	23	29	66	95
11	Sumber	0	20	74	94	196	290
12	Palimanan	0	22	80	102	194	296
13	Plumbon	1	23	36	60	72	132
14	Weru	0	20	37	57	156	213
15	Kapetakan	0	17	19	36	71	107
16	Klangenan	0	16	18	34	81	115
17	Arjawinangun	1	20	28	49	181	230
18	Ciwaringin	0	24	22	46	209	255
19	Susukan	0	8	21	29	79	108
20	Gegesik	0	18	44	62	142	204
21	Susukan Lebak	0	14	22	36	42	78
22	Pabedilan	0	10	34	44	64	108
23	Dukupuntang	0	15	20	35	218	253
24	Panguragan	0	11	19	30	83	113
25	Kaliwedi	0	12	19	31	65	96
26	Pangenan	27	11	12	50	75	125
27	Gebang	0	14	26	40	111	151

1	2	3	4	5	6	7	8
28	Depok	11	18	38	67	92	159
29	Kedawung	0	4	27	31	49	80
30	Karangwareng	0	11	6	17	44	61
31	Talun	0	14	27	41	38	79
32	Gunung Jati	2	20	46	68	128	196
33	Pasaleman	0	8	14	22	39	61
34	Pabuaran	0	11	15	26	54	80
35	Tengah Tani	0	7	20	27	35	62
36	Plered	0	29	38	67	71	138
37	Gempol	0	13	15	28	59	87
38	Greged	0	9	9	18	39	57
39	Suranenggala	0	15	23	38	61	99
40	Jamblang	0	22	29	51	37	88
JML		**44**	**590**	**1,062**	**1,696**	**3,625**	**5,321**

Profil Pendidikan 2021/2021

2.2.5. Jumlah sarana dan prasarana

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar mutlak diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik jumlah maupun kwalitasnya. Saat ini yang terlihat jelas adalah masih kurangnya daya tampung apabila dibandingkan antara rasio jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah ruang kelas yang ada pada setiap jenjang pendidikan. Apabila tidak segera diatasi maka akan berdampak pada rendahnya APK, APM di Kabupaten Cirebon.

JUMLAH SATUAN PENDIDIKAN DAN RUANG KELAS

Tabel 2.2.5.1
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)

NO	KECAMATAN	Sek. N	Sek. S	JML. N/S	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas	Ruang Kelas
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah	Bkn Milik	Seluruh
1	Waled	23	0	23	77	57	27	161	3	164
2	Ciledug	22	1	23	69	42	21	132	0	132
3	Losari	20	0	20	68	31	23	122	0	122
4	Babakan	30	0	30	116	70	16	202	0	202
5	KR Sembung	22	1	23	82	42	2	126	6	132
6	Lemahabang	26	1	27	89	61	37	187	0	187
7	Sedong	22	0	22	88	25	4	117	0	117
8	Astana Japura	22	2	24	95	27	31	153	3	156
9	Mundu	23	1	24	60	50	27	137	13	150
10	Beber	19	0	19	75	32	15	122	0	122
11	Sumber	32	6	38	202	74	39	315	0	315
12	Palimanan	28	0	28	105	43	25	173	12	185
13	Plumbon	31	0	31	122	73	22	217	5	222
14	Weru	24	0	24	113	29	23	165	0	165
15	Kapetakan	20	0	20	65	48	26	139	0	139
16	Klangenan	24	1	25	100	27	24	151	0	151

17	Arjawinangun	26	1	27	104	49	36	189	0	189
18	Ciwaringin	16	0	16	63	32	17	112	0	112
19	Susukan	28	2	30	125	51	22	198	0	198
20	Gegesik	31	0	31	118	46	19	183	2	185
21	Susukan Lebak	20	0	20	64	44	24	132	0	132
22	Pabedilan	23	1	24	82	50	10	142	6	148
23	Dukupuntang	28	0	28	105	50	25	180	13	193
24	Panguragan	19	1	20	75	53	11	139	0	139
25	Kaliwedi	16	0	16	62	22	19	103	7	110
26	Pangenan	15	0	15	37	30	16	83	0	83
27	Gebang	24	3	27	111	57	14	182	0	182
28	Depok	26	1	27	125	48	13	186	0	186
29	Kedawung	15	3	18	113	20	21	154	14	168
30	Karangwareng	15	0	15	42	29	19	90	7	97
31	Talun	23	3	26	134	40	27	201	0	201
32	Gunung Jati	30	2	32	89	47	35	171	10	181
33	Pasaleman	13	0	13	27	44	10	81	0	81
34	Pabuaran	15	0	15	73	19	11	103	0	103
35	Tengah Tani	18	0	18	60	26	8	94	0	94
36	Plered	22	0	22	114	29	22	165	2	167
37	Gempol	18	1	19	79	21	26	126	0	126
38	Greged	18	0	18	70	33	20	123	0	123
39	Suranenggala	20	0	20	87	20	12	119	0	119
40	Jamblang	20	1	21	73	22	33	128	0	128
JML		**887**	**32**	**919**	**3,558**	**1,613**	**832**	**6,003**	**103**	**6,106**

Profil Pendidikan 2018/2019

Tabel 2.2.5.2
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO	KECAMATAN	Sek. N	Sek. S	JML Sek N/S	Ruang Kelas Milik menurut Kondisi				Ruang Kelas Bkn Milik	Ruang Kelas Seluruh
					Baik	R. Ringan	R. Berat	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Waled	2	3	5	48	6	3	**57**	0	57
2	Ciledug	2	3	5	58	3	6	67	0	67
3	Losari	3	3	6	55	12	3	70	0	70
4	Babakan	2	4	6	58	11	0	69	0	69
5	Karang Sembung	3	1	4	33	20	14	67	0	67
6	Lemahabang	2	4	6	57	16	0	73	1	74
7	Sedong	2	0	2	27	6	1	34	0	34
8	Astana Japura	1	5	6	53	4	6	63	11	74
9	Mundu	2	2	4	34	4	0	38	4	42
10	Beber	1	2	3	38	2	9	49	0	49
11	Sumber	3	11	14	87	21	1	109	3	112
12	Palimanan	4	4	8	121	16	7	144	0	144
13	Plumbon	2	1	3	48	13	4	65	0	65
14	Weru	2	4	6	92	10	7	109	0	109
15	Kapetakan	2	0	2	38	8	4	50	25	75
16	Klangenan	2	2	4	44	2	0	46	0	46
17	Arjawinangun	2	8	10	76	11	2	89	6	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ciwaringin	2	6	8	83	8	6	97	0	97
19	Susukan	2	1	3	42	7	7	56	0	56
20	Gegesik	3	3	6	77	11	8	96	2	98
21	Susukan Lebak	2	0	2	33	5	5	43	0	43
22	Pabedilan	2	1	3	47	14	5	66	0	66
23	Dukupuntang	1	10	11	69	1	3	73	12	85
24	Panguragan	1	3	4	31	10	0	41	0	41
25	Kaliwedi	2	3	5	43	3	1	47	0	47
26	Pangenan	2	4	6	32	1	2	35	4	39
27	Gebang	2	3	5	33	24	10	67	0	67
28	Depok	2	4	6	60	12	0	72	6	78
29	Kedawung	1	2	3	37	8	4	49	0	49
30	Karangwareng	2	1	3	25	0	0	25	0	25
31	Talun	2	1	3	25	8	0	33	0	33
32	Gunung Jati	3	3	6	84	8	7	99	0	99
33	Pasaleman	1	1	2	2	14	14	30	0	30
34	Pabuaran	1	2	3	34	1	7	42	0	42
35	Tengah Tani	1	1	2	22	3	3	28	0	28
36	Plered	3	0	3	39	8	6	53	7	60
37	Gempol	2	0	2	32	0	0	32	0	32
38	Greged	2	1	3	29	2	0	31	0	31
39	Suranenggala	2	0	2	43	6	0	49	0	49
40	Jamblang	2	0	2	24	14	9	47	0	47
JML		**80**	**107**	**187**	**1,913**	**333**	**164**	**2,410**	**81**	**2,491**

Profil Pendidikan 2020/2021

2.2.6. Manajemen pengelolaan pendidikan

Seiring bergulirnya era otonomi daerah dimana terdapat pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sehingga membawa nuansa baru dalam sistem pengelolaan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Otonomi pendidikan memerlukan profesionalisme pengelolaan manajemen baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun tingkat sekolah. Sebagian besar pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen pendidikan di Kabupaten Cirebon sudah berjalan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kinerja manajemen birokrasi pendidikan masih dirasa kurang sehingga tingkat efisien dan efektifitasnya masih rendah. Kurang tersedia data pendidikan yang akurat, tepat dan akuntabel, untuk itu perlu secepatnya dibangun sistem pendataan pendidikan yang terpadu antara Dinas sampai ke sekolah-sekolah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang handal.

Otonomi Daerah juga berdampak pada pengelolaan manajemen ditingkat sekolah yang dikenal dengan manajemen berbasis sekolah atau school based management. Saat ini seluruh sekolah di Kabupaten Cirebon telah melakasanakan MBS ditandai dengan adanya beberapa prinsip umum yang patut menjadi pedoman dalam pelaksanaan MBS diantaranya : sekolah telah memiliki visi, misi dan strategi kearah pencapaian mutu pendidikan, melibatkan partisipasi masyarakat, terbentuknya Komite Sekolah serta adanya transparansi dan akuntabilitas dimana sekolah beserta Komite Sekolah merupakan institusi terdepan yang paling bertanggungjawab dalam pengeloaan sekolah.

Tabel 2.2.6.1
APK/APM TK/PAUD

No	KECAMATAN	APK Tingkat PAUD			APK Tingkat TK		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	17.64	16.05	16.87	17.52	20.13	18.78
02	Ciledug	30.42	34.51	32.36	36.60	40.48	38.43
03	Losari	13.93	16.68	15.22	15.80	19.61	17.60
04	Babakan	19.76	20.19	19.97	22.77	24.63	23.66
05	Karang Sembung	16.45	17.55	16.97	17.18	20.65	18.81
06	Lemahabang	29.26	29.71	29.48	35.24	35.22	35.23
07	Sedong	21.50	20.71	21.12	24.20	22.95	23.60
08	Astana Japura	21.67	23.98	22.78	18.40	21.73	20.05
09	Mundu	22.58	24.08	23.31	26.11	26.94	26.52
10	Beber	21.07	23.14	22.07	12.29	12.35	12.32
11	Sumber	20.36	20.40	20.38	29.30	28.43	28.88
12	Palimanan	11.51	12.26	11.87	13.58	13.98	13.77
13	Plumbon	23.52	23.27	23.40	25.10	25.90	25.47
14	Weru	17.76	18.33	18.03	26.36	27.06	26.69
15	Kapetakan	9.42	10.47	9.94	8.47	9.44	8.96
16	Klangenan	19.30	16.65	18.02	15.85	13.85	14.90
17	Arjawinangun	18.07	20.72	19.35	18.03	20.39	19.18
18	Ciwaringin	22.57	26.81	24.64	21.07	24.80	22.87
19	Susukan	9.51	10.38	9.93	10.75	11.94	11.31
20	Gegesik	23.35	23.51	23.43	27.53	26.98	27.26
21	Susukan Lebak	29.80	30.67	30.22	26.06	25.48	25.78
22	Pabedilan	16.76	18.38	17.54	21.32	23.39	22.32
23	Dukupuntang	25.55	25.92	25.73	26.75	25.60	26.18
24	Panguragan	26.28	29.64	27.90	31.07	33.14	32.09
25	Kaliwedi	16.11	17.53	16.79	25.91	26.34	26.12
26	Pangenan	11.44	12.90	12.13	15.31	18.36	16.76
27	Gebang	18.57	18.48	18.53	24.70	24.48	24.60
28	Depok	17.54	17.59	17.56	19.81	19.02	19.44
29	Kedawung	21.58	21.20	21.39	31.09	30.96	31.03
30	Karangwareng	14.58	13.79	14.20	17.78	18.47	18.10
31	Talun	21.47	19.85	20.68	22.77	22.50	22.64

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Gunung Jati	14.65	15.06	14.85	24.28	24.83	24.54
33	Pasaleman	13.86	17.36	15.55	14.95	18.64	16.71
34	Pabuaran	8.41	8.15	8.28	13.76	13.62	13.69
35	Tengah Tani	9.71	8.89	9.31	8.15	8.64	8.39
36	Plered	24.60	25.10	24.84	36.76	35.71	36.25
37	Gempol	23.31	23.12	23.22	18.29	18.37	18.33
38	Greged	24.47	23.01	23.77	20.79	17.91	19.35
39	Suranenggala	19.21	20.85	20.02	23.23	24.88	24.03
40	Jamblang	19.75	23.23	21.41	27.98	33.12	30.43
	Rata-rata	19.28	19.97	19.62	22.03	22.82	22.41

Sumber Data: Profil Pendidikan 2020/2021

Tabel 2.2.6.2

APK/APM SD

No	KECAMATAN	APK Tingkat SD			APM Tingkat SD		
		Termasuk Paket A			Termasuk Paket A		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	127.00	119.74	123.45	114.33	108.28	111.37
02	Ciledug	133.62	129.29	131.50	120.38	115.53	118.01
03	Losari	133.22	134.97	134.09	120.37	121.91	121.13
04	Babakan	157.35	159.29	158.26	136.74	139.40	137.99
05	Karang Sembung	58.75	59.07	58.90	53.32	53.06	53.19
06	Lemahabang	194.96	186.87	190.96	172.76	166.97	169.90
07	Sedong	88.91	85.20	87.11	81.63	78.01	79.87
08	Astana Japura	237.30	236.03	236.69	223.71	222.70	223.22
09	Mundu	217.56	224.13	220.69	195.60	201.74	198.53
10	Beber	68.35	65.26	66.84	61.65	58.91	60.31
11	Sumber	289.88	279.10	284.67	256.79	247.80	252.44
12	Palimanan	79.75	78.53	79.16	70.01	67.96	69.02
13	Plumbon	176.19	176.63	176.40	158.21	158.59	158.39
14	Weru	102.73	102.99	102.85	92.12	91.99	92.06
15	Kapetakan	64.13	63.76	63.95	54.95	55.01	54.98
16	Klangenan	91.85	86.35	89.15	81.30	77.12	79.25
17	Arjawinangun	139.78	139.78	139.78	122.42	123.39	122.89
18	Ciwaringin	57.70	57.52	57.61	50.45	50.66	50.55
19	Susukan	108.03	113.76	110.79	92.42	95.75	94.02
20	Gegesik	134.48	130.71	132.68	118.84	115.38	117.19
21	Susukan Lebak	65.35	63.14	64.27	60.94	58.53	59.76
22	Pabedilan	128.36	119.03	123.86	115.22	105.93	110.74
23	Dukupuntang	139.90	141.69	140.78	130.07	131.08	130.57
24	Panguragan	76.89	76.58	76.74	67.25	68.93	68.05
25	Kaliwedi	119.61	118.60	119.12	106.90	104.84	105.90
26	Pangenan	153.33	147.78	150.60	141.51	137.41	139.49
27	Gebang	131.49	126.27	128.87	114.44	110.15	112.29
28	Depok	112.64	112.77	112.70	100.49	99.62	100.07
29	Kedawung	151.51	139.73	145.68	133.74	123.92	128.88
30	Karangwareng	52.12	48.95	50.55	46.84	44.72	45.79
31	Talun	114.32	113.81	114.07	102.13	100.72	101.44
32	Gunung Jati	252.65	252.79	252.72	224.65	227.11	225.84
33	Pasaleman	85.54	86.30	85.91	76.06	77.91	76.96
34	Pabuaran	143.87	143.49	143.68	128.65	131.27	129.93
35	Tengah Tani	86.17	90.48	88.24	76.94	80.04	78.43

1	2	3	4	5	6	7	8
36	Plered	112.88	110.91	111.94	100.62	99.03	99.86
37	Gempol	107.44	107.13	107.30	95.65	94.18	94.97
38	Greged	123.21	118.70	121.02	111.11	107.38	109.30
39	Suranenggala	118.51	117.69	118.12	100.46	102.64	101.50
40	Jamblang	109.03	103.87	106.53	95.97	91.65	93.88
	Rata-rata	117.16	115.23	116.22	104.52	102.92	103.75

Sumber Data: Profil Pendidikan 2020/2021

Tabel 2.2.6.3
APK/APM SMP

No	KECAMATAN	APK Tingkat SMP Termasuk Paket B			APM Tingkat SMP Termasuk Paket B		
		L	P	Rata-Rata	L	P	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Waled	151.28	161.40	156.20	143.38	150.54	146.86
02	Ciledug	151.42	158.69	155.00	128.76	127.13	127.96
03	Losari	180.15	178.96	179.55	140.66	138.36	139.51
04	Babakan	153.07	170.91	161.80	132.25	144.57	138.28
05	Karang Sembung	198.79	251.93	223.96	171.71	220.00	194.59
06	Lemahabang	154.31	146.63	150.64	134.18	137.23	135.64
07	Sedong	80.47	79.05	79.72	83.70	77.34	80.35
08	Astana Japura	264.18	257.69	261.01	244.32	253.96	249.02
09	Mundu	87.32	95.22	91.11	84.51	92.11	88.17
10	Beber	186.93	188.27	187.58	177.41	179.70	178.52
11	Sumber	174.26	164.56	169.55	156.66	156.92	156.79
12	Palimanan	320.22	303.17	311.82	275.84	253.79	264.97
13	Plumbon	102.67	120.06	110.66	97.27	110.72	103.45
14	Weru	215.61	208.55	212.19	218.42	204.62	211.73
15	Kapetakan	116.61	107.83	112.24	96.17	92.60	94.39
16	Klangenan	94.21	78.65	86.72	75.52	63.53	69.75
17	Arjawinangun	200.52	209.46	204.88	169.41	182.46	175.77
18	Ciwaringin	562.08	550.86	556.68	488.36	485.52	487.00
19	Susukan	145.46	145.53	145.50	127.85	137.04	132.37
20	Gegesik	168.14	148.66	158.06	166.43	147.14	156.45
21	Susukan Lebak	190.58	179.21	184.89	179.05	166.23	172.63
22	Pabedilan	170.76	176.25	173.46	156.01	157.12	156.56
23	Dukupuntang	274.60	264.97	269.86	221.58	217.47	219.56
24	Panguragan	193.34	162.00	177.55	165.05	142.47	153.68
25	Kaliwedi	133.04	137.82	135.32	148.38	154.71	151.39
26	Pangenan	199.86	221.37	209.82	178.62	208.32	192.37
27	Gebang	116.68	104.33	110.60	113.17	104.83	109.06
28	Depok	130.51	121.71	126.07	115.34	105.71	110.48
29	Kedawung	89.84	73.30	81.98	63.99	63.94	63.97
30	Karangwareng	85.96	80.35	83.33	70.59	69.98	70.30
31	Talun	72.70	72.11	72.41	60.96	61.88	61.42
32	Gunung Jati	135.57	126.19	130.88	114.24	108.36	111.30
33	Pasaleman	118.13	95.12	106.25	78.96	69.14	73.89
34	Pabuaran	289.62	173.52	232.05	214.03	166.11	190.27
35	Tengah Tani	64.71	59.20	62.06	55.10	49.61	52.46
36	Plered	113.79	119.98	116.73	106.85	107.27	107.05
37	Gempol	113.73	102.89	108.50	99.02	92.24	95.75
38	Greged	99.12	120.37	109.79	93.74	111.98	102.90

1	2	3	4	5	6	7	8
39	Suranenggala	117.90	133.88	125.80	91.38	96.48	93.90
40	Jamblang	104.24	103.50	103.87	71.91	73.03	72.46
	Rata-rata	152.74	155.34	157.08	139.90	139.21	139.56

Sumber Data: Profil Pendidikan 2020/2021

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di KabupatenCirebon, 2020

Tabel 2.2.6.4

Kelompok Umur	*Tahun* 2020
(1)	(2)
15–19	100,00
20–24	99,73
25–29	100,00
30–34	99,68
35–39	99,10
40–44	99,24
45–49	100,00
50+	84,29
15–24	**99,87**
15–44	**99,65**
15+	**95,42**
45+	**87,99**

Sumber/*Source:* BPS, Survei Sosial EKonomi Nasional (Susenas)/*BPS-Statistics Indonesia, National Socio Economic Survey*

2.3. Kinerja Pelayanan Bidang Pendidikan

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan mengambarkan sejauh mana capaian pelayanan khususnya dalam penyelenggarakan kegiatan pendidikan. Pendidikan termasuk kedalam urusan wajib bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah, artinya bahwa setiap daerah harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sejalan dengan amanat dari UUD 1945 pasal 33 yang menyebutkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia dimana setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa layanan pendidikan harus terjangkau dan

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pendidikan menyasar pada capaian pembangunan pendidikan selama 5 tahun ke belakang (visi dan tujuan pembangunan pendidikan) menggunakan sebanyak 28 Indikator. 10 Indikator secara langsung menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Penentuan 28 Indikator tersebut bersumber pada Standar Pelayanan Minimal berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal serta Indikator Kunci berkaitan dengan pendidikan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dilihat berdasarkan komposisi Indeks Pendidikan sendiri yakni Angka Melek Huruf dan Rata-Rata Lama Sekolah keduanya mengalami trend kenaikan namun tetap tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pada indikator Angka Melek Huruf tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan 0.76 point. Berbeda dengan Rata-rata Lama Sekolah mengalami kenaikan dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019, sayangnya angka RLS tersebut masih berada dibawah angka target yang telah ditetapkan. Angka RLS Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sebesar 6.74 tahun. Artinya bahwa kemampuan masyarakat yang telah berusia 25 tahun keatas hanya dapat mengakses pendidikan hingga tingkat SMP kelas 1 akan naik ke kelas 2, tentunya capaian tersebut belum dapat mencapai pendidikan wajib 12 tahun.

Ada beberapa faktor keberhasilan serta ketidakberhasilan dari kedua indikator tersebut. Pertama keberhasilan faktor Angka Melek Huruf dikarenakan sebagian besar masyarakat umum sudah mulai menyadari pentingnya membaca guna mendukung aktivitas keseharian terutama dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Sedangkan berkenaan dengan Rata-Rata Lama Sekolah dapat dilihat dari aspek aksesbilitas yang akan dibahas lebih lanjut. Tentunya

aksesbilitas pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan penduduk terhadap menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya.

Gambaran umum aksesibilitas pendidikan dapat dilihat dari daya serap pendidikan melalui Angka Partisipasi Kasar/Angka Partisipasi Murni. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai indikator dalam pembangunan di bidang pendidikan. APK/APM lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar diartikan sebagai rasio penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SD/SMP/SMA terhadap kelompok usia (7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun), tanpa memperhatikan usia bagi penduduk yang sedang menempuh pendidikan selama dalam tingkatan usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dimulai tahun 2017 yakni 106.52% hingga tahun 2018 sebesar 107.33%. Akan tetapi di tahun 2019 mengalami penuruan sebesar 4.01% menjadi 103.32%. Rasio APK pada tingkat SD melebihi batas maksimum 100%, artinya banyak siswa yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang sekolah dasar tidak sesuai umur, lebih muda atau lebih tua. Pada tahun 2019 APK SD mengalami penurunan, artinya bahwa anak yang sekolah pada jenjang SD tidak sesuai umur mengalami penurunan. Fenomena peningkatan APK ditandai biasanya banyak orang tua yang menyekolahkan anak pada jenjang SD lebih awal. Jumlah tersebut terkoreksi seiring dengan berkembangnya fasilitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pada APK jenjang pendidikan SMP mengalami peningkatan dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 meskipun mengalami fluktuatif pada tahun-tahun tertentu. APK pendidikan SMP selama 3 tahun mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3.93%.

2. Angka Partisipasi Murni

Perolehan APM pada seluruh jenjang pendidikan tidak berbeda jauh dengan Perolehan APK di Kabupaten Cirebon. Angka APM tentunya memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan angka APK. Hal ini disebabkan APM hanya menghitung jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan jenjang Dasar hingga dengan kelompok umur sekolah yang sesuai. Angka Partisipasi Murni pendidikan Dasar mengalami rata- rata pertumbuhan dari tahun 2014 sampai tahun 2019 sebesar 5.23%, di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 4.01%. Pada tahun 2017 APM jenjang Pendidikan Dasar sebesar 103.3% sudah berada diatas 100%, artinya bahwa dari seluruh usia anak (7-12 tahun) sudah seluruhnya sedang menempuh pendidikan dasar.

Tinggi rendahnya APM serta APK pada suatu jenjang pendidikan tertentu tidak lepas dari faktor Angka Putus Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah serta Angka Kelulusan. Lebih lanjut akan dijelaskans sebagai berikut:

1) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan siswa yang tidak tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang yang bersangkutan dikalikan 100%. Diharapkan bagi Kabupaten Cirebon memiliki Angka Putus Sekolah yang rendah dikarenakan berdampak terhadap indikator pendidikan lainya. Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar, mengalami penurunan angka putus sekolah, selama 4 tahun ke belakang rata-rata sebesar 0.01%. di tahun 2017 Angka Putus Sekolah pendidikan Dasar sebesar 0.10 menjadi 0.07 di tahun 2019. Berbeda dengan jenjang pendidikan SMP yang mengalami penurunan Angka Putus Sekolah tahun 2014-2018. Rata-rata pengurangan di tahun 2014-2018 sebesar 0.05% dan mengalami kenaikan sebesar 0.23% di tahun 2015. Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SMP pada tahun 2018 sebesar 0.24% dan pada tahun 2019 mengalami

penurunan sebesar 0.20%. Meskipun mengalami penurunan namun tetap memiliki persentasi yang tinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan SD.

2) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka Melanjutan Sekolah yakni rasio perbandingan jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah lulusan jenjang pendidikan sebelumnya. Indikator tersebut memiliki kaitan terhadap indikator pembangunan pendidikan lainya. Pada tahun awal 2014, Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP sebesar 97.53%. Di tahun 2017 Angka Melanjutkan Sekolah SD ke SMP sebesar 108.82%. Angka tersebut mengalami fluktuatif, tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7.82%, tahun selanjutnya 2016 hingga 2017 mengalami penurunan sebesar 1.59%, pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami kanaikan yaitu pada tahun 2019 Angka melanjutkan dari SD ke SMP mencapai 110.66%.

3) Angka Kelulusan Sekolah

Angka Kelulusan menunjukan rasio jumlah siswa yang mampu menyelesaikan pada jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh siswa pada jenjang pendidikan bersangkutan. Secara keseluruhan angka kelulusan bagi seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Cirebon hampir mencapai 100%. Angka kelulusan jenjang pendidikan Dasar (SD/MI/SD-LB) pada tahun 2017 sebesar 95.80%, angka tersebut mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0.85% sampai dengan tahun 2019 sebesar 97.50%. Angka Kelulusan Pendidikan Menengah (SMP/MTS/SMP-LB) pada tahun 2017 sebesar 82.06%, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1.25%. Pada tahun 2019 hingga mengalami peningkatan sebesar 0.80%.

Pembangunan di bidang pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan infrastruktur

menjadi standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bentuk implementasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Pembangunan Infrastruktur yang dimaksud di bidang pendidikan yakni penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan agar dapat menyerap partisipasi kelompok penduduk usia sekolah serta peningkatan kualitas dan kuantitas penunjang pembelajaran agar menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Pengukuran kinerja pelayanan pendidikan dalam penyediaan infrastruktur dilakukan melalui indikator Ruang Kelas Baik (%), Rasio Bangunan sekolah terhadap kelompok usia sekolah. Lebih lanjut akan dijelaskan pada masing-masing indikator dibawah ini:

4) Ketersediaan Ruang Kelas Baik (%)

Ruang Kelas Baik memberikan informasi persentase Ruang Kelas dalam kondisi Baik dari seluruh Ruang Kelas yang ada. Standar pelayanan pendidikan tidak hanya sebatas pada penyediaan berkenaan dengan infrastruktur melainkan pelayanan dalam penyediaan tenaga pendidik terhadap peserta didik tak kalah penting sebagai upaya melahirkan peserta didik yang berkualitas. Pada periode Renstra sebelumnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, salah satunya menyasar pada peningkatan serta pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas. Evaluasi kinerja pelayanan dalam penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas serta pemerataan menggunakan beberapa indikator, dinataranya: Rasio jumlah Guru terhadap murid per-kelas, Rasio guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV.

5) Rasio Guru terhadap siswa per-kelas

Rasio Guru terhadap siswa perkelas diartikan kapasitas satu guru mengajar dalam kelas dapat mengajar sejumlah siswa. Idealnya untuk satu Guru dapat mengajar Pendidikan Dasar 32 dan Pendidikan Menengah-Atas sebesar 36, artinya bahwa satu orang

guru dapat mengajar sebesar 32 atau 36 siswa dalam kelas. Selama ini satu rombongan belajar didalam kelas masih menunjukan batas ideal yakni untuk SD sebesar 32 siswa serta SMP, SMA sebesar 36 siswa. Pada jenjang sekolah Dasar rasio antara Guru terhadap Murid sesuai dari batas ambang yang ditentukan yakni satu guru/20 siswa. Pada tahun 2017 rasio Guru terhadap siswa mencapai 20 siswa begitu juga pada tahun 2019 rasio Guru terhadap siswa mencapai 20 siswa. Sebaliknya pada jenjang SMP/Sederajat masih memiliki rasio dibawah dari ambang batas maksimum yakni dibawah 36. Kondisi tersebut bisa menimbulkan efek positif artinya bahwa kebutuhan guru sudah terdistribusi dengan baik.

6) Rasio Guru yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

Berkenaan dengan peningkatan kualitas mutu tenaga pendidik tergambar dari rasio guru yang memenuhi kualifikasi jenjang SD/SMP. Di tahun 2017 Guru SD/SMP yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV yakni SD sebanyak 13.051, Guru SMP 4,862 Guru. Jumlah tersebut pada jenjang sekolah SD mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 9.539 Guru. Berbeda dengan Guru pada jenjang sekolah SMP pada tahun 2019 yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV mengalami kenaikan menjadi 5.243 Guru. Keberhasilan program tersebut tak lepas dari fokus kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatan mutu pendidikan salah satunya memberikan bantuan dana pendidikan kepada guru baik secara langsung maupun tidak langsung berkenaan dengan peningkatan pendidikan S-1 maupun Pelatihan Profesi Guru atau dikenal dengan istilah PPG.

Pencapaian atas kinerja pelayanan pendidikan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan tidak terlepas atas Anggaran serta Realisasi Anggaran terkait program pelayanan pendidikan. Dinas Pendidikan selaku Perangkat Daerah melakukan penyelenggaraan kegiatan pendidikan termasuk ke dalam salah satu program yang

bersifat prioritas dalam pembangunan daerah. Hal tersebut dibuktikan bahwa 20% alokasi dari total APBD diarahkan untuk pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 mengamanatkan kepada daerah minimal alokasi Dana Pendidikan sebesar 20% dari total APBD.

Pada masa lalu tata kelola pendidikan belum sepenuhnya bebasis data atau sistem informasi yang akurat, tepat dan akuntabel. Namun sekarang sistem tersebut telah dibangun diantaranya DAPODIK dan lain-lain meskipun sampai saat ini masih terus menerus diadakan penyempurnaan dan perbaikan guna terpenuhinya satu-satunya data pendidikan yang dapat digunakan oleh stakehorders yang membutuhkan.

Tabel C.23. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

LEMBAR 1

N0.	IKK	TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN											
		TARGET 2014		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
(1)	(4)	(5)		(6)		(5)		(6)		(7)		(8)	
1	Meningkatnya Kesempatan												
	dan pemerataan pendidikan.												
	- RLS (Th)	Th	7.00	Th	7.20	Th	7.50	Th	6.50	Th	6.75	Th	7.00
	- AMH	%	94.76	%	94.96	%	94.63	%	94.83	%	95.03	%	95.23
	MELEK HURUF AL-QUR'AN												
	SD (%)	%	-	%	38	%	46	%	54	%	62	%	70
	SMP (%)	%	-	%	47	%	54	%	61	%	68	%	75
	SMA (%)	%	-	%	52	%	59	%	66				
	SMK (%)	2	-	%	52	%	59	%	66				
	- APK PAUD	%	17.67	%	18.02	%	36.7	%	37.82	%	38.91	%	40.00
	- APM PAUD	%		%		%		%	37.80	%	38.90	%	40.00
	- APK SD/MI	%	**104.76**	%	**106.59**	%	**109.00**	%	**109.29**	%	**109**	%	**109**
	- APM SD/MI	%	**100**	%	**100.29**	%	**99.93**	%	**99.94**	%	**99.95**	%	**99.96**
	- APK SMP/MTs	%	**103.30**	%	**110.38**	%	**110.00**	%	**110**	%	**110**	%	**110.11**
	- APM SMP/MTs	%	**100**	%	**89.60**	%	**89.90**	%	**90.10**	%	**90.30**	%	**90.50**
	- APK SM / K	%	**102.45**	%	**79.54**	%	**80.02**	%	**80.50**				
	- APM SM / K	%	**100**	%	**60.84**	%	**61.32**	%	**61.80**				
2	Meningkatnya Mutu dan rele-												
	vansi pendidikan.												
	- Angka Lulusan SD sederajat	%	**100**	%	100.00	%	**100.00**	%	**99.95**	%	99.96	%	99.97
	- Angka Lulusan SMP sederajat	%	**99.98**	%	99.00	%	**100.00**	%	**99.94**	%	**99.95**	%	**99.96**
	- Angka Lulusan SMA sederajat	%	**99.86**	%	99.00	%	**100.00**	%	**99.93**				
	- Angka Lulusan SMK sederajat	%	**99.97**	%	99.00	%	**99.71**	%	**99.77**				
	- Angka Melanjutkan SD ke SMP	%		%		%		%	**90.01**	%	**90.03**	%	**90.05**

N0.	IKK	TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN											
		TARGET 2014		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
	- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	%	**0.10**	%	**0.08**	%	**2.27**	%	**2.26**	%	**2.25**	%	**2.24**
	- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	%	**0.50**	%	**0.45**	%	**0.21**	%	**0.2**	%	**0.19**	%	**0.18**
	- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	%	**0.21**	%	**0.35**	%	**0.62**	%	**0.6**				
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	%	**0.10**	%	**0.43**	%	**0.15**	%	**0.14**				
	- Rata-rata Nilai UN/US SD								77.55		78.00		78.33
	- Rata-rata Nilai UN/US SMP								28.00		28.50		29.00
3	Meningkatnya mutu tenaga pendidik												
	- Angka Guru Layak Mengajar :												
	PAUD					%		%	**61.80**	%	**62.30**	%	62.80
	SD	%	**78.42**	%	**78.87**	%	**82.00**	%	**82.50**	%	**83.00**	%	**83.50**
	SMP	%	**94.87**	%	**191.33**	%	**96.00**	%	**96.50**	%	**97.00**	%	**97.50**
	SMA	%	**96.25**	%	**96.70**	%	**96.75**	%	**97.00**				
	SMK	%	**97.75**	%	**98.20**	%	**95.26**	%	**95.51**				
4	Meningkatnya mutu dan jumlah sarana dan prasarana pendidikan :												
	Terakreditasi												
	PAUD							%	-	%	-	%	-
	SD							%	99.95	%	99.96	%	99.97
	SMP							%	98.00	%	98.50	%	99.00
	Rasio Guru /Siswa :												
	SD							%	22.00	%	21.00	%	20.00
	SMP							%	16.00	%	18.00	%	20.00

N0.	IKK	TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN											
		TARGET 2014		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
	Rasio Siswa Per Kelas												
	SD	**28.67**	Siswa	29.33	Siswa	30.00	Siswa	30.66	Siswa	31.33	Siswa	32.00	Siswa
	SMP	**25.17**	Siswa	27.33	Siswa	29.50	Siswa	31.66	Siswa	33.83	Siswa	36.00	Siswa
	SMA	**35.17**	Siswa	35.33	Siswa	35.50	Siswa	35.66	Siswa				
	SMK	**36.82**	Siswa	36.67	Siswa	36.50	Siswa	36.33	Siswa				
	Rasio Kelas Per Ruang Kelas												
	SD	%	**1.28**	%	**1.29**	%	**1.30**	%	**1.25**	%	1.24	%	1.24
	SMP	%	**1.80**	%	**1.81**	%	**1.82**	%	**1.37**	%	1.35	%	1.35
	SMA	%	**0.90**	%	**0.91**	%	**0.92**	%	**0.93**				
	SMK	%	**1.16**	%	**1.15**	%	**1.14**	%	**1.09**				
	Rasio Siswa Per Sekolah :												
	SD	230	Siswa	223	Siswa	215	Siswa	236	Siswa	238	Siswa	238	Siswa
	SMP	528	Siswa	617	Siswa	705	Siswa	524	Siswa	532	Siswa	532	Siswa
	SMA	527	Siswa	616	Siswa	705	Siswa	506	Siswa				
	SMK	628	Siswa	710	Siswa	783	Siswa	515	Siswa				
	Ruang Kelas keadaan Baik :												
	PAUD					%		%	**66.70**	%	**67.20**	%	**68.20**
	SD	%	**73.22**	%	**74.72**	%	**72.00**	%	**73.00**	%	**74.00**	%	**75.00**
	SMP	%	**90.26**	%	**91.76**	%	**78.90**	%	**79.30**	%	**79.64**	%	**80.00**
	SMA	%	**92.54**	%	**94.04**	%	**80.38**	%	**81.92**				
	SMK	%	**94.69**	%	**96.19**	%	**89.20**	%	**89.47**				
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi												
	manajeman pendidikan .												
	Manajemen Berbasis Sekolah :												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00

N0.	IKK	TARGET RENSTRA DINAS PENDIDIKAN											
		TARGET 2014		TARGET 2015		TARGET 2016		TARGET 2017		TARGET 2018		TARGET 2019	
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				
6	Meningkatnya peran serta masyarkat												
	terhadap dunia pendidikan dengan peran aktif komite sekolah												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	**100**	%	**100**				

LEMBAR II : Capaian / Realisasi

N0.	IKK	REALISASI CAPAIAN											
		REALISASI 2014		REALISASI 2015		REALISASI 2016		REALISASI 2017		REALISASI 2018		REALISASI 2019	
(1)	(4)	(9)		(10)		(9)		(10)		(11)		(12)	
1	Meningkatnya Kesempatan												
	dan pemerataan pendidikan.												
	- RLS (Th)	Th	7.00	Th	7.20	Th	7.40	Th	6.41	Th	6.61	Th	6.74
	- AMH	%	94.76	%	94.96	%	95.16	%	94.77	%	95.53	%	95.53
	MELEK HURUF AL-QUR'AN												
	SD (%)	%	-	%	41.80	%	46.67	%	43.70	%	75.20	%	76.00
	SMP (%)	%	-	%	51.70	%	54.78	%	85.97	%	55.71	%	75.00
	SMA (%)	%	-	%	58.27	%	59.86	%	94.31				
	SMK (%)	%	-	%	47.00	%	59.86	%	86.60				
	- APK PAUD	%	17.67	%	18.02	%	50.09	%	49.39	%	66.40	%	65.80
	- APM PAUD	%		%		%		%		%		%	
	- APK SD/MI	%	**110.26**	%	**105.34**	%	**120.79**	%	**120.90**	%	**117.05**	%	116.52

N0.	IKK	REALISASI CAPAIAN					
		REALISASI 2014	REALISASI 2015	REALISASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019
(1)	(4)	(9)	(10)	(9)	(10)	(11)	(12)
	- APM SD/MI	% **98.09**	% **99.997**	% **106.50**	% **106.52**	% **107.33**	% 103.32
	- APK SMP/MTs	% **110.79**	% **111.15**	% **115.97**	% **114.41**	% **115.08**	% 122.27
	- APM SMP/MTs	% **69.6**	% **101.76**	% **94.85**	% **95.54**	% **97.46**	% 97.88
	- APK SM / K	% **74.60**	% **113.98**	% **96.64**	% **100.65**		
	- APM SM / K	% **57.85**	% **84.58**	% **85.40**	% **75.92**		
2	Meningkatnya Mutu dan rele-						
	vansi pendidikan.						
	- Angka Lulusan SD sederajat	% 99.50	% 98.99	% 96.50	% 95.80	% 100	% 97.50
	- Angka Lulusan SMP sederajat	% **100**	% **100.00**	% **83.23**	% **82.06**	% **80.81**	% 81.61
	- Angka Lulusan SMA sederajat	% **100**	% **100.00**	% **83.61**	% **74.42**		
	- Angka Lulusan SMK sederajat	% **83.46**	% **100.00**	% **66.46**	% **77.38**		
	- Angka Melanjutkan SD ke SMP	% 97.53	% 105.35	% **110.41**	% **108.82**	% **108.97**	% 110.66
					1.59		
	- Angka Putus Sekolah SD Sederajat	% **0.10**	% **0.14**	% **0.09**	% **0.10**	% **0.08**	% 0.07
	- Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	% **0.45**	% **0.68**	% **0.35**	% **0.29**	% **0.24**	% 0.20
	- Angka Putus Sekolah SMA Sederajat	% **0.37**	% **0.72**	% **0.29**	% **0.56**		
	- Angka Putus Sekolah SMK Sederajat	% **0.45**	% **0.64**	% **0.06**	% **0.02**		
	- Rata-rata Nilai UN/US SD				74.1	76.63	77.80
	- Rata-rata Nilai UN/US SMP				52.8	58.94	58.70
3	Meningkatnya mutu tenaga pendidik						
	- Angka Guru Layak Mengajar :						
	PAUD			%	%	% 71.63	% **73.36**

N0.	IKK	REALISASI CAPAIAN											
		REALISASI 2014		REALISASI 2015		REALISASI 2016		REALISASI 2017		REALISASI 2018		REALISASI 2019	
(1)	(4)	(9)		(10)		(9)		(10)		(11)		(12)	
	SD	%	**77.97**	%	**84.92**	%	**89.66**	%	**94.05**	%	**95.42**	%	**96.86**
	SMP	%	**94.42**	%	**99.29**	%	**95.05**	%	**96.46**	%	**97.27**	%	**97.93**
	SMA	%	**95.8**	%	**95.42**	%	**99.07**	%	**98.78**				
	SMK	%	**94.51**	%	**96.30**	%	**96.57**	%	**97.00**				
4	Meningkatnya mutu dan jumlah												
	sarana dan prasarana pendidikan :												
	Terakreditasi												
	PAUD							%	-	%	-	%	-
	SD							%	99.95	%	97.70	%	97.70
	SMP							%	98.00	%	85.00	%	89.10
	Rasio Guru /Siswa :												
	SD							%	20.00	%	21.00	%	20
	SMP							%	16.00	%	15.00	%	15
	Rasio Siswa Per Kelas												
	SD	**28.00**	Siswa	30	Siswa	30.00	Siswa	27.00	Siswa	22.00	Siswa	26.00	Siswa
	SMP	**34.00**	Siswa	36	Siswa	31.00	Siswa	29.00	Siswa	32.00	Siswa	31.00	Siswa
	SMA	**35.00**	Siswa	35	Siswa	35.00	Siswa	37.00	Siswa				
	SMK	**37.00**	Siswa	36	Siswa	34.00	Siswa	33.00	Siswa				
	Rasio Kelas Per Ruang Kelas												
	SD	%	**1.29**	%	1.18	%	1.12	%	1.24	%	1.50	%	1.28
	SMP	%	**1.13**	%	1.02	%	1.12	%	1.17	%	1.02	%	1.02
	SMA	%	**0.89**	%	0.97	%	0.97	%	1.22				
	SMK	%	**1.17**	%	1.21	%	1.14	%	1.14				

N0.	IKK	REALISASI CAPAIAN											
		REALISASI 2014		REALISASI 2015		REALISASI 2016		REALISASI 2017		REALISASI 2018		REALISASI 2019	
(1)	(4)	(9)		(10)		(9)		(10)		(11)		(12)	
	Rasio Siswa Per Sekolah :												
	SD	238	Siswa	227	Siswa	219	Siswa	219	Siswa	219	Siswa	215	Siswa
	SMP	472	Siswa	487	Siswa	426	Siswa	425	Siswa	421	Siswa	415	Siswa
	SMA	438	Siswa	466	Siswa	500	Siswa	498	Siswa				
	SMK	455	Siswa	480	Siswa	473	Siswa	482	Siswa				
	Ruang Kelas keadaan Baik :												
	PAUD					%		%		%	86.00	%	87.77
	SD	%	**69.00**	%	**67.51**	%	**23.02**	%	**66.39**	%	**65.82**	%	64.60
	SMP	%	**77.85**	%	**80.15**	%	**79.69**	%	**81.35**	%	**79.38**	%	80.36
	SMA	%	**75.77**	%	**80.29**	%	**74.31**	%	**79.24**				
	SMK	%	**88.40**	%	**90.39**	%	**92.67**	%	**92.15**				
5	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi												
	manajeman pendidikan .												
	Manajemen Berbasis Sekolah :												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00				
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00				
6	Meningkatnya peran serta masyarkat												
	terhadap dunia pendidikan dengan peran aktif komite sekolah												
	SD	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMP	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00
	SMA	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00				
	SMK	%	100.00	%	100.00	%	100.00	%	100.00				

Halaman 1 . TABEL T-C. 23 MATRIKS TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SDGs

No.	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		SATUAN	TAHUN DASAR (2017)	TARGET TAHUNAN						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TUJUAN 1	**TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)**									
	TARGET 1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.									
	INDIKATOR 1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	%	106,52	107,33	**100**	100	100	100	100	100
	INDIKATOR 1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	%	95,54	97,45	**98**	**98,30**	98,59	98,89	99,19	99,48
	INDIKATOR 1.4.1.(I)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Sederajat	%	**KEWENANGAN PROVINSI**							
	TUJUAN 4	**PENDIDIKAN BERKUALITAS**									
	TARGET 4.1.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.									
	INDIKATOR 4.1.1.	Proporsi anak-anak dan remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, © tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemapuan minimum dalam : (i) membaca (ii) matematika									
	INDIKATOR 4.1.1.(a)	Peresentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	99,95	97,70	**97,73**	**98,00**	**98,73**	**98,85**	**99,00**	**100,00**
	INDIKATOR 4.1.1.(b)	Peresentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	98,00	85,00	**85,03**	**87,58**	**89,33**	**91,12**	**93,85**	**96,67**
	INDIKATOR 4.1.1.(c)	Peresentase SMA/MA berakreditasi minimal B	%	**KEWENANGAN PROVINSI**							
	INDIKATOR 1.4.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	%	120,9	117,05	**116**	**115**	**114**	**113**	**112**	**111**
	INDIKATOR 1.4.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	%	114,41	115,08	**114**	**113**	**112**	**111**	**110**	**109**
	INDIKATOR 1.4.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	%	**KEWENANGAN PROVINSI**							
	INDIKATOR 1.4.1.(g)	Angka Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun	%	6.41	6.61	**7.00**	6,78	6,88	6,98	7,08	7,18

No.	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		SATUAN	TAHUN DASAR (2017)	TARGET TAHUNAN						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TARGET 4.2.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perekembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasra									
	INDIKATOR 4.2.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) %	%	49,39	66,40	**66,40**	**66,80**	67,20	67,60	68,01	68,42
	TARGET 4.3.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas.									
	INDIKATOR 4.3.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat	%	**KEWENANGAN PROVINSI**							
	INDIKATOR 4.3.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi	%	**KEWENANGAN PROVINSI**							
	TARGET 4.5.	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi									
	INDIKATOR 4.5.1.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di : (1) SD/MI/sederajat, (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan / laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	%								
		(1) SD/MI/Sederajat (APM)			0.92	0,921	0,922	0,923	0,924	0,925	0,926
		(2) SMP/MTs/Sederajat (APM)			0.98	0,981	0,982	0,983	0,984	0,985	0,986
	TARGET 4.6.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
	INDIKATOR 4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 Tahun	%	**94,77**	**95,53**	**95,55%**	**96%**	**96,58%**	**97,16%**	**97,74%**	**98,32%**
	TARGET 4.a.1*	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat, dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.									

No.	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		SATUAN	TAHUN DASAR (2017)	TARGET TAHUNAN						
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	INDIKATOR 4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, © komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas (e) air minum layak (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin,	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	TARGET 4.c.1*	Pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internatioan dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil									
	INDIKATOR 4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%								
		Guru TK Tersertifikasi									
		Guru SD Tersertifikasi			59.86	**59,90**	**59,94**	59,97	60,01	60,04	60,08
		Guru SMP Tersertifikasi			47.10	**47,13**	**47,16**	**47,18**	**47,21**	**47,24**	**47,27**
	TUJUAN 5	**KESETARAAN GENDER**									
	TARGET 5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunar perempuan									
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat	%	**KEWENANGAN PROVINSI**							

Halaman 2 : REALISASI

No.	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT		REALISASI TAHUNAN				
			2017	2018	2019	2020	2021
	TUJUAN 1	**TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)**					
	TARGET 1.4.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.					
	INDIKATOR 1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Sederajat	**106,52**	**107,33**	**103,32**	**103,75**	
	INDIKATOR 1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	**95,54**	**97,46**	**97,88**	**139,56**	
	INDIKATOR 1.4.1.(I)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Sederajat					
	TUJUAN 4	**PENDIDIKAN BERKUALITAS**					
	TARGET 4.1.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.					
	INDIKATOR 4.1.1.	Proporsi anak-anak dan remaja : (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, © tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemapuan minimum dalam : (i) membaca (ii) matematika					
	INDIKATOR 4.1.1.(a)	Peresentase SD/MI berakreditasi minimal B	99,95	97,70	97,70	**97,60**	
	INDIKATOR 4.1.1.(b)	Peresentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	98,00	85,00	89,10	**82,50**	
	INDIKATOR 4.1.1.(c)	Peresentase SMA/MA berakreditasi minimal B					

No.	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			REALISASI TAHUNAN				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	INDIKATOR	1.4.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat	**120,90**	**117,05**	**116,52**	**116,22**	
	INDIKATOR	1.4.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat	**114,41**	**115,08**	**122,27**	**157,08**	
	INDIKATOR	1.4.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat					
	INDIKATOR	1.4.1.(g)	Angka Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun	6,41	6,61	**6,74**	**6,92**	
	TARGET	4.2.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perekembangan dan pengasuhan anak usia dini,pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasra					
	INDIKATOR	4.2.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) %	49,39	66,40	65,80	**42,03**	
	TARGET	4.3.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas.					
	INDIKATOR	4.3.1.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Sederajat					
	INDIKATOR	4.3.2.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi					
	TARGET	4.5.	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli dan anak-anak dalam kondisi					
	INDIKATOR	4.5.1.	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di : (1) SD/MI/sederajat, (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan / laki-laki di (4) Perguruan Tinggi					
			(1) SD/MI/Sederajat (APM)				0.99	
			(2) SMP/MTs/Sederajat (APM)				1.06	
	TARGET	4.6.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi					
	INDIKATOR	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 Tahun	94,77	95,53	75,00	**99,73%**	

No.	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT			REALISASI TAHUNAN				
				2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	TARGET	4.a.1*	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat, dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.					
	INDIKATOR	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke : (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, © komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas (e) air minum layak (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin,	100	100	100	100	
	TARGET	4.c.1*	Pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internatioan dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil					
	INDIKATOR	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.					
			Guru TK Tersertifikasi					
			Guru SD Tersertifikasi				84.77	
			Guru SMP Tersertifikasi				79.22	
	TUJUAN	**5**	**KESETARAAN GENDER**					
	TARGET	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunar perempuan					
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat					

TABEL T-C. 24 REALISASI ANGGARAN 2 dan 5 TAHUN TERAKHIR 2015 s.d. 2020

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon - Tahun 2016 - 2020

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
		JUMLAH ANGGARAN :	**73,401,865,450**	**284,969,437,800**	**293,292,923,704**	**339,513,318,700**	**314,001,003,543**
	01	**Program Pelayanan Administrsi Perkantoran**	**1,565,156,600**	**1,594,495,900**	**7,082,310,100**	**1,796,092,900**	**1,826,947,700**
1	01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	306,408,000	320,112,000	360,744,000	385,503,600	407,752,000
2	01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	33,400,000	51,900,000	54,400,000	61,100,000	59,700,000
3	01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	302,548,800	449,713,400	448,212,700	462,548,200	494,658,600
4	01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	321,022,900	243,593,500	223,241,600	237,775,100	252,491,100
5	01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	50,335,200	51,200,000	54,981,000	62,548,000	68,772,000
6	01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	137,340,000	167,160,000	167,144,000	190,284,000	190,284,000
7	01.17	Penyediaan makanan dan minuman	224,972,000	221,397,000	221,320,000	251,526,000	273,460,000
8	01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulati ke Luar Daerah	131,880,000	62,640,000	62,640,000	72,660,000	79,830,000
9	01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	57,249,700	26,780,000	5,489,626,800	72,148,000	-
	02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**3,734,075,300**	**3,435,837,312**	**2,955,693,400**	**3,009,463,500**	**3,372,747,300**
10	02.03	Pembangunan Gedung Kantor		348,960,000		50,700,000	425,166,000
11	02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	171,573,900	444,510,400	297,007,300	183,957,000	246,750,000
12	02.11	Sewa tanah/gedung	1,363,049,000	210,794,800	210,794,300	155,489,800	155,485,300
13	02.22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	971,492,400	1,098,577,112	1,069,771,800	1,168,258,700	1,150,666,000

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
14	02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	706,860,000	706,860,000	706,860,000	830,652,000	913,600,000
15	02.28	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	101,100,000	304,500,000	249,500,000	198,000,000	200,500,000
16	02.29	Pemeliharaan rutin / berkala meubeulair	-	72,450,000			
17	02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	300,000,000	249,185,000	421,760,000	422,406,000	280,580,000
	02.4	Pengadaan komputer dan jaringan	120,000,000				
	03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**-**	**1,217,062,500**	**-**	**-**	**-**
18	03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	7,190,000.00		-	
19	03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-	1,209,872,500.00		-	
	05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**295,687,400**	**554,296,800**		**432,163,600**
20	05.11	Peningkatan Pengelolaan Aset		295,687,400	554,296,800	445,068,300	432,163,600
	06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**40,000,000**	**54,606,000**	**107,847,200**		**44,612,000**
21	06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	40,000,000	54,606,000	107,847,200	57,876,000	44,612,000
	07	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN SEKTORAL**	**15,000,000**	**57,875,000**	**49,343,000**	**119,234,400**	**17,637,500**
22	07.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategus (RENSTRA)	15,000,000	57,875,000	49,343,000	119,234,400	17,637,500
	15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**2,098,455,000**	**2,853,332,300**	**3,821,098,550**	**7,204,754,948**	**2,462,394,900**
23	15.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	500,000,000	613,693,250	339,999,800	362,807,100	394,450,000
24	15.07	Pembangunan sarana dan prasaran bermain	150,000,000	127,500,000	122,846,000		
25	15.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	0	243,677,000	299,999,900	362,999,900	-
26	15.15	Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	0	392,515,000	488,068,600	339,998,300	666,298,400
27	15.19	Pengadaan Mebeleur Sekolah	0		200,000,000		
28	15.20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0	71,200,000		3,988,597,800	79,323,000
29	15.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200,000,000	214,254,750	256,522,400	418,552,000	421,700,000

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
30	15.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	0	38,350,300	38,350,300	55,736,200	1,692,800
31	15.58	Pengembangan pendidikan anak usia dini	0	100,000,000	179,995,250	180,764,800	33,776,800
32	15.59	Penyelenggaraan Anak Usia Dini	765,005,000	339,605,000	385,358,600	389,999,100	
33	15.62	Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	56,850,000	96,337,000	457,000,000	239,999,500	624,300
34	15.64	Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	0		343,077,700	208,900,248	780,700
35	15.65	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	0		49,280,000		150,249,900
36	15.67	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	426,600,000	616,200,000	660,600,000	656,400,000	656,400,000
		Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini					1,909,000
		Apresiasi Lembaga dan Gugus					55,190,000
	16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**31,283,668,200**	**50,017,550,500**	**57,450,374,300**	**95,925,012,000**	**301,375,473,043**
37	16.01	Pembangunan Gedung Sekolah SD	0		2,156,330,400	-	252,089,300
38	16.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3,186,291,000	5,188,330,600	3,359,225,900	4,853,288,700	3,097,153,300
39	16.04	Penambahan ruang guru sekolah	300,000,000	866,382,500		-	
40	16.05	Pembangunan ruang laboratorium dan ruang praktikum sekolah	0	338,208,700		-	4,284,687,800
41	16.07	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	0	294,582,500		-	
42	16.08	Pembangunan Ruang serba Guna/Aula	0		100,000,000		
43	16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan tempat parkir	2,373,869,000	6,742,624,900	5,031,539,100	7,056,497,100	
44	16.101	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	0		103,970,000	146,542,700	
45	16.12	Pembangunan perpusatakaan sekolah	0	483,465,000	1,455,084,700	789,850,000	8,190,024,600
46	16.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	0	179,682,500	2,612,403,100	1,182,396,600	2,357,734,700
47	16.15	Pembelian buku-buku dan alat tulis siswa	4,514,521,184	8,335,200,600	1,499,370,000	7,398,896,900	542,657,500
48	16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	6,360,396,184	2,117,471,150	3,500,000,000	3,749,898,100	3,352,649,800
49	16.19	Pengadaan Mebeleur Sekolah	850,000,000	1,150,854,500	1,895,518,300	2,428,594,300	2,365,594,300

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
50	16.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	0	106,000,000	14,194,276,000	-	
51	16.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	9,904,631,632	14,456,092,100	250,000,000	34,337,377,600	11,293,529,500
52	16.57	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	120,000,000	254,960,000	186,812,000	130,347,300	111,205,200
53	16.59	Pelatihan penyusunan kurikulum	100,000,000	661,195,000	227,300,000	135,706,100	
54	16.61	Pembinaan SMP Terbuka	60,137,000	65,120,000	75,120,000	-	
55	16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjan SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan satian pendidikan non islam setara SD dan SMP	80,000,000	4,037,498,000	5,533,855,000	5,399,948,000	246,787,537,243
56	16.66	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	100,000,000	150,000,000	150,000,000	-	
57	16.68	Penyelenggaraan Paktet B Setara SMP	1,028,777,500	957,803,450	1,229,765,900	999,997,200	987,196,700
58	16.69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajeman sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar	75,000,000	83,000,000	83,000,000	83,000,000	83,000,000
59	16.70	Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	550,000,000	847,691,000	486,214,200	398,689,200	358,139,200
60	16.72	Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi			300,000,000	296,600,000	86,660,000
61	16.75	Penyediaan bea siswa transisi	339,000,000	458,060,000	708,060,000	205,147,700	19,776,600
62	16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	240,000,000	327,895,000	151,539,200	149,661,600	142,289,000
63	16.78	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	418,900,000	275,924,000	207,993,000	197,394,800	127,944,800
64	16.79	Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	593,824,000	1,577,232,000	138,432,000	2,986,032,000	1,532,018,500
65	16.83	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik paket B setara SMP	48,767,500	62,277,000	62,387,700	147,932,200	100,000,000
66	16.84	Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional	0		136,304,800	178,976,900	180,583,400
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	39,553,200				

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
67	16.85	Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	0		2,578,766,500	4,516,684,200	1,877,851,200
68	16.87	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	0		1,096,400,000	829,993,400	400,000,000
		Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP					1,124,981,200
69	16.90	Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	0		418,200,000	900,930,000	443,153,200
70	16.91	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	0		2,500,000,000	3,965,254,600	1,788,104,600
71	16.92	Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP	0		200,000,000	25,000,000	
72	16.94	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	0		1,060,733,500	9,015,133,200	3,691,230,000
73	16.95	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	0		456,084,000	233,623,200	19,776,600
74	16.96	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	0		150,738,000	153,732,500	
75	16.97	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs/SMPLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SMP	0		2,701,501,000	2,510,418,400	1,480,800,000
76	16.99	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	0		453,450,000	521,467,500	4,297,104,800
	17	**Program Pendidikan Menengah**	**29,737,776,250**	**1,004,904,000**	**1,457,218,400**	**1,147,912,800**	**2,198,219,800**
77	17.63	Penyelenggaran Paket C Setara SMU	1,180,908,000	942,252,000	1,394,956,500	999,990,000	2,098,885,000
78	17.74	Pelatihan kompetensi pendidik paket C	49,405,000	62,652,000	62,261,900	147,922,800	99,334,800
		Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	680,000,000				-
		Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	70,000,000				-
		Pengadaa Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	650,000,000				-
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5,270,000,000				-
		Pelatihan Penyusunan Kurikulum	75,000,000				-
		Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	92,273,250				-
		Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	20,000,000				-
		Monitoring Evaluasi dan pelaporan	43,540,000				-

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
		Pengembangan minat bakat dan prestasi	250,000,000				-
		Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MAjenjang SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	21,356,650,000				-
	18	**Program Pendidikan Non Formal**	**2,908,940,800**	**3,256,345,000**	**2,002,746,100**	**2,505,772,400**	**989,976,300**
79	18.01	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	84,150,000	62,460,000	62,344,600	147,958,600	99,513,100
80	18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	98,825,000	116,880,000	244,100,000	147,950,900	
81	18.04	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	2,330,679,000	2,977,680,000	1,604,256,500	1,707,455,100	790,463,200
		Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	58,396,400				
		Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	0			199,998,700	
82	18.09	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaranpendidikan nonformal	57,200,000	69,325,000	69,322,200	154,415,000	100,000,000
		Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non formal	70,133,500				
83	18.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	59,760,000	30,000,000	22,722,800	147,994,100	
		Peningkatan pengembangan pendidikan Non formal	80,238,700				
		Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarkat	69,558,200				
	20	**Program Peningkatan Mutu Pendidi dan Tenaga Kependidikan**	**743,505,300**	**625,762,696**	**736,162,685**	**636,314,100**	**353,275,000**
84	20.01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	343,505,300	183,512,796	154,976,000	23,272,500	
85		Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	50,000,000		188,070,000	175,012,600	
86	20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK	100,000,000	176,000,000	136,190,885	155,951,600	136,633,900
		Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan					216,641,100
87	20.09	Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100,000,000	136,249,900	136,249,800	150,347,100	

NO	KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN				
			TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
88	20.11	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan profesi pendidik	50,000,000	130,000,000	120,676,000	131,730,300	
		Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi PTK	100,000,000				
	22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**1,275,288,000**	**840,789,980**	**963,435,480**	**1,340,291,220**	**927,556,400**
89	22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	49,575,000	84,000,000	48,510,800	147,710,500	228,296,800
90	22.07	Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	326,450,000	598,164,980	456,299,780	481,585,920	425,001,500
91	22.08	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	0		78,625,000	-	
92	22.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	99,375,000	78,625,000		97,990,500	
93	22.16	Penyusunan capaian target SPM bidang pendidikan	97,388,000	80,000,000	79,999,900	136,084,300	94,258,100
94		Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	79,000,000		300,000,000	476,920,000	180,000,000
		Penerapan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah	423,500,000				
		Kegiatan Expo Pendidikan	200,000,000				
	23	**Program Peningkatan Kehidupan Keagamaan**	**-**	**492,643,250**	**299,998,500**	**293,473,500**	**-**
95	23.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga keagamaan	0	492,643,250	299,998,500	293,473,500	
96	23.02	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al-Quran Siswa SMP	0		377,412,800		
	27	**Progran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**	**-**	**219,222,545,962**	**215,812,399,189**	**225,534,996,932**	**-**
97	27.01	Progran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	219,222,545,962	215,812,399,189	225,534,996,932	

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon - Tahun 2016 - 2020

LEMBAR II

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
JUMLAH ANGGARAN :	**71,696,041,549**	**98**	**1,666,270,701**	**278,597,876,158**	**98**	**6,371,561,642**	**283,823,056,611**	**97**	**4,357,653,093**
Program Pelayanan Administrsi Perkantoran	**1,496,141,419**	**96**	**69,015,181**	**1,594,495,900**	**100**	**-**	**1,532,349,770**	**22**	**60,333,530**
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	262,968,949	86	43,439,051	320,112,000	100	-	300,427,920	83	60,316,080
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	14,492,300	43	18,907,700	51,900,000	100	-	54,400,000	100	-
Penyediaan Alat Tulis Kantor	302,548,800	100	-	449,713,400	100	-	448,212,700	100	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	320,948,770	100	74,130	243,593,500	100	-	223,224,150	100	17,450
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	50,335,200	100	-	51,200,000	100	-	54,981,000	100	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	137,340,000	100	-	167,160,000	100	-	167,144,000	100	-
Penyediaan makanan dan minuman	224,972,000	100	-	221,397,000	100	-	221,320,000	100	-
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulati ke Luar Daerah	131,880,000	100	-	62,640,000	100	-	62,640,000	100	-
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	50,655,400	88	6,594,300	26,780,000	100	-			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**3,701,313,900**	**99**	**32,761,400**	**3,432,387,312**	**100**	**3,450,000**	**2,858,927,500**		**96,765,900**
Pembangunan Gedung Kantor				348,960,000	100	-			-

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	169,465,500	99	2,108,400	444,510,400	100	-	293,782,800	99	3,224,500
Sewa tanah/gedung	1,356,029,000	99	7,020,000	207,344,800	98	3,450,000	207,614,900	98	3,179,400
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	952,256,400	98	19,236,000	1,098,577,112	100	-	1,044,391,800	98	25,380,000
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	704,763,000	100	2,097,000	706,860,000	100	-	704,781,000	100	2,079,000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	101,100,000	100	-	304,500,000	100	-	199,250,000	80	50,250,000
Pemeliharaan rutin / berkala meubeulair	-		-	72,450,000	100	-			-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	298,000,000	99	2,000,000	249,185,000	100	-	409,107,000	97	12,653,000
Pengadaan komputer dan jaringan	119,700,000	100	300,000						-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**-**		**-**	**1,217,062,500**	**100**	**-**	**-**		**-**
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-		-	7,190,000	100	-			**-**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	-			1,209,872,500	100	-			**-**
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**-**		**-**	**295,687,400**	**100**	**-**	**508,002,650**		**46,294,150**
Peningkatan Pengelolaan Aset				295,687,400	100	-	508,002,650	92	46,294,150
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**38,592,000**	**96**	**1,408,000**	**54,606,000**	**100**	**-**	**107,847,200**		**-**
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	38,592,000	96	1,408,000	54,606,000	100	-	107,847,200	100	-

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN SEKTORAL	**-**	**-**	**15,000,000**	**57,870,000**	**100**	**5,000**	**47,843,000**	**97**	**1,500,000**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategus (RENSTRA)	-	-	15,000,000	57,870,000	100	5,000	47,843,000	97	1,500,000
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**2,053,396,000**	**98**	**45,059,000**	**2,687,311,900**	**94**	**166,020,400**	**3,702,028,050**	**1,263**	**119,070,500**
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	491,680,000	98	8,320,000	612,163,250	100	1,530,000	337,249,800	99	2,750,000
Pembangunan sarana dan prasaran bermain	149,256,000	100	744,000	126,500,000	99	1,000,000	122,346,000	100	500,000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	0		-	243,037,000	100	640,000	297,499,900	99	2,500,000
Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	0			266,415,000	68	126,100,000	424,791,100	87	63,277,500
Pengadaan Mebeleur Sekolah	0						193,172,000	97	6,828,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0			71,000,000	100	200,000			-
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	194,770,000	97	5,230,000	212,679,750	99	1,575,000	253,832,400	99	2,690,000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	0			35,415,800	92	2,934,500	38,350,300	100	-
Pengembangan pendidikan anak usia dini	0			96,670,000	97	3,330,000	179,995,250	100	-
Penyelenggaraan Anak Usia Dini	734,240,000	96	30,765,000	311,294,100	92	28,310,900	373,558,600	97	11,800,000
Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	56,850,000	100	-	95,937,000	100	400,000	457,000,000	100	-
Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	0		-				317,952,700	93	25,125,000
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	0		-				45,680,000	93	3,600,000
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	426,600,000	100	-	616,200,000	100	-	660,600,000	100	-
Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini									
Apresiasi Lembaga dan Gugus									

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**30,166,833,133**	**96**	**1,077,281,867**	**47,006,646,000**	**94**	**3,010,904,500**	**55,549,662,841**	**3,301**	**1,900,711,459**
Pembangunan Gedung Sekolah SD	0		-				2,043,292,928	95	113,037,472
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	3,150,893,000	99	35,398,000	5,134,071,000	99	54,259,600	3,349,560,606	100	9,665,294
Penambahan ruang guru sekolah	298,400,000	99	1,600,000	846,412,500	98	19,970,000			-
Pembangunan ruang laboratorium dan ruang praktikum sekolah	0		-	328,508,700	97	9,700,000			-
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	0		-	290,717,500	99	3,865,000			-
Pembangunan Ruang serba Guna/Aula	0		-				99,763,000	100	237,000
Pembangunan taman, lapangan upacara dan tempat parkir	2,363,434,000	100	10,435,000	6,724,010,900	100	18,614,000	5,018,661,100	100	12,878,000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	0		-				102,439,000	99	1,531,000
Pembangunan perpusatakaan sekolah	0		-	478,120,000	99	5,345,000	1,450,464,700	100	4,620,000
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	0		-	175,372,500	98	4,310,000	2,610,459,100	100	1,944,000
Pembelian buku-buku dan alat tulis siswa	4,067,546,387	90	446,974,797	7,464,416,600	90	870,784,000	1,291,211,520	86	208,158,480
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	5,987,085,046	94	373,311,138	2,102,739,500	99	14,731,650	3,398,903,250	97	101,096,750
Pengadaan Mebeleur Sekolah	832,966,500	98	17,033,500	1,119,494,400	97	31,360,100	1,890,978,820	100	4,539,480
Pengadaan perlengkapan sekolah	0		-	105,700,000	100	300,000	14,067,210,500	99	127,065,500
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	9,798,833,500	99	105,798,132	14,275,298,600	99	180,793,500	249,439,000	100	561,000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	120,000,000	100	-	254,960,000	100	-	186,012,000	100	800,000
Pelatihan penyusunan kurikulum	100,000,000	100	-	643,945,000	97	17,250,000	226,800,000	100	500,000
Pembinaan SMP Terbuka	55,037,000	92	5,100,000	56,820,000	87	8,300,000	10,800,000	14	64,320,000

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjan SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan satian pendidikan non islam setara SD dan SMP	79,460,000	99	540,000	2,962,094,000	73	1,075,404,000	5,526,820,000	100	7,035,000
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	100,000,000	100	-	150,000,000	100	-	128,797,000	86	21,203,000
Penyelenggaraan Paktet B Setara SMP	1,027,737,500	100	1,040,000	957,803,450	100	-	1,228,660,900	100	1,105,000
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajeman sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar	68,560,000	91	6,440,000	76,000,000	92	7,000,000	48,000,000	58	35,000,000
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	503,618,000	92	46,382,000	578,413,800	68	269,277,200	335,894,200	69	150,320,000
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi			-				278,136,000	93	21,864,000
Penyediaan bea siswa transisi	338,460,000	100	540,000	50,560,000	11	407,500,000	439,131,500	62	268,928,500
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	238,992,000	100	1,008,000	327,895,000	100	-	151,539,200	100	-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	402,242,700	96	16,657,300	267,815,550	97	8,108,450	204,388,750	98	3,604,250
Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	584,800,000	98	9,024,000	1,573,200,000	100	4,032,000	134,400,000	97	4,032,000
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik paket B setara SMP	48,767,500	100	-	62,277,000	100	-	61,862,700	99	525,000
Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional	0		-				134,684,800	99	1,620,000
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP									
Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	0		-				2,560,529,500	99	18,237,000

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	0		-				1,091,658,000	100	4,742,000
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP									
Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	0		-				331,651,000	79	86,549,000
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	0		-				2,414,455,000	97	85,545,000
Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP	0		-				186,448,000	93	13,552,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	0		-				1,055,707,500	100	5,026,000
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	0		-				76,416,000	17	379,668,000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	0		-				146,418,267	97	4,319,733
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs/SMPLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SMP	0		-				2,694,301,000	100	7,200,000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	0		-				323,768,000	71	129,682,000
Program Pendidikan Menengah	**29,455,123,847**	**99**	**282,652,403**	**1,004,364,000**	**100**	**540,000**	**1,455,026,900**	**199**	**2,191,500**
Penyelenggaran Paket C Setara SMU	1,180,548,000	100	360,000	941,712,000	100	540,000	1,393,290,000	100	1,666,500
Pelatihan kompetensi pendidik paket C	49,405,000	100	-	62,652,000	100	-	61,736,900	99	525,000
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	677,510,000	100	2,490,000						
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	69,800,000	100	200,000						
Pengadaa Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	599,431,150	92	50,568,850						

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5,143,865,000	98	126,135,000						
Pelatihan Penyusunan Kurikulum	72,684,000	97	2,316,000						
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	91,673,250	99	600,000						
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah	20,000,000	100	-						
Monitoring Evaluasi dan pelaporan	25,859,400	59	17,680,600						
Pengembangan minat bakat dan prestasi	225,621,850	90	24,378,150						
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MAjenjang SMA/SMK/MA Negeri/Swasta	21,298,726,197	100	57,923,803						
			-						
Program Pendidikan Non Formal	**2,844,738,950**	**98**	**64,201,850**	**3,231,445,000**	**99**	**24,900,000**	**1,995,384,600**	**498**	**7,361,500**
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	83,650,000	99	500,000	62,460,000	100	-	61,819,600	99	525,000
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	94,825,000	96	4,000,000	116,880,000	100	-	244,100,000	100	-
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	2,311,579,000	99	19,100,000	2,954,280,000	99	23,400,000	1,597,945,000	100	6,311,500
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	53,321,250	91	5,075,150						
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	0		-						
Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaranpendidikan nonformal	54,200,000	95	3,000,000	69,325,000	100	-	68,797,200	99	525,000
Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non formal	70,133,500	100	-						
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	50,880,000	85	8,880,000	28,500,000	95	1,500,000	22,722,800	100	-

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
Peningkatan pengembangan pendidikan Non formal	56,592,000	71	23,646,700						
Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarkat	69,558,200	100	-						
Program Peningkatan Mutu Pendidi dan Tenaga Kependidikan	**739,864,300**	**100**	**3,641,000**	**465,637,696**	**74**	**160,125,000**	**685,368,800**	**466**	**50,793,885**
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	341,335,300	99	2,170,000	183,512,796	100	-	149,748,000	97	5,228,000
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	50,000,000	100	-				169,460,000	90	18,610,000
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK	99,229,000	99	771,000	172,467,600	98	3,532,400	123,985,000	91	12,205,885
Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan									
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100,000,000	100	-	109,657,300	80	26,592,600	126,449,800	93	9,800,000
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan profesi pendidik	50,000,000	100	-		-	130,000,000	115,726,000	96	4,950,000
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi PTK	99,300,000	99	700,000						
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**1,200,038,000**	**94**	**75,250,000**	**645,022,400**	**77**	**195,767,580**	**799,113,100**	**426**	**164,322,380**
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	49,575,000	100	-	60,268,600	72	23,731,400	42,010,800	87	6,500,000
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	286,650,000	88	39,800,000	449,693,800	75	148,471,180	433,644,600	95	22,655,180
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	0		-				69,257,800	88	9,367,200
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	92,025,000	93	7,350,000	73,935,000	94	4,690,000			-

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN			REALISASI ANGGARAN		
	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA
Penyusunan capaian target SPM bidang pendidikan	96,688,000	99	700,000	61,125,000	76	18,875,000	78,199,900	98	1,800,000
Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	78,300,000	99	700,000				176,000,000	59	124,000,000
Penerapan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah	398,440,000	94	25,060,000						
Kegiatan Expo Pendidikan	198,360,000	99	1,640,000						
Program Peningkatan Kehidupan Keagamaan	**-**		**-**	**397,060,050**	**81**	**95,583,200**	**542,542,200**	**161**	**134,869,100**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga keagamaan	0		-	397,060,050	81	95,583,200	253,891,000	85	46,107,500
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al-Quran Siswa SMP	0		-				288,651,200	76	88,761,600
Progran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	**-**		**-**	**216,508,280,000**	**99**	**2,714,265,962**	**214,038,960,000**	**99**	**1,773,439,189**
Progran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0		-	216,508,280,000	99	2,714,265,962	214,038,960,000	99	1,773,439,189

Tabel T-C. 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan

Kabupaten Cirebon - Tahun 2016 - 2020

LEMBAR III

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
JUMLAH ANGGARAN :	319,839,950,004	94	20,040,606,896	63,637,009,633	20	250,363,993,910	863,006,436,790	588,227,526,153
Program Pelayanan Administrsi Perkantoran	1,736,941,266	97	59,151,634	1,735,658,365	95	91,289,335	13,865,003,200	8,095,586,720
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	326,501,986	85	59,001,614	341,292,665	84	66,459,335	1,780,519,600	1,551,303,520
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan	61,100,000	100	-	59,700,000	100	-	260,500,000	241,592,300
Penyediaan Alat Tulis Kantor	462,548,180	100	20	494,658,600	100	-	2,157,681,700	2,157,681,680
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	237,775,100	100	-	244,491,100	97	8,000,000	1,278,124,200	1,270,032,620
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	62,398,000	100	150,000	68,772,000	100	-	287,836,200	287,686,200
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	190,284,000	100	-	190,284,000	100	-	852,212,000	852,212,000
Penyediaan makanan dan minuman	251,526,000	100	-	268,620,000	98	4,840,000	1,192,675,000	1,187,835,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulati ke Luar Daerah	72,660,000	100	-	67,840,000	85	11,990,000	409,650,000	397,660,000
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	72,148,000	100	-	-		-	5,645,804,500	149,583,400

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**2,876,613,900**		**132,849,600**	**3,323,176,910**		**49,570,390**	**16,507,816,812**	**16,192,419,522**
Pembangunan Gedung Kantor	-	-	50,700,000	417,968,000	98	7,198,000	824,826,000	766,928,000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	182,601,000	99	1,356,000	234,828,000	95	11,922,000	1,343,798,600	1,325,187,700
Sewa tanah/gedung	155,489,800	100	-	155,485,300	100	-	2,095,613,200	2,081,963,800
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1,117,922,100	96	50,336,600	1,121,953,610	98	28,712,390	5,458,766,012	5,335,101,022
Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	830,652,000	100	-	913,600,000	100	-	3,864,832,000	3,860,656,000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	198,000,000	100	-	200,500,000	100	-	1,053,600,000	1,003,350,000
Pemeliharaan rutin / berkala meubeulair						-	72,450,000	72,450,000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	391,949,000	93	30,457,000	278,842,000	99	1,738,000	1,673,931,000	1,627,083,000
Pengadaan komputer dan jaringan							120,000,000	119,700,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**-**		**-**	**-**		**-**	**1,217,062,500**	**1,217,062,500**
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi							7,190,000	7,190,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya							1,209,872,500	1,209,872,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	**435,493,900**		**9,574,400**	**420,958,941**		**11,204,659**	**1,727,216,100**	**1,660,142,891**
Peningkatan Pengelolaan Aset	435,493,900	98	9,574,400	420,958,941	97	11,204,659	1,727,216,100	1,660,142,891
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**57,876,000**		**-**	**44,612,000**		**-**	**304,941,200**	**303,533,200**
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	57,876,000	100	-	44,612,000	100	-	304,941,200	303,533,200
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN SEKTORAL	**68,928,200**		**50,306,200**	**12,187,500**		**5,450,000**	**259,089,900**	**186,828,700**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral Rencana Jangka Menengah (RENJA) dan Rencana Strategus (RENSTRA)	68,928,200	58	50,306,200	12,187,500	69	5,450,000	259,089,900	186,828,700
Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**3,662,350,700**		**3,542,404,248**	**2,434,877,570**		**27,517,330**	**18,440,035,698**	**14,539,964,220**
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	361,607,100	100	1,200,000	394,450,000	100	-	2,210,950,150	2,197,150,150

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
Pembangunan sarana dan prasaran bermain				-		-	400,346,000	398,102,000
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	362,174,900	100	825,000			-	906,676,800	902,711,800
Pengadan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa	335,593,300	99	4,405,000	657,528,375	99	8,770,025	1,886,880,300	1,684,327,775
Pengadaan Mebeleur Sekolah						-	200,000,000	193,172,000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	482,447,800	12	3,506,150,000	77,473,000	98	1,850,000	4,139,120,800	630,920,800
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	416,102,000	99	2,450,000	421,700,000	100	-	1,511,029,150	1,499,084,150
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	55,736,200	100	-	1,692,800	100	-	134,129,600	131,195,100
Pengembangan pendidikan anak usia dini	177,164,800	98	3,600,000	33,776,800	100	-	494,536,850	487,606,850
Penyelenggaraan Anak Usia Dini	386,317,300	99	3,681,800			-	1,879,967,700	1,805,410,000
Pengembangan kurikulum bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	239,999,500	100	-	624,300	100	-	850,810,800	850,410,800
Perencanaan dan Penyusunan Program Anak Usia Dini	206,507,800	99	2,392,448	780,700	100	-	552,758,648	525,241,200
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini				148,352,595	99	1,897,305	199,529,900	194,032,595
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	638,700,000	97	17,700,000	641,400,000	98	15,000,000	3,016,200,000	2,983,500,000
Penyelenggaraan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini				1,909,000	100	-	1,909,000	1,909,000
Apresiasi Lembaga dan Gugus				55,190,000	100	-	55,190,000	55,190,000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	**91,696,875,211**		**4,092,430,689**	**51,708,941,627**		**249,666,531,416**	**536,052,078,043**	**276,128,958,812**
Pembangunan Gedung Sekolah SD	-			251,299,300	100	790,000	2,408,419,700	2,294,592,228
Penambahan Ruang Kelas Sekolah	4,409,620,245	91	443,668,455	3,093,498,116	100	3,655,184	19,684,289,500	19,137,642,967
Penambahan ruang guru sekolah	-					-	1,166,382,500	1,144,812,500
Pembangunan ruang laboratorium dan ruang praktikum sekolah	-				-	4,284,687,800	4,622,896,500	328,508,700
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	-					-	294,582,500	290,717,500

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
Pembangunan Ruang serba Guna/Aula						-	100,000,000	99,763,000
Pembangunan taman, lapangan upacara dan tempat parkir	7,036,399,100	100	20,098,000	4,266,831,300		(4,266,831,300)	21,204,530,100	25,409,336,400
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP	129,263,450	88	17,279,250			-	250,512,700	231,702,450
Pembangunan perpusatakaan sekolah	617,884,600	78	171,965,400	7,969,584,600	97	220,440,000	10,918,424,300	10,516,053,900
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi	1,177,766,600	100	4,630,000	2,346,076,800	100	11,657,900	6,332,216,900	6,309,675,000
Pembelian buku-buku dan alat tulis siswa	6,976,023,285	94	422,873,615	424,759,000	78	117,898,500	22,290,646,184	20,223,956,792
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	3,749,643,300	100	254,800	3,324,297,400	99	28,352,400	19,080,415,234	18,562,668,496
Pengadaan Mebeleur Sekolah	1,373,412,300	57	1,055,182,000	2,354,607,123	100	10,987,177	8,690,561,400	7,571,459,143
Pengadaan perlengkapan sekolah	-					-	14,300,276,000	14,172,910,500
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	33,513,422,600	98	823,955,000	11,249,444,016	100	44,085,484	70,241,630,832	69,086,437,716
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	111,059,800	85	19,287,500	24,888,100	22	86,317,100	803,324,500	696,919,900
Pelatihan penyusunan kurikulum	-					-	1,124,201,100	970,745,000
Pembinaan SMP Terbuka	-					-	200,377,000	122,657,000
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah jenjan SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafiah dan satian pendidikan non islam setara SD dan SMP	5,387,202,400	100	12,745,600	2,340,677,720	1	244,446,859,523	261,838,838,243	16,296,254,120
Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTs	-					-	400,000,000	378,797,000
Penyelenggaraan Paktet B Setara SMP	998,860,400	100	1,136,800	987,196,700	100	-	5,203,540,750	5,200,258,950
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajeman sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan dasar	81,600,000	98	1,400,000	83,000,000	100	-	407,000,000	357,160,000
Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa	280,111,800	70	118,577,400	127,856,900	36	230,282,300	2,640,733,600	1,825,894,700
Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	291,735,900	98	4,864,100	86,660,000	100	-	683,260,000	656,531,900

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
Penyediaan bea siswa transisi	193,221,500	94	11,926,200	19,233,365	97	543,235	1,730,044,300	1,040,606,365
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	149,661,600	100	-	137,489,000	97	4,800,000	1,011,384,800	1,005,576,800
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	193,038,250	98	4,356,550	127,413,510	100	531,290	1,228,156,600	1,194,898,760
Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS dan Guru Bantu Daerah Terpencil	2,952,000,000	99	34,032,000	1,478,901,320	97	53,117,180	6,827,538,500	6,723,301,320
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik paket B setara SMP	139,532,200	94	8,400,000	100,000,000	100	-	421,364,400	412,439,400
Bimbingan Teknis Penataan Penilaian Angka Kredit Fungsional	171,824,300	96	7,152,600	175,841,732	97	4,741,668	495,865,100	482,350,832
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP				38,466,730		(38,466,730)	39,553,200	38,466,730
Penambahan Ruang Kelas Sekolah SMP	4,162,775,843	92	353,908,357	1,877,851,200	100	-	8,973,301,900	8,601,156,543
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Lapangan Parkir SMP	826,978,400	100	3,015,000	385,579,600	96	14,420,400	2,326,393,400	2,304,216,000
Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP				1,124,981,200	100	-	1,124,981,200	1,124,981,200
Pengadaan Buku-Buku Alat Tulis Siswa SMP	631,278,338	70	269,651,662	343,818,730	78	99,334,470	1,762,283,200	1,306,748,068
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	3,940,416,200	99	24,838,400	1,770,177,400	99	17,927,200	8,253,359,200	8,125,048,600
Pengadaan Mebeleur Sekolah SMP	24,500,000	98	500,000	-		-	225,000,000	210,948,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP	8,967,018,200	99	48,115,000	3,664,700,600	99	26,529,400	13,767,096,700	13,687,426,300
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	231,278,200	99	2,345,000	19,233,365	97	543,235	709,483,800	326,927,565
Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	120,110,000	78	33,622,500	-		-	304,470,500	266,528,267
Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SMP/MTs/SMPLB serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan non Islam setara SMP	2,510,418,400	100	-	1,480,800,000	100	-	6,692,719,400	6,685,519,400
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP	348,818,000	67	172,649,500	33,776,800	1	4,263,328,000	5,272,022,300	706,362,800
Program Pendidikan Menengah	**1,137,469,200**		**10,443,600**	**1,903,711,830**		**294,507,970**	**35,546,031,250**	**34,955,695,777**
Penyelenggaran Paket C Setara SMU	997,946,400	100	2,043,600	1,804,377,030	86	294,507,970	6,616,991,500	6,317,873,430

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
Pelatihan kompetensi pendidik paket C	139,522,800	94	8,400,000	99,334,800	100	-	421,576,500	412,651,500
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir				-	-	-	680,000,000	677,510,000
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary						-	70,000,000	69,800,000
Pengadaa Buku-buku dan Alat Tulis Siswa				-		-	650,000,000	599,431,150
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa				-		-	5,270,000,000	5,143,865,000
Pelatihan Penyusunan Kurikulum				-		-	75,000,000	72,684,000
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah				-		-	92,273,250	91,673,250
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah				-		-	20,000,000	20,000,000
Monitoring Evaluasi dan pelaporan				-		-	43,540,000	25,859,400
Pengembangan minat bakat dan prestasi				-		-	250,000,000	225,621,850
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MAjenjang SMA/SMK/MA Negeri/Swasta						-	21,356,650,000	21,298,726,197
						-	-	-
Program Pendidikan Non Formal	**2,485,725,550**		**20,046,850**	**984,801,465**		**5,174,835**	**11,663,780,600**	**11,542,095,565**
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	139,558,600	94	8,400,000	99,513,100	100	-	456,426,300	447,001,300
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	147,950,900	100	-	-		-	607,755,900	603,755,900
Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	1,705,411,500	100	2,043,600	785,288,365	99	5,174,835	9,410,533,800	9,354,503,865
Pengembangan pendidikan kecakapan hidup				-		-	58,396,400	53,321,250
Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal	199,598,700	100	400,000	-		-	199,998,700	199,598,700
Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaranpendidikan nonformal	146,015,000	95	8,400,000	100,000,000	100	-	450,262,200	438,337,200
Publikasi dan sosialisasi pendidikan Non formal				-		-	70,133,500	70,133,500
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	147,190,850	99	803,250	-	-	-	260,476,900	249,293,650
Peningkatan pengembangan pendidikan Non formal						-	80,238,700	56,592,000

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah Berbasis Masyarkat						-	69,558,200	69,558,200
Program Peningkatan Mutu Pendidi dan Tenaga Kependidikan	**547,705,200**		**88,608,900**	**284,069,700**		**69,205,300**	**3,095,019,781**	**2,722,645,696**
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	22,572,500	97	700,000	-	-	-	705,266,596	697,168,596
Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi	165,502,600	95	9,510,000	-	-	-	413,082,600	384,962,600
Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi PTK	145,001,600	93	10,950,000	71,228,700	52	65,405,200	704,776,385	611,911,900
Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan				212,841,000	98	3,800,100	216,641,100	212,841,000
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	128,262,100	85	22,085,000	-	-	-	522,846,800	464,369,200
Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan profesi pendidik	86,366,400	66	45,363,900	-	-	-	432,406,300	252,092,400
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi PTK				-		-	100,000,000	99,300,000
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**1,041,183,075**		**299,108,145**	**784,013,725**		**143,542,675**	**5,347,361,080**	**4,469,370,300**
Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	84,915,500	57	62,795,000	175,875,000	77	52,421,800	558,093,100	412,644,900
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan	306,774,800	64	174,811,120	354,580,625	83	70,420,875	2,287,502,180	1,831,343,825
Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan loka karya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	-			-		-	78,625,000	69,257,800
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	64,855,400	66	33,135,100	-	-	-	275,990,500	230,815,400
Penyusunan capaian target SPM bidang pendidikan	126,441,300	93	9,643,000	77,558,100	82	16,700,000	487,730,300	440,012,300
Fasilitasi Pelayanan Pendidikan	458,196,075	96	18,723,925	176,000,000	98	4,000,000	1,035,920,000	888,496,075

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019			REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020			RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	REALISASI	%	SISA	REALISASI	%	SISA	ANGGARAN	REALISASI
Penerapan sistem informasi manajemen sarana dan prasarana sekolah				-		-	423,500,000	398,440,000
Kegiatan Expo Pendidikan				-		-	200,000,000	198,360,000
Program Peningkatan Kehidupan Keagamaan	**-**		**293,473,500**	**-**		**-**	**1,463,528,050**	**939,602,250**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga keagamaan	-	-	293,473,500	-		-	1,086,115,250	650,951,050
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan untuk Baca Tulis Al-Quran Siswa SMP				-		-	377,412,800	288,651,200
Progran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	**214,092,787,802**		**11,442,209,130**	**-**		**-**	**217,517,472,576**	**215,273,620,000**
Progran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	214,092,787,802	95	11,442,209,130			-	660,569,942,083	644,640,027,802

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan

Pembangunan pendidikan harus dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu antar instansi pemerintah mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, serta antara pemerintah, masyarakat, dan orangtua. Untuk itu perlu dikembangkan iklim pembangunan pendidikan yang memungkinkan bagi setiap komponen pemerintahan maupun masyarakat untuk bisa secara bersama-sama membahas pendidikan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing.

Terkait dengan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pendidikan memerlukan hasil analisis SWOT berkenaan dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Tingkat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Analisa SWOT ini melibatkan kondisi eksternal serta kondisi internal baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelayanan Dinas Pendidikan.

Masalah-masalah teknis non-kependidikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan pendidikan antara lain komunikasi, transportasi, sosial budaya, dan sosial ekonomi. Penanganannya perlu dilakukan secara lintas sektoral, agar pemerataan pendidikan dan pemberian pelayanan pendidikan minimal bagi masyarakat bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD- SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran	▪ Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan ▪ Aksessibilitas sekolah	▪ Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua dan Aparatur Institusi Pendidikan ▪ Peningkatan Akses	Wajib Pelayanan Dasar	**Jangka Panjang:** ▪ Penguatan Pelaku Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan ▪ Peningkatan

yang relevan dan efektif. 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas. 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua. 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.	▪ Kapasitas mutu pendidikan ▪ Efisiensi biaya pendidikan	PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus ▪ Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter ▪ Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan		profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan **Jangka Menengah:** ▪ Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat ▪ Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) **Jangka Pendek:** ▪ Peningkatan partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan ▪ Peningkatan kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial ▪ Peningkatan perilaku positif siswa ▪ Pemanfaatan Anggaran Pendidikan Efektif dan Efisien ▪ Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam perumusan strategi pembangunan Kabupaten Cirebon adalah:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;

3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk yang cerita atau skenario strategi.

Rumusan perubahan strategi Kabupaten Cirebon untuk periode pembangunan 2019-2024 berjumlah 21 (dua puluh satu) strategi, secara terperinci arah kebijakan Kabupaten Cirebon berdasarkan strategi yang telah disusun antara lain terkait dengan kebijakan pembangunan pendidikan sebagai berikut:

Strategi 1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan pendidikan berbasis TIK hingga ke pelosok, arah kebijakan :
- Perluasan jaminan akses dan fasilitas pendidikan hingga ke pelosok
- Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online
- Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online

Strategi 2. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, arah kebijakan :
- Penguatan dan pembaharuan kebijakan pelayanan publik
- Peningkatan pelayanan publik yang integratif

Strategi 3. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pengawasan, arah kebijakan :
- Penguatan kebijakan penerapan SAKIP
- Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (e-performance based budgeting)
- Perluasan pembangunan zona integritas pada sektor-sektor strategis
- Peningkatan kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD

Strategi 4. Penguatan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan berorientasi pada pencapaian smart governance, arah kebijakan :

- Peningkatan dukungan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
- Peningkatan kualitas jaringan dan pengelolaan data yang handal dan aman
- Untuk memudahkan integrasi prinsip dan kriteria kepentingan lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, prinsip dan kriteria tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk indikator-indikator yang akan digunakan sebagai tolak ukur. Kegiatan KLHS penyusunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 diakhiri dengan kegiatan *Penyampaian Hasil Rekomendasi* KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

- **1. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Cirebon 2019 - 2024**
  - Isu strategis KLHS RPJMD berupa isu : degradasi lahan sungai, dan lautan; pencemaran air, tanah, udara; kelangkaan sumber air baku; kerusakan daerah muara dan pesisir; kurangnya pengawasan tata ruang wilayah, pariwisata kurang berkembang; adanya daerah rawan banjir; longsor dan kebakaran; terbatasnya kemampuan pengelolaan sumber daya alam; perbedaan kondisi demografis; kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna; kualitas pelayanan kesehatan; **kualitas pelayanan pendidikan**; permasalahan pemukiman rakyat; dan kesetaraan gender.

Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

Tujuan	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera	1. Program Pendidikan Non Formal 2. Program Pendidikan Anak Usia Dini 3. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	**Jangka Panjang:** ▪ Penguatan Pelaku Pendidikan pada Semua Jenjang Pendidikan ▪ Peningkatan profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan **Jangka Menengah:** ▪ Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat 1. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)	1. Memperluas jaminan akses dan fasilitasi pendidikan dasar 2. meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan yang inklusif 3. Melakukan Penguatan pendidikan karakter berbasis keluarga 4. Meningkatkan Kualitas SDM bidang pendidikan

▪ 2. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Cirebon 2019 - 2024

- Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah RPJMD yang sedang disusun terhadap Pembangunan Berkelanjutan seyogyanya melingkupi Prinsip Keterkaitan, Keseimbangan, dan Keadilan.

Salah satu komponen IPM adalah Indek Pendidikan, sedangkan RLS dan HLS merupakan indikator dalam pencapaian indek pendidikan. Untuk meningkatkan Indek Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan kewenangan lintas sektoral. Dengan demikian perlu adanya data yang lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan perencanaan tentang jumlah penduduk usia sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana, karena semua itu saling terkait dalam meningkatkan RLS dan HLS sehingga pada gilirannya dapat mendongkrak IPM sesuai target yang ditetapkan.

1. Peluang *(Opportunity)*

Peluang *(Opportunity)* yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut memiliki dampak terhadap peningkatan daya serap pendidikan. Bidang Pendidikan masuk kedalam salah satu prioritas pembangunan, implikasinya bahwa pendidikan menjadi salah satu program yang bersifat strategis baik ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan secara Nasional.
2) Seiring dengan meningkatnya kelompok usia sekolah maka meningkat pula lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola secara mandiri oleh Yayasan Pendidikan.
3) Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi memberikan dampak terhadap efektivitas dan efisien dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran baik melalui riset model pembelajaran maupun pengenalan teknologi dalam pembelajaran.

2. Ancaman (*Threat*)

Ancaman *(Threat)* yang dimiliki yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon diantaranya:

1) Semakin meningkatnya usia penduduk sekolah maka perlu diimbangi dengan infrastruktur sebagai salah satu upaya meningkatkan daya serap pendidikan.
2) Semakin meningkatnya layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan maka perlu ditingkatkan kualitas dalam pengelolaan pendidikan.
3) Rendahnya jati diri (budaya lokal) diakibatkan sikap pragmatis terhadap budaya asing yang masuk melalui arus globalisasi

dimoderasi oleh teknologi.

4) Banyaknya kelompok usia sekolah lebih memilih untuk menikah atau bekerja dibawah umur dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

5) Hambatan aksesbilitas pendidikan yang diakibatkan oleh persoalan himpitan ekonomi keluarga.

6) Rendahnya sinkronisasi pembangunan pendidikan yang direncanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan yakni Pemerintah daerah setempat.

7) Belum adanya peraturan/ payung hukum terkait dengan *mandatory list*, hal tersebut memiliki risiko akan semua program yang direncanakan tidak memiliki keberlanjutan.

Keterkaitan antara tantangan dan peluang maka dapat disimpulkan bahwa tantangan yang harus disikapi dalam pembangunan bidang pendidikan berkenaan dengan *Pelayanan pendidikan aksesbilitas, Peningkatan kualitas mutu pendidikan serta Tata kelola pendidikan hal ini selaras dengan antara Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.* Sehingga kedepan fokus pengembengan layanan pendidikan berfokus pada ketiga hal tersebut diimbagi dengan kondisi faktor eksternal yang mempengaruhi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Pendidikan

Pendidikan menjadi penentu kemajuan daerah. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Permasalahan dan tantangan yang terjadi pada pencapaian pembangunan Pendidikan 2014-2019 tentunya menjadi antisipasi bagi pelaksanaan pembangunan pada tahapan lima tahun berikutnya yaitu tahun 2019-2024. Beberapa tantangan pembangunan Pendidikan yang dihadapi ke depan adalah:

(1) Belum meratanya akses Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu Pendidikan;(3) Belum optimalnya tata kelola Pendidikan; (4) Masih rendahnya minat baca masyarakat. Keempat permasalahan di atas ditandai hal-hal sebagai berikut:

- Belum meratanya distribusi guru PNS
- Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi
- Nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah
- Belum sinergisnya pembagian tata kelola Pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait kewenangan.
- Rendahnya partisipasi Pendidikan di tingkat Pendidikan menenga

Rendahnya minat baca masyarakat,

- Masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek- aspek perpustakaan lainnya

- Belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi maupun melalui program perpustakaan keliling
- Belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah, untuk bekerja sama dengan komunitas literasi. Seperti forum perpustakan desa/kelurahan atau, forum perpustakaan taman bacaan masyarakat.

Dengan beberapa permasalahan yang ada, maka berakibat pada Indek Angka Rata-rata Pendidikan masyarakat masih rendah. Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 baru pada kisaran 6,92 tahun, ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melanjutkan sekolah masih rendah terutama pada jenjang pendidikan dasar (SMP/MTs) ke jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Dengan demikian wajib belajar pendidikan dasar masih belum tuntas. Selain itu, angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Cirebon masih sangat rendah pada tahun 2020 baru mencapai 12,57 Tahun.

Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebesar 12,57 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,57 tahun atau setara dengan Diploma I.

Permasalahan yang dihadapi

Semakain hari permasalahan pendidikan bukannya semakin berkurang, justru permasalahan ini semakin kompleks seiring dengan tuntutan globalisasi segala penjuru kehidupan dimana filter tidak lagi dapat membendung sisi negatif dari seluruh interaksi setiap individu. Secara garis besar permasalahan pendidikan setidaknya dapat diklasifikasikan kedalam 3 pokok masalah sebagaimana uraian dibawah ini.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 – 2024

No.	Masalah Pokok	Perasalahan	Akar masalah
1	2	3	4
1	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.	1 Aksesbilitas Pendidikan belum merata	1 Masih kekurangan Ruang Kelas pada Sekolah Negeri terlebih untuk jenjang SMP
			2 Kemampuan daya siswa yang masih terbatas
			3 Masih ada animo masyarakat harus bersekolah di sekolah Negeri atau Sekolah yang Tekenal (Favorit)
			4 Belum diterapkannya Sistem zonasi pada jenjang Sekolah Dasar
		2 Kompotensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah	1 Guru PNS masih kurang pada Sekolah Negeri
			2 Masih banyak guru yang belum bersetifikat pendidik sesuai profesinya
			3 Kurangnya pengawasan terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berdampak reward atau funishment
			4 Kurang maksimalnya fungsi peran komunitas belajar (KKG/MGMP, KKKSD/MKKSSMP))
			5 Masih banyaknya guru yang belum linear dalam mengampu pembelajaran.
			6 Tingkat kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan masih rendah terutama Honorer (Non ASN)
			7 Belum efektifnya Penilaian Kinerja Guru (PKG) atau Kepala Sekolah (PKKS)
			8 Belum berjalannya sistem Penilaian Prestasi Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan menjadi Capaian SKP tahunan PNS Khususnya.
		3 Mutu dan jumlah sarana prasarana pendidikan belum mamadai	1 Kondisi ruang kelas masih banyak yang rusak
			2 Alat praktik dan peraga pembelajaran banyak yang rusak
			3 Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum memiliki sarana utama penunjang pembelajaran (Labora-Torium dan Perpustakaan)

No.	Masalah Pokok	Perasalahan	Akar masalah
			4 Standar harga sarana penunjang KBM tinggi
			5 Masih banyaknya sekolah yang belum menyediakan fsilitas fisik ramah anak/murid
		4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah	1 Masih banyak siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
			2 Tingkat pendidikan orang tua masih rendah dan pengaruh lingkungaan dalam pergaulan anak
			3 Jumlah sekolah yang menerapkan program sekolah inklusi untuk melayani anak yang berkebutuhan khusus sangat kurang
			4 Masih belum maksimalnya pemberdayaan MBS dalam pengelolaan sekolah
			5 Belum maksimalnya pelibatan pemangku kepentingan dalam perumusan program kerja sekolah (RKS/RKAS)
			6 Masih banyaknya sekolah dalam manajemen RKS (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta tindaklanjut) belum sistemik (siklus standar mutu)

3.1.1 Aksesibilitas pendidikan belum merata

a) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan daya belinya masih rendah.

b) Masih adanya kendala budaya dan/atau tradisi di dimasyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan;

c) Belum semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus;

d) Masih terdapat perusahaan/ Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) tidak mensyaratkan ijazas sebagai syarat diterimanya bekerja;

3.1.2 Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah

a) Kurang meratanya tingkat profesionalisme guru dalam strategi pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan.

b) Kolaborasi dalam pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru belum berkembang dengan baik sebagai bagian dari dinamika budaya kerja;

c) Belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya secara kompetitif untuk guru;

3.1.3 Mutu dan Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan belum memadai

a) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah;
b) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
c) Terdapat kesenjangan fasilitas sarana penunjang pembelajaran, seperti perpustakaan, laboratorium serta media pembelajaran lainnya belum merata pada seluruh sekolah;
d) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
e) Internet sebagai sumber belajar belum optimal diberdayakan dengan baik;

3.1.4 Tata Kelola Pendidikan masih rendah

a) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
b) Belum tersedia data pendidikan yang akurat disebabkan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan;
c) Belum optimumnya Kegiatan kelompok kerja kepala sekolah., kelompok kerja guru/MGMP dan supervisi kinerja guru;
d) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategis dan program tahunan pada tingkat sekolah belum berkembang baik;
e) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah;
f) Belum optimumnya fungsi Komite Sekolah dan Dewan Sekolah untuk meningkatan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN" dan **Misi** :

1. Kabupaten Cirebon Berbudaya "Mewujudkan Masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat
2. Kabupaten Cirebon Sejahtera "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon Agamis "Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika"
4. Kabupaten Cirebon Maju "Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah"
5. Kabupaten Cirebon Maju "Memelihara keamanan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional"

dalam pembangunan Kabupaten Cirebon perlu diterjemahkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan yang spesifik. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent.* Kebijakan umum tersebut diantaranya yang tertera pada misi ke **1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.**

3.3. Talaahan Rencana Strategis

Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dalam lima tahun kedepan visi Gubernur Jawa Barat yakni **"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi "**. Makna dari Visi tersebut adalah Jabar Juara Lahir Batin bahwa pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi adalah bahwa Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan Inovasi untuk meningkatkan pelayanan Publik, kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan makna Kolaborasi adalah perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Untuk mewujudkan Jabar Juara maka dilakukan beberapa misi, salah satunya aspek misi dalam ruang lingkup pendidikan. Misi tersebut "**Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif"**. Misi ini diarahkan menghadirkan pelayanan publik berkualitas hingga ujung batas wilayah. Agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati Pendidikan dan kesehatan. Perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya untuk dapat berperan aktif mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari misi tersebut melahirkan beberapa program sebagai upaya mewujudkan visi dan misi tersebut yakni Menghadirkan Sekolah Jabar yaitu Inovasi Layanan Pendidikan Menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas- luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses Layanan Pendidikan. Tanpa terhalang faktor ekonomi, geografis, sosial, budaya atau faktor lainnya. Melalui layanan Pendidikan yang ramah, murah, mudah, bermutu, berdaya

saing, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

3.3.1. Analisis lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang berpengaruh terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimana di dalamnya mencakup (1) sumberdaya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Kekuatan

a). Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon secara efisien dan efektif sehingga dapat berkompetisi di kancah global, hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya beberapa prestasi kejuaraan baik di dalam penguasaan mata peiajaran, seni budaya maupun prestasi olahraga di tingkat Propinsi maupun Nasional.

b) Adanya kesepakatan dari seluruh jajaran pendidikan untuk mendukung visi Kabupaten Cirebon dalam misi 1 "**Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi"**. Implementasi hal tersebut tercermin dalam program dan kegiatan yang selama ini digulirkan serta anggaran pendidikan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

c) Tersedianya sumberdaya aparatur pendidik dan kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan, hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan yang siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan di era globalisasi sekarang ini.

d) Tersedianya sarana dan prasarana yang siap untuk dikembangkan guna menghadapi tantangan perkembangan IPTEK dan dunia global, hal ini dapat dilihat dari aset yang dimiliki baik berupa gedung perkantoran, gedung persekolahan, mesin-mesin, perbengkelan, ketersediaan lahan yang senantiasa siap untuk dibangun dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
e) Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan bahkan sampai pada tingkat Sekolah dan masyarakat Siap melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mulai dari perumusan, pengambilan kebijakan sampai kepada penyelenggaraan teknis pembelajaran.

Kelemahan

a) Belum terbangunnya koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan antar lini, unit dan institusi pendidikan di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Hal ini disebabkan antara lain masih adanya ego sektoral serta bervariasinya kemampuan SDM aparatur maupun kemampuan daya beli masyarakat yang seringkali menjadi kendala di dalam pembangunan di bidang pendidikan.
b) Belum seragamnya pemahaman aparatur terhadap tugas dan fungsinya sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas kedinasan dan memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya penyimpangan terhadap komitmen yang disepakati sehingga menjadi kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan.
c) Belum efektifnya rentang kendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, hal ini disebabkan karena : (a) Penegakkan hukum tidak/kurang tegas; (b) besarnya populasi persekolahan yang harus diawasi; (c) kurangnya keterlibatan aparatur pendidikan yang ada di lapangan dalam

melaksanakan pengawasan; dan (d) kurangnya dukungan dana dan fasilitas operasional.

d) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena: (a) besarnya populasi persekolahan yang tersebar sampai di pelosok desa; (b) kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan; (c) belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi dari tingkat Kabupaten sampai ke sekolah-sekolah sebagai sumber data primer; dan (d) kurangnya dukungan dana operasional dan teknologi sehingga mengakibatkan perencanaan menjadi tidak matang dan pengawasan tidak efektif.

3.3.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan.

Peluang

a) Media massa elektronik maupun cetak yang berskala lokal, regional maupun nasional banyak terdapat di Kabupaten Cirebon, hal ini perlu dijadikan peluang yang efektif bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan kebijakan dan program-program kepada masyarakat secara luas. Untuk itu keberadaan media ini perlu dimanfaatkan dengan baik dan efektif melalui jalinan kerjasama yang saling menguntungkan.

b) Adanya kepedulian masyarakat, pengusaha terhadap pendidikan dan adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pembangunan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat (stakeholders) menyambut penerapan inovasi-inovasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang difasilitasi melalui implementasi Manajemen Berbasis Sekoiah (MBS), Badan Akreditasi Sekoiah (BAS), *Broad Based Education (BBE) and Life Skill* serta gerakan-gerakan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan mulai dari pembentukan Persatuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), kemudian menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), Dewan Pendidikan (DP)/ Dewan Sekoiah, sampai kepada Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP).

c) Posisi geografis Kabupaten Cirebon yang merupakan lintasan antar propinsi-propinsi di Indonesia memiliki nilai strategis untuk menjadi pintu gerbang dan cermin pendidikan bukan hanya pada skala propinsi tapi juga pada skala Nasional. Hai ini menjadi peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan pembangunan pendidikan secara akseleratif dan berkesinambungan.

Tantangan

a) Kabupaten Cirebon sebagai tempat tujuan untuk mencari kerja/nafkah Seiring pertumbuhan dunia industri mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini menjadi tugas berat jajaran pendidikan di Kabupaten Cirebon guna menuntaskan program-program pendidikan, khususnya Rintisan Wajar 12 Tahun karena semakin besarnya populasi penduduk yang harus dilayani.

b) Geografis Kabupaten Cirebon yang cukup luas dan masih terdapat beberapa daerah terpencil. Hal ini telah menyebabkan tidak meratanya penyebaran pelayanan pendidikan sehingga menjadi tantangan berat di dalam melakukan inovasi dan akselerasi pendidikan.

c) Kendala budaya tradisional dan pengaruh negatif budaya luar menimbulkan permasalahan yang kompleks di dalam melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon, hal ini menuntut penanganan tersendiri melalui pendekatan-pendekatan khusus agar pembangunan pendidikan bisa berjalan secara sinergis dan serentak. Dalam posisi pendidikan yang merupakan kebutuhan dan perhatian semua orang, menjadi primadona dalam pencapaian IPM 80 serta dibebani dampak reformasi yang kebablasan, mengakibatkan banyak pihak berkeinginan dan memaksakan diri untuk ikut campur mengawasi pelaksanaan pembangunan pendidikan tanpa mau mengerti permasalahan internal kelembagaan. Hal ini menjadi beban berat bagi jajaran pendidikan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan secara efisien dan efektif karena terlalu banyak campur tangan pihak luar terhadap pengelolaan pendidikan. Hal ini berdampak besar terhadap aspek psikologis para aparatur di dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan interlan mencaup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi umumnya dapat dikenadalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi tetapi mempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisi lingkungan Strategis digunakan teknis analisis SWOT (Strength, Weakneess, Opportunity, dan Thereat) dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Cirebon memiliki beberapa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. Setiap PKL dan PKLp mempunyai peran dan fungsi berbeda. Adapun peran dan fungsi masing-masing PKL dan PKLp sebagai berikut:

PKL Ciledug dan PKLp Losari dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perikanan laut, perdagangan hasil pertanian, industri, pergudangan, pelabuhan, pelayanan sosial ekonomi, perumahan, pendidikan tinggi, perdagangan hasil pertambangan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Ciledug meliputi Kecamatan Losari (PKLp); Pabedilan; Pabuaran; Waled; Babakan; Gebang; dan Pasaleman

PKL Lemahabang dan PKLp Astanajapura dengan fungsi utama sebagai industri manufaktur. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan industri, pertanian, perikanan laut, perumahan, pelayanan sosial, pariwisata, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pendidikan kejuruan, industri hasil hutan dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Lemahabang meliputi Astanajapura (PKLp); Mundu; Pangenan; Sedong; Susukanlebak; Karangsembung; dan Karangwareng

PKL Sumber dan PKLp Weru dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, fungsi penunjang PKN, pendidikan tinggi, pertanian, pariwisata, industri, perikanan

budidaya, pertambangan, dan pelayanan sosial ekonomi; Wilayah Pelayanan PKL Sumber meliputi Kecamatan Weru (PKLp); Beber; Greged; Plered; Tengahtani; Talun; Kedawung; dan Gunungjati.

PKL Palimanan dan PKLp Plumbon dengan fungsi utama sebagai sentra industry. Fungsi penunjangnya sebagai kawasan perumahan, pariwisata sejarah, agro wisata, industri batu alam, pertambangan, perdagangan hasil pertambangan, pertanian, perikanan budidaya, pelayanan sosial, pendidikan kejuruan, dan fungsi penunjang PKN; Wilayah pelayanan PKL Palimanan meliputi Kecamatan Plumbon (PKLp); Klangenan; Jamblang; Depok; Dukupuntang; dan Gempol.

PKL Arjawinangun dan PKLp Kapetakan dengan fungsi utama sebagai kawasan pertanian tanaman pangan. Fungsi penunjangnya adalah perikanan tangkap dan budidaya, perumahan, agro wisata, industri, pendidikan tinggi, pelayanan sosial.

ANALISIS

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada diluar kendali organisasi tetapi rnempengaruhi organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis tersebut digunakan teknis analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat)* dengan sudut pandang organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Setelah berakhirnya periode Rencana Strategis Bidang Pendidikan dengan fokus penguatan layanan pendidikan, pada tahapan selanjutnya yakni periode 2019-2024, fokus pembangunan pendidikan pada layanan pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik, pendidik, sarana prasarana serta tatakelola pendidikan jenjang

pendidikan pra sekolah, SD dan SMP serta pendidikan non formal. Untuk menentukan langkah penanganan pembangunan pendidikan perlu adanya identifikasi isu strategis yang tepat dan menggambarkan kondisi pendidikan di Kabupaten Cirebon. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

3.5.1. Melek huruf latin dan Al-Qur'an

Tingkat buta huruf Alquran di Indonesia terbilang tinggi. Hasil riset dari Institut Ilmu Alquran (IIQ) akhir pekan lalu mencatat sekitar 65 persen masyarakat Indonesia buta huruf Alquran. Begitu pula di Kabupaten Cirebon meski jumlah Pesantren tidak sedikit namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat melek huruf Al-Qur'an (Huruf arab) masih rendah.

Isu Strategis ini harus menjadi perhatian bagi semua kalangan. Sungguh sangat mengejutkan dan perlu dibahas dalam penyusunan program khususnya institusi terkait serta masyarakat pada umumnya melalui pendidikan informal (didalam), formal (di sekolah) maupun non formal (Pendidikan oleh masyarakat). Peran aktif masyarakat sangat diperlukan seperti melalui Dewan masjid dan lain-lain. Salah satu cara untuk meningkatkan tingkat melek Alquran Kabupaten Cirebon adalah pencanangan program Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji (Gemar Mengaji). Program tersebut terinspirasi dari budaya sebagian besar masyarakat Muslim tempo dulu, yang kerap melakukan amalan tadarus Al Qur'an tiap ba'da shalat Maghrib.

Kemiskinan dan kebodohan ibarat lingkaran setan yang tak berujung pangkal. Beruntung di Kabupaten Cirebon hanya sekitar 10% masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Namun demikian bukan berarti berbanding lurus dengan tingkat melek huruf latin. Masih ada sebagian pendududuk yang masih belum melek huruf dikarenakan himpitan ekonomi memaksa mereka lebih

mementingkanusaha pemenuhan kebutuhan hidup daripada peningkatan sumberdaya manusia.

Selain itu sebagian besar dari mereka sudah termasuk usia lansia sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran disamping mereka menganggap bahwa melek huruf tidak merupakan kebutuhan inti untuk menjalani kehidupannya.

3.5.2. Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Menjadi seorang guru tidaklah mudah. Tidak semua orang bisa menjadi guru, karena guru saat ini haruslah memiliki standar kompetensi yang dapat menjadikan dunia pendidikan lebih bermutu dan berkualitas. Belum semua guru memiliki seluruh standar kompetensi. Hal ini akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan dan jika kondisi ini tetap berlangsung maka kondisi mutu pendidikan lama kelamaan akan menjadi terpuruk. Standar kompetensi dimaksud adalah:

- **Kompetensi Pedagogik** merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Adapun kompetensi pedagogik meliputi: Mengenal anak didiknya, menguasai teori-teori tentang pendidikan, bahan pelajaran, macam-macam teknik dan metode pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) serta mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran

- **Kompetensi Kepribadian** ialah kemampuan individu atau personal yang mencerminkan kepribadian yang stabil, bijaksana, dewasa, berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya serta memiliki akhlak yang mulia. Kompetensi kepribadian ini berkemampuan dalam mengaktualisasikan diri sebagai pendidik yang

disiplin, jujur, berwawasan luas, bertanggung jawab dan dapat menjadi sumber inspirasi posirif bagi para peserta didiknya.

- **Kompetensi Sosial** ialah kemampuan guru dalam melakukan komunikasi baik lisan, tulisan maupun perbuatan kepada peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan, wali murid, maupun masyarakat sekitar dengan cara yang efektif, ramah atau santun dan sesuai dengan adat dan norma yang berlaku. Selain itu, dalam kompetensi sosial ini, guru mampu bekerjasama dan beradaptasi dengan keanekaragaman suku dan budaya di tempat melaksanakannya tugas.

- **Kompetensi Profesional** merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembalajaran secara mendalam dan luas. Tidak hanya penguasaan materi pelajaran saja, namun juga penguasaan terhadap materi-materi kurikulum yang berlaku, konsep dan struktur keilmuan, masalah-masalah pendidikan dan wawasan yang memadai terhadap materi-materi yang bersangkutan.

3.5.3. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Cirebon masih belum terpenuhi atau belum memenuhi SPM Pendidikan. Selain itu kondisinya sudah banyak yang rusak dimakan usia dan diperparah dengan pendistribusiannya yang belum merata.

Mestinya salah satu aspek yang seharusnya mendapat perhatian utama oleh setiap pengelola pendidikan adalah mengenai fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, seperti: Gedung, ruangan belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan fasilitas/prasarana adalah yang secara tidak

langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun atau taman sekolah, maupun jalan menuju ke sekolah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, bahwa kualitas pendidikan tersebut juga di dukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Misalnya saja sekolah yang berada di kota yang sudah memiliki faslitas laboratorium komputer, maka anak didiknya secara langsung dapat belajar komputer sedangkan sekolah yang berada di desa tidak memiliki fasilitas itu dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan komputer kecuali mereka mengambil kursus di luar sekolah.

3.5.4. Manajeman Pengelolaan Pendidikan

Tidak ada perbuatan yang sempurna, begitupun tidak ada perbuatan positif yang sia-sia. Sama halnya dengan upaya peningkatan tatakelola pendidikan di Kabupaten Cirebon, meski terus menerus diadakan perbaikan namun kekurangan masih tetap ada baik penyebabnya dari internal maupun eksternal. Dana pendidikan misalnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditetapkan 20% namun Pemerintah Kabupaten belum mampu merealisasikannya. Ada yang beranggapan bahwa sekolah dijadikan ladang bisnis dan sebagainaya.

Penerapan tata kelola yang baik membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan, diantaranya:

1. Mampu memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah, yaitu masyarakat, agar ikut berperan optimal sehingga tercipta sinergi antara lembaga pendidikan dengan stakeholdernya.

2. Penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan nilai-nilai, seperti nilai keadilan, efisiensi, dan daya tanggap, yang mendorong lembaga pendidikan maupun Pemerintah lebih efektif dalam bekerja tanpa mengabaikan orientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan.
3. Tata kelola kepemerintahan yang baik memberikan kondisi bersih dari korupsi yang berorientasi pada kepentingan publik, bukan sekelompok orang atau golongan.

Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik, diperlukan adanya:

1. Komitmen yang kuat baik dari pihak-pihak di dalam lembaga pendidikan tersebut maupun pihak-pihak di luar lembaga pendidikan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral tinggi.
3. Pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata yang berakar pada penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab.

Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan pendidikan dapat membangun sebuah sistem anti korupsi dalam institusi pendidikan yang akan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini.

BAB IV.
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya ingin meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat. Melalui misinya yaitu ”*Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi*”

Tujuan Rencana Jangka Menengah dalam Pembangunan Pendidikan (2019- 2024) tidak terlepas dari persolan pokok dalam pendidikan yakni (1) menjadikan semua anak bisa sekolah dan unggul dengan upaya 1) meningkatan aksesibilitas melalui daya tampung satuan pendidikan, 2) peningkatan mutu pendidikan dengan pemberdayaan sekolah, 3) pengelolaan tata kelola pendidikan yang baik di sekolah dan dinas pendidikan.

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

upaya yang dilakukan :

4.1.1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peserta didik

Meningkatkan kuantitas peserta didik adalah upaya secara terus menerus yang dilakukan melalui intensifikasi komunikasi formal maupun informal baik di tataran internal maupun eksternal kedinasan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan. Disamping itu upaya pemerataan dan perluasan akses dengan cara

pengembangan model pendidikan baik formal maupun non formal. Untuk keberhasilan hal tersebut perlu dibangun tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan dan partisipasi dari semua komponen yang ada. Meningkatkan kualitas peserta didik adalah upaya yang dilakukan secara terus menerus melalui inovasi pembelajaran sehingga peserta didik memiliki kompetensi yang tinggi ditandai oleh tingkat pencapaian angka kelulusan, rendahnya angka mengulang dan lain - lain.

4.1.2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

Rendahnya mutu pendidikan dapat terlihat dari kualifikasi Guru serta Proses Pembelajaran yang berlangsung tidak sesuai dengan Standar Nasional sehingga hal ini juga mungkin merupakan salah satu penyebab rata-rata nilai hasil peserta didik US/UN SD dan SMP masih rendah.

Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah upaya yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pembinaan secara terus menerus baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui pelatihan teknis pengelolaan pendidikan agar dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja serta memiliki integriras dan kompetensi unggul dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif.

4.1.3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Memenuhi standar nasional sarana dan prasarana adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang harus tersedia dalam rangka kegiatan belajar mengajar melaui pembangunan

gedung kantor, sekolah, ruang kelas, laboratorium serta ruang penunjang lainnya, alat bantu pembelajaran seperti buku teks pelajaran, alat peraga dan lain-lain baik secara kuantitas maupun kualitas.

4.1.4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tatakelola pendidikan

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

Tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien adalah upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan pendidikan seperti pelayanan yang bersifat administratif, informatif, koordinatif serta hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan managerial bagi pemangku kebijakan pada setiap jenjang pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan peningkatan profesionalisme, pemanfaatan dan penguasaan teknologi komunikasi dan teknologi informasi seoptimal mungkin, sehingga proses pelayanan pendidikan dapat dilakukan secara murah dan mudah tanpa harus dibatasai oleh ruang dan waktu.

4.2. SASARAN

4.2.1. Meningkatnya Kemempuan Membaca

Membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang paling utama dalam pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam memahami pesan yang disampaikan sebuah tulisan, keterampilan membaca sangat diperlukan.

Keterampilan membaca siswa merupakan dasar yang menjadi penentu keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Siswa yang tidak mampu membaca dengan baik seringkali mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Hal tersebut dikarenakan dalam menangkap dan memahami informasi yang terdapat dalam buku-buku pelajaran, ataupun sumber-sumber penunjang belajar lainnya siswa harus mampu membaca dengan baik. Masih banyak siswa pada satuan pendidikan yang belum lancar membaca, bahkan sama sekali belum bisa membaca dengan baik hal ini tentu saja merupakan sebuah permasalahan yang harus segera ditangani dan mendapat perhatian berbagai pihak.

Salah satu program dalam meningkatkan Keterampilan membaca siswa adalah adanya Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang menjadi populer semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.

Program Peningkatan Keterampilan Membaca melalui Program Klinik Baca adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitasi kepada siswa yang memiliki kendala dalam keterampilan membaca;

2. Memeberikan motivasi kepada siswa agar memiliki keinginan dan kemauan untuk meningkatkan keterampilan membaca;
3. Terwujudnya Program Melek Huruf melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di Kabupaten Cirebon (tujuan jangka menengah/1 tahun)
4. Terlaksananya Program Gerakan Literasi Sekolah melalui Klinik Baca bagi siswa SMP di seluruh sub rayon (gugus) Kabupaten Cirebon sesuai standar membaca pemahaman dengan Kecepatan Efektif Membaca (KEM) mencapai 140 – 175 KPM (tujuan jangka panjang/2 tahun);

4.2.2 Meningkatnya Kesempatan dan Pemerataan Perluasan Akses Pendidikan

Semua anak bisa sekolah dan unggul membutuhkan peningkatan dari aspek aksesibilitas dan mutu pendidikan di sekolah. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui daya tampung satuan pendidikan dinilai sangat penting dikarenakan salah satu factor utama keberhasilan pembangunan pendidikan dapat tercapai ketika seluruh anak dengan usia sekolah baik TK/PAUD Regular (4- 5) tahun) SD (7-12 tahun), SMP (13 - 15 tahun) dan SMA/SMK (16 – 18 tahun) mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan.

Perluasan dan pemerataan Akses Pendidikan merupakan upaya perluasan daya tampung satuan Pendidikan dengan mengacu kepada skala prioritas dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh penduduk Kabupaten Cirebon dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Selain itu beasisawa transisi, dana Bos sangat menunjang dan meningkatkan perluasan akses ini.

4.2.3 Meningkatnya Mutu dan Relevansi Pendidikan

Sudah merupakan pendapat umum bahwa kemakmuran suatu bangsa berkaitan erat dengan kualitas, mutu dan relevansi pendidikan bangsa yang bersangkutan. Bahkan lebih spesifik lagi, bangsa-bangsa yang berhasil mencapai kemakmuran dan kesejahteraan dewasa ini adalah bangsa-bangsa yang melaksanakan pembangunan berdasarkan strategi pengembangan sumber daya insane. Artinya, melaksanakan pembangunan nasional dengan menekankan pada pembangunan pendidikan guna pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Begitupun di Kabupaten Cirebon upaya pengembangan sumber daya manusia, dari aspek pendidikan yang berarti mengembangkan pendidikan baik aspek kuantitas maupun kualitas. Aspek kuantitas menekankan pada perluasan sekolah sehingga penduduk memilki akses untuk bisa mendapatkan pelayanan pendidikan tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Dari aspek kualitas , pengembangan sumber daya manusia berarti pendidikan dalam hal ini kualitas sekolah harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kualitas sekolah memiliki tekanan bahwa lulusan sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki kemampuan yang relevan dan diperlukan dalam kehidupannya.

Salah satu penentu kegiatan pembelajaran adalah guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses berlangsungnya pendidikan. Guru hendaknya memiliki kemampuan untuk membentuk manusia cerdas dalam memahami, mencerna dan melakukan berbagai hal, membentuk pribadi yang memiliki jati diri bangsa, sehingga kelak kemudian hari mampu mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai potensi yang dikuasai sehingga pembangunan

pendidikan dapat terwujud dengan sempurna karena di isi oleh generasi muda yang berkualitas.

Selain kualifikasi guru, jumlah gurupun hendaknya mencukupi untuk semua jenjang pendidikan. Rasio guru SD sama dengan 1 orang guru berbanding 1 rombongan belajar, untuk jenjang SMP 24 jam pelajaran tersedia 1 orang guru serta pelajaran yang diampu sesuai dengan basic yangdi milikinya.

Sarana prasarana untuk menunjang terselenggaranya layanan pendidikan juga sangat penting dan menentukan. Upaya untuk memenuhi sarana prasaran dengan melakukan pembengunan USB, ruang kelas baru, laboratorium, perpustakaan, rehabilitasi, pengadaan perlengkapan sekolah, alat peraga pendidikan dan lain-lain menuju tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai Kepmenpan nomor 25 tahun 2004.

4.2.4 Meningkatnya Efektifitan dan Efisiensi Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data saswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu realisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

4.2.5 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pendidikan

Tata Kelola Pendidikan merupakan bagian manajemen dalam pengelolaan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari pengelolaan yang efisien, akuntabel dan transparan baik di Sekolah maupun di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Oleh karenanya Tata kelola pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Tata Kelola Pendidikan di dalam kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon mempunyai andil yang penting dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen organisasi. Efisiensi dari pengelolaan manajemen dapat dibantu dengan adanya sistem IT terintegrasi yang bisa memudahkan akses data serta menjembatani antara sekolah dan dinas pendidikan melewati satu jalur. Dengan demikian kemudahan sistem dan perolehan data untuk pengelolaan sekolah dari dinas pendidikan dapat berjalan dengan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Sasaran strategis tata kelola dinas pendidikan yang profesional dan akuntabel (reformasi birokrasi) meliputi:

a. SAKIP Dinas Pendidikan
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan yang professional
c. Monitoring & Evaluasi Pengendalian SNP
d. Sistim Informasi Manajeman Dinas Pendidikan pengelolaan data.
e. Pengelolaan anggaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Tabel T-C.25

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

No	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN									
1	**MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, KESEHATAN DAN EKONOMI**									
1.1		**Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat**	Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan	23,07 Poin	23,54	23,74	23,92	24,38	24,70	24,70
1.1.1		Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	95,55 Prosen	96,00	96,58	97,16	97,74	98,32	98,32
			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa	76,00 Prosen	76,00	76,46	76,91	77,38	77,84	77,84
1.1.2		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,68 Tahun	6,78	6,88	6,98	7,08	7,18	7,18
1.1.3		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,37 Tahun	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12
1.1.4		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indek Kepuasan Masyarakat	78,26 Point	78,30	78,35	78,42	78,45	78,50	78,50
			Harapan Lama Sekolah	12,37 Prosen	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12
1.1.5		Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid	0,00 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	0,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2018-2023

DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Existing (2018)	Rasio	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Semua ANAK sekolah	APM	64,41	–	Persentase	65	67,6	69,63	71,72	73,87
2	Lulusan Sekolah yang kompetitif	Rataan Nilai Kelulusan	SMA IPA: 51.08 SMA IPS; 46,21 SMK: 43,83	–	SMA IPA SMA IPS SMK	58,5 56,8 59,3	61,6 56,7 60,4	63,7 57,8 62,5	64,8 58,8 63,5	65,9 59 64,6
		Standar Kompetensi Lulusan	6,39 6,31	–	Nilai SMA Nilai SMK	6,51 6,45	6,63 6,59	6,76 6,73	6,88 6,87	7,0 7,0
3	Kepuasan stakeholder Disdik	Indeks Kepuasan Stakeholder		–	Indeks	3,51-4 (BAIK)	3,51-4 (BAIK)	3,51-4 (BAIK)	4,01-4,5 (SANGAT BAIK)	4,01-4,5 (SANGAT BAIK)
	M1: Menjadikan Semua Anak bisa Sekolah dan Unggul									
4	Peningkatan Daya Tampung Satuan Pendidikan	Siswa								
		SMA	642.079		Siswa	18.861	18.861	18.861	18.861	18.861
		SMK	983.386		Siswa	28.886	28.886	28.886	28.886	28.886
		PJJ + SMATER	16.475 + 32.687		Siswa	1.444	1.444	1.444	1.444	1.444
		Sekolah		Siswa/Sekolah						
		SMA (USB) SMP Terintegrasi	1.531	407	Sekolah Sekolah	10 30	10 30	10 30	10 30	10 30
		SMK	2.800	382	Sekolah	82	82	82	82	82
		Kelas		Siswa/Kelas						
		SMA	19.534	30	Kelas	648	648	648	648	648
		SMK	32.667	29	Kelas	1.027	1.027	1.027	1.027	1.027

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Existing (2018)	Rasio	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
		Kapasitas 30 orang/kelas		Siswa/Kelas						
		SMA		30	Kelas	629	629	629	629	629
		SMK		30	Kelas	963	963	963	963	963
		Guru		Siswa/Guru						
		SMA	32.667	20	Orang	960	960	960	960	960
		SMK	52.436	19	Orang	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
5	Pemberdayaan Sekolah (Sekolah Juara, SMK Juara, Guru Juara, Budaya Juara, PT Juara)	• Nilai Standar Penilaian Pendidikan	SMA : 6,19 SMK : 6,10		Nilai	6,35 6,28	6,51 6,46	6,67 6,64	6,83 6,82	7,00 7,00
		• Nilai Standar Proses	SMA : 6,55 SMK : 6,51		Nilai	6,64 6,61	6,73 6,71	6,82 6,81	6,91 6,91	7,00 7,00
		• Nilai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	SMA : 3,41 SMK : 2,98		Nilai	4,13 3,78	4,85 4,58	5,57 5,38	6,29 6,18	7,00 7,00
		• Nilai Standar Isi	SMA : 5,74 SMK : 5,80		Nilai	5,99 6,04	6,24 6,28	6,49 6,52	6,74 6,76	7,00 7,00
		• Nilai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	SMA : 4,42 SMK : 2,97		Nilai	4,93 3,78	5,44 4,59	5,95 5,40	6,46 6,21	7,00 7,00
		• Nilai Standar Pengelolaan Pendidikan	SMA : 5,94 SMK : 5,87		Nilai	6,15 6,09	6,36 6,31	6,57 6,53	6,78 6,75	7,00 7,00

No	Tujuan	Indikator Tujuan/Sasaran	Existing (2018)	Rasio	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
6	Pemberdayaan KCD	• Peta masalah • *Roadmap* sekolah juara (solusi masalah) • Pembinaan	- - -		Dokumen Dokumen Jml MM	13 13 44	- - 44	- - 44	- - 44	- - 44
	M2: Tata Kelola Dinas Pendidikan Yang Profesional Dan Akuntabel (Reformasi Birokrasi)									
7	SAKIP Disdik	Nilai LAKIP	A		Nilai	A	A	A	A	A
8	ASN Disdik Profesional	Indeks Kinerja ASN	-		SKP	Ke BKD				
9	Monev dan Pengendalian SNP	Monev SNP	-		Jumlah	26	26	26	26	26
10	BOS	Indeks Pengelolaan BOS	100%		%	100	100	100	100	100
11	Sistim informasi pengelolaan sekolah juara	• Ketersediaan aplikasi pengelolaan sekolah juara terintegrasi • *Upgrading* sistem informasi	20%		% %	20 50	50 20	70 20	90 10	100 20
12	Pengelolaan Anggaran + BOS	• Opini BPK • Nilai Standar Pembiayaan	WTP SMA :5,8 SMK :5,93		Opini Nilai	WTP 6,04 6,14	WTP 6,28 6,35	WTP 6,52 6,56	WTP 6,76 6,77	WTP 7 7

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara- sistermatis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019—2024 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis RPJMD Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2024. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development.*

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2019--2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan khususnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keterjangkauan atau pendanaan, pembelajaran dan penilaian, dan tata kelola manajemen pendidikan.

5.1. STRATEGI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Strategi merupakan upaya langkah yang dilakukan secara sistermatis guna mencapai tujuan serta sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pendidikan. Strategi-strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tetap mengerucut pada tiga hal yakni Peningkatan Aksesbilitas Pendidikan, Mutu Pendidikan serta Tata Kelola Pendidikan yang akuntabel dan transparansi.

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu.

5.1.1. Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik

Strategi peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata, dan mengembangkan pendidikan karakter.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Apabila diamati secara seksama, Guru Negeri (PNS) dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon pada jenjang TK, SD, SMP terdapat kekurangan. Selain itu tidak meratanya sebaran guru menambah parah gap antara sekolah yang satu dengan lainnya.

Strategi yang dibangun dalam mengatasi kesenjangan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan adalah membangun strategi pelayanan untuk pendidikan jalur formal/non formal sebagai berikut.

a) Penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan guru TK, SD, SMP, serta tutor Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten;
b) Penyediaan manajemen TK, SD, SMP, SMA, SMK serta Paket A, Paket B dan Paket C yang berkompeten merata di seluruh wilayah kabupaten Cirebon meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
c) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu, serta keterlaksanaan akreditasi;
d) Penyediaan dana BOS serta subsidi lainnya untuk meningkatkan keterjangkauan layanan.

Guru berkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya tergantung pada bagaimana guru memahami komponen-komponen yang terkait langsung dengan proses pembelajaran itu sendiri diantaranya:

a) Tujuan Pembelajaran

Langkah pertama proses belajar mengajar ialah penentu tujuan. Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu konsep pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran umum telah ditulis dalam Garis-Baris Besar Program Pengajaran (GBPP). Komponen tujuan pembelajaran adalah suatu tahap kegiatan belajar mengajar yang turut memecahkan problem pengajaran.

b) Murid

Murid adalah orang yang melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Murid dalam suatu kelompok harus memiliki karakteristik yang relatif sama. Untuk penentuan karakteristik lazim digunakan empat teknik penentukan karakteristik siswa, mengkaji dokumen, tes, wawancara, dan observasi.

c) Guru

Guru adalah orang yang menggerakkan suatu proses belajar. Tanpa profesionalisme suatu proses belajar mengajar tidak mungkin mencapai hasil yang baik. Keberadaan guru yang profesional mutlak menjadi dasar pengembangan sistem pembelajaran.

d) Konsep Pembelajaran

Konsep pembelajaran mengandung berbagai materi pembelajaran yang harus dikaji warga belajar. Dengan menguasai sejumlah konsep pembelajaran berarti siswa memiliki modal untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Konsep pembelajaran harus dikembangkan jadi bahan pembelajaran yang memungkinkan warga belajar memperoleh macam-macam materi pembelajaran yakni fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dengan

adanya pengembangan bahan pembelajaran yang teruji memungkinkan proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

e) Pendekatan/Metode/Teknik

Pendekatan berupa suatu pendapat tentang pengajaran bahasa yang didasari falsafah tentang bahasa dan pengajaran bahasa, seperti pendekatan komunikatif dan pendekatan alamiah. Teknik pembelajaran digunakan untuk mengurutkan setiap langkah kegiatan. Teknik yang dapat digunakan seperti pemberian, penjelasan, diskusi. Pendekatan dan metode maupun teknik merupakan subsistem yang digunakan dalam pembelajaran.

f) Media/Alat peraga

Penyampaian materi pembelajaran memerlukan media suatu alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran disebut media belajar (alat peraga). Alat ini digunakan hanya untuk membantu memperjelas siswa kepada hal-hal yang memang belum jelas. Media membentuk warga belajar terhindar dari verbalisme, karena sesuatu yang dikatakan ditunjukan dengan bendanya atau tiruannya.

g) Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mengukur kemampuan (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) warga belajar setelah mengkaji konsep pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan dapat berupa evaluasi lisan, evaluasi tulisan, dan evaluasi perbuatan. Evaluasi dapat dilaksanakan dengan pertanyaan tulisan yang di jawab dengan lisan, atau pertanyaan lisan dijawab dengan lisan. Evaluasi tulisan diharapkan warga belajar menjawab dengan tulisan. Evaluasi perbuatan menekankan warga belajar untuk melakukan suatu kegiatan berupa motorik (gerak), seperti mengekpresikan suatu adegan bagian drama, menunjukkan perilaku senang/susah/sedih, dan sebagainya.

5.1.2. Peningkatan akses layanan pendidikan

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan murah dan berkualitas merupakan mandat sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 11 ayat (1) dan (2) menegaskan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Strategi guna mencapai Aksesbilitas pendidikan dapat dilakukan dengan meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan TK/PAUD, SD dan SMP serta memberikan kemudahan aksesibilitas bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan yang dapat diambil yakni dengan membangun Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang membutuhkan, terutama bagi daerah yang memiliki rasio sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah tidak sebanding maupun wilayah pelosok, merevitalisasi Ruang Kelas Baru agar dapat menampung siswa, memberikan bantuan operasional siswa berupa BOS, membebaskan iuran bulanan peserta didik TK, SD dam SMP Negeri dan membantu meringankan iuran bulanan peserta didik yang kurang mampu, menyedikan pembelajaran Jarak Jauh dengan menambah SMP Tebuka serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan PKBM untuk jenjang pendidikan non formal (Kesetaraan Paket A, B dan C).

5.1.3. Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki infrastruktur/sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Satu Desa/Kelurahan dilayani minimal satu satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD), serta dalam satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SD dengan 6 Rombngan Belajar (Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.340 m2, sedangkan luas bangunan minimal 400 m2.

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP yang dapat menampung semua lulusan SD di kecamatan tersebut serta satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Luas lahan yang harus tersedia untuk satuan pendidikan SMP dengan 3 Rombngan Belajar

(Rombel) bangunan lantai satu adalah 1.440 m2, semakin banyak jumlah rombel semakin bertambah luas lahan yang mesti disediakan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan luas bangunan minimal 430 m2 untuk bangunan lantai satu, dan semakin besar jumlah rombel semakin luas pula bangunan yang mesti disediakan.

5.1.4 Peningkatan Layanan Tatakelola Pendidikan

Manajemen pendidikan tidak kalah penting dalam mewujudkan layanan yang bermutu. Laju teknologi yang begitu cepat memaksa satuan pendidikan melakukan perubahan tata kerja meliputi tata cara kolekting data siswa dan lain-lain, pengolahan dan analisis data serta produksi dan pendayagunaan data. Selain itu sinergitas antar pelaksana pelayanan perlu direalisasikan dalam kegiatan sehari-hari serta memiliki cara pandang yang sama agar tercapai sinergitas seluruh komponen manajerial demi terwujudnya manajemen yang baik pada satuan pendidikan.

Layanan data dan informasi adalah bagian yang tak kalah pentingnya bagi terwujudnya tata kelola yang efektif dan efisien diantaranya melalui proses kolekting data, pengolahan data, produksi data dan pendayagunaan data. Seiring dengan laju perkembangan teknologi informasi, proses tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara manual, tetapi mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi melalui pembangunan sistem layanan data dan informasi serta meningkatkan sumber daya manusia dilingkungan Dinas Pendidikan sehingga sistem layanan tersebut teraji dengan sempurna sesuai harapan.

5.1.4. Peningkatan Tata Kelola Dinas Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel

Stategi yang diterapkan rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan

(Aksesbilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional dan akuntabel (Reformasi Birokrasi).

5.2 ARAH KEBIJAKAN

5.2.1 Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pendidikan

Kualitas/Mutu guru adalah hal yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan pelayanan pendidikan, tidak jarang harapan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui bangku pendidikan adalah jalan satu-satunya yang dipercaya dapat mewarnai keberhasilan dalam berbagai kesempatan memperoleh pekerjaan.

Namun demikian peningkatan mutu guru masih terus harus dipacu mengingat masih rendahnya mutu tenaga pendidik ditandai dengan rendahnya nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) serta tanda bukti kelulusan / izazah siswa tidak dijadikan barometer oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Berijazah atau tidak bagi DUDI adalah sama saja, tidak ada perbedaan, akibatnya sebagian orang berpendapat bahwa sekolah hanyalah perbuatan sia-sia, membuang waktu dan kesempatan karena dengan menempuh pendidikan tidak memiliki dampak yang signifikant terhadap dirinya.

Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui berbagai pelatihan teknis seperti pelaksanaan MGMP dan sejenisnya serta pelatihan yang diberikan langsung terhadap peserta didik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan melibatkan nara sumber yang berkompeten sehingga secara bertahap dapat meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing untuk dapat menapaki pintu gerbang globalisasi.

5.2.2. Perluasan jaminan akses dan fasilitasi pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasan Serta Pendidikan Non Formal

Pemerataan pendidikan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh komponen masyarakat untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi. Program *Education for All* (Pendidikan Untuk Semua/PUS) menghendaki tidak ada seorang pun masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan sistem rekrutmen peserta didik harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat pada setiap jenjang dan jalur pendidikan serta tidak mempersulit dan memberatkan masyarakat.

Disamping itu perlu dibangun pelayanan pendidikan yang dapat dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan msyarakat terkait dengan beberapa hal seperti biaya, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta sistem informasi yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat menentukan pilihan dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan.

Sosialisasi berbagai model pelayanan pendidikan harus menyentuh langsung pada sasaran tidak hanya dilakukan oleh pengelola pendidikan tetapi juga masyarakat secara keseluruhan sehingga tercpta jalur – jalur strategis memperoleh pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. ebijakan pemenuhan sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan adalah salah satu faktor penentu bagi semua jalur dan jenjang pendidikan dalam memberikan pelayanan terbaik sehingga dapat menjangkau sampai kedaerah terpencil sekalipun.

5.2.3. Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan Memanfaatka Dana APBN, APBD Serta Dana Lain yang Syah.

Untuk mencapai ujuan pembelajaran diperlukan sarana prasarana yang memadai. Sehebat apapun guru mengajar bila tidak ditunjang

dengan sarana prasarana maka hasilnya dipastikan tidak akan memuaskan.

Untuk kepentingan tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan dana agar kekurangan ruang kelas dan ruang penunjang lainnya (RPL) serta alat peraga pendidikan terpenuhi, agar ruang kelas dan RPL dalam kondisi baik serta terpenuhinya kebutuhan prasaranya. Namun dikarenakan keterbatasan anggaran maka kebutuhan tersebut belum dapat tercukupi.

Untuk memenuhinya Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, memberdayakan komite sekolah, memanfaatkan dana dari masyarakat seperti alumni, tokoh masyarakat, CSR serta dana lain yang syah.

5.2.4. Pengelolaan Pendidikan Melibatkan Masyarakat Peduli Pendidikan Sesuai Kewenangannya

Peranserta masyarakat diwujudkan dengan dibentuknya komite sekolah pada setiap satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas pendidikan dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat diwujudkan melalui sosialisasi, pembinaan komite sokolah, forum masyarakat peduli pendidikan serta kegiatan lain yang memberikan tambahan wawasan dan pemahaman tentang peran masyarakat dan komite sekolah dalampengelolaan pendidikan.

Selain itu dalam rangka kelancaran dan keberhasilan proses pembelajaran diperlukan pula pera msyarakat secara umum untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal dalam membentuk anak bangsa yang cerdas dan berahlak mulia.

5.2.5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan

Peningkatan layanan tatakelola manajeman dan admintrasi perkantoran dalam mencapai tata kelola pendidikan yang akuntabilitas dan transparasi dilakukan melalui beberapa kebijakan yaitu penyempurnaan sistem manajeman dalam pelaporan kinerja pemerintah, yang akuntabel, mengarahkan kepada instansi di lingkungan Dinas Pendidikan menerapkan e-budgeting sebagai upaya E-Goverment *d*alam penyelenggaraan kegiatan, Menerapkan *Open Goverment* di dalam lingkungan Dinas Pendidikan

Tabel T.C26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ISU STRATEGIS

1 Melek huruf Latin dan Al Qur'an
2 Komptensi tenaga pendidik dan kependi- dikan
3 Sumberdaya sarana dan prasarana
4 Kualitas tatakelola pendidikan

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI 1: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya kemampuan membaca	Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik	Peningkatan kualitas SDM bidang Pendidikan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Peningkatan akses layanan pendidikan	Peluasan jaminan akses dan fasilitas pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar serta Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik	Peningkatan kualitas SDM bidang Pendidikan
		Peningkatan infrastruktur pendidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memanfaatkan APBN, APBD serta dana lain yang syah.
	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Manajemen Pendidikan	Peningkatan layanan tatakelola pendidikan	Pengelolaan pendidikan melibatkan masyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	Peningkatan layanan tatakelola manajeman dan admintrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2018-2023
DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Visi : **" Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi "**			
Misi : **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1.Meningkatkan aksesbilitas pendidikan bagi anak usia sekolah SMA/SMK (16-18 tahun), Pendidikan Menengah Khusus (16-18 tahun) serta Layanan Khusus (15-21 tahun) yang merata tanpa adanya hambatan.	1.1. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia sekolah (16-18 tahun) pada jenjang SMA/SMK/SMALB.	1.1.1. Meningkatkan layanan akses pendidikan jenjang Pendidikan SMA, SMK dan PKLK yang merata.	1.1.1.1. Membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB/Layana n Khusus di daerah- daerah secara merata. 1.1.1.2 Membangun 1 Sekolah smK/SMA satu kecamtan.
	1.2. Rendahnya Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sedang bekerja dengan pendidikan SMP	1.2.1. Memberikan kemudahan aksesbilitas bagi anak usia sekolah secara merata.	1.2.1.1. Memberikan bantuan layanan akses pendidikan bagi anak usia sekolah yang membutuhkan
	1.3 Meningkatnya kualitas layanan akses pendidikan anak usia sekolah pendidikan menengah	1.3.1 Menjamin dalam penyelenggaraan layanan akses pendidikan sesuai dengan SPM	1.3.1.1. Meyelenggarakan layanan akses pendidikan bagi sekolah negeri maupun swasta harus sesuai dengan SPM

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkat kan Mutu Pendidikan melalui orientasi pembelajaran berbasis karkater Lokal	2.1 Meningkatnya Mutu Layanan Pendidikan Menengah	2.1.1 Menjamin dalam penyelenggaraan layanan akses pendidikan sesuai dengan SNP 2.1.2.Meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan standar yang berlaku 2.1.3 Melakukan Revitalisasi pembelajaran di SMK	2.1.1.1 Meyelenggarakan layanan akses pendidikan bagi sekolah negeri maupun swasta harus sesuai dengan SNP 2.1.1.2 Mengimplementasikan kurikulum yang berlaku bagi seluruh sekolah SMA/SMK/SLB yang ada di wilayah Kabupaten dan Kota. 2.1.1.3. Memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap sekolah SMA yang baru mengimplementasikan kurikulum yang berlaku. 2.1.1.4 Melibatkan DU/DI dalam melakukan Revitalisasi pembelajaran di SMK
	2.2. Meningkatnya Profesionalisme Guru	2.2.1 Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu Guru/Pengawas/Kepala Sekolah secara merata	Memberikan sosialisasi serta bimtek bagi Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah tentang penilaian kinerja dalam upaya meningkatkan profesionalisme. Memberikan bantuan finansial agar Guru Honorer maupun ASN memenuhi Sertifikasi Guru. 2.1.2.3 Memberikan pelatihan seputar *Subject Knowledge* dan *Pedagogical Knowlegde*

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2.3 Meningkatnya perilaku Baik siswa yang berlandaskan pada pendidikan karater lokal	2.3.1 Menanamkan pendidikan karakater lokal Jabar Masagi	2.3.1.1 Memasukan unsur pendidikan karakter Jabar Masagi dalam setiap pembelajaran.
3 Meningkatkan Tata kelola Pendidikan yang Transparansi dan Akuntabel	3.1Meningkatnya kinerja Dinas Pendidikan yang akuntabel	3.1.1Terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja pemerintah yang akuntabel	3.1.1.1Penyempurnaan sistem manajemen dalam pelaporan kinerja pemerintah
	3.2Dipertahankanya Opini laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian	3.2.1Meningkatkan efektivitas e-budgeting dalam penyelenggaraan kegiatan	3.2.1.1. Mengarahkan kepada instansi di lingkungan Dinas Pendidikan menerapkan e-budgeting sebagai upaya E-Goverment.
	Meningkatnya partisipasi publik dalam tata kelola pendidikan	Meningkatkan implementasi Open Goverment di dalam lingkungan Dinas Pendidikan	3.2.1.2. Menerapkan Open Goverment dalam lingkungan Dinas Pendidikan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program yang dicanangkan dalam Rencana Strategis selama lima tahun kedepan melihat dari kondisi riil yang sedang dihadapi dalam proses pembangunan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat sistematis, nyata serta terpadu. Secara umum Program dalam lima tahun kedepan terbagi menjadi dua hal yakni program prioritas dan program non-prioritas. Program prioritas berkaitan dengan tiga hal yakni aksesbilitas, peningkatan kualitas mutu pendidikan serta tata kelola pendidikan. Sedangkan program yang bersifat non-prioritas berkaitan dengan daya dukung program prioritas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagai wujud percepatan akselerasi pembangunan dibidang pendidikan.

Untuk mencapai tingkat perkembangan yang optimal diperlukan program dan kegiatan yang berkualitas bagi Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP serta pendidikan lain yang setara. Isi, Proses dan Penilaian merupakan tiga Standar Nasional Pendidikan yang terintegrasi menyeluruh dan terpadu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelaksanaan tiga standar tersebut sangat menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Keterpaduan antar isi, proses dan penilaian tidak terlepas dari nilai-nilai moral, religi dan budaya keluarga serta masyarakat setempat sebagai tanggungjawab bersama.

Agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud melalui pembiasaan kehidupan siswa, program/kegiatan prioritas yang akan dilakukan sebagai berikut.

6.1 NON URUSAN

Program Sekretariat memiliki rancangan kegiatan yang bersifat sistematis guna mendukung secara teknis kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang. Kegiatan tersebut mendukung sasaran strategis utama yang diantaranya meningkatkan aksesibilitas pendidikan (Aksesbilitas), pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan (Mutu Pendidikan), dan tata kelola Dinas Pendidikan yang profesional dan akuntabel (Reformasi Birokrasi). Berdasarkan poin sasaran strategis utama yang ingin dicapai, kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota.
   1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   6) PEnyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah;

6.2 URUSAN

Program Urusan Bidang ini berisi kegiatan yang bersifat sistematis bekenaan dengan pemenuhan standar pelayanan minimal pada jenjang Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan jenjang Pendidikan Non Formal dalam hal kuantitas dan kualitas yang sudah disesuaikan dengan renstra Dinas Pendidikan. Program tersebut dibagi berdasarkan sasaran strategis diantaranya

a. Program Pengelolaan Pendidikan
   1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
   2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
   3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan;

b. Program Pengembangan Kurikulum
   1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
   1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;

Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Pemerintah. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Untuk itu rencana program/kegiatan/sub kegiatan prioritas Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR SASARAN, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat				Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan	23,07 Poin	23,54	1.969.716.415.678	23,74	2.163.859.728.998	23,92	2.435.874.783.924	24,38	2.528.249.537.738	24,7	2.868.084.573.961	24,7	11.962.182.208.499		
	Meningkatnya kemampuan membaca			Angka Melek Huruf	95,55 Prosen	96	5.806.537.500	96,58	5.983.691.250	97,16	6.887.735.375	97,74	7.940.875.163	98,32	9.169.391.867	98,32	35.788.231.155		
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	95,55 Prosen	96	5.806.537.500	96,58	5.983.691.250	0	6.887.735.375	0	7.940.875.163	0	9.169.391.867	0	35.788.231.155		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	201.249 orang	198.131		194.798		190.798		194.000		198.000		198.000			
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD yang dapat membaca dan menulis	0 Siswa	194.798		196.039		0		0		0		0		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	78.638 orang	79.650		81.357		83.360		86.400		90.000		90.000			
		02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang dapat membaca	0 Siswa	81.357		86.733		0		0		0		0		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah kesetaraan	8.970 orang	9.043	5.806.537.500	9.947	5.983.691.250	10.941	6.887.735.375	12.035	7.940.875.163	13.238	9.169.391.867	13.238	35.788.231.155		
		02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar yang telah mengikuti Pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2019 dan warga belajar yang buta aksara. Kegiatan HAI Tk. nasional dan Kegiatan HAI Tk. Provinsi	2.250 Warga Belajar	2.250	4.116.537.500	2.000	4.068.191.250	0	4.715.010.375	0	5.474.511.413	0	6.367.562.554	4.250	24.741.813.092	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya kemampuan membaca			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa	76 Prosen	76	1.764.164.200	76,46	1.998.080.500	76,91	0	77,38	0	77,84	0	77,84	3.762.244.700		
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD	76 Prosen	76	797.039.200	76,46	911.743.000	0	0	0	0	0	0	0	1.708.782.200		
				Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP	55,7 Prosen	59,5	967.125.000	63,3	1.086.337.500	0	0	0	0	0	0	0	2.053.462.500		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	201.249 orang	198.131	797.039.200	194.798	911.743.000	190.798	0	194.000	0	198.000	0	198.000	1.708.782.200		
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an	33.850 Eksemplar	50.000	797.039.200	50.000	911.743.000	0	0	0	0	0	0	100.000	1.708.782.200	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	78.638 orang	79.650	967.125.000	81.357	1.086.337.500	83.360	0	86.400	0	90.000	0	90.000	2.053.462.500		
		02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an	0 Eksemplar	25.000	967.125.000	25.000	1.086.337.500	0	0	0	0	0	0	50.000	2.053.462.500	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan			Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,68 Tahun	6,78	368.089.967.393	6,88	344.714.273.800	6,98	458.756.282.420	7,08	504.721.394.729	7,18	548.632.015.612	7,18	2.224.913.933.954		
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka partisipasi kasar PAUD/TK	67 Prosen	68	3.709.175.000	68,41	25.148.252.500	68,82	28.958.077.750	69,23	31.792.885.525	69,65	34.913.274.077	69,65	124.521.664.852		
				Angka partisipasi kasar SD	109 Prosen	100	280.646.154.243	100	230.943.656.800	100	296.858.827.000	100	326.555.709.000	100	360.211.280.000	100	1.495.215.627.043		
				Angka partisipasi kasar SMP	101,11 Prosen	100	83.571.038.150	100	88.442.404.500	100	132.741.421.670	100	146.155.048.604	100	153.267.934.775	100	604.177.847.699		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat	100 Prosen	100		100		100		100		100		100			
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat	98 Prosen	98,3		98,89		99,48		100		100		100			
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	201.249 orang	198.131	280.646.154.243	194.798	230.943.656.800	190.798	296.858.827.000	194.000	326.555.709.000	198.000	360.211.280.000	198.000	1.495.215.627.043		
		02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Gedung Sekolah Baru	3 Unit	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000	1	2.662.000.000	1	2.928.200.000	5	12.210.200.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				Unit Gedung Sekolah Baru	3 Unit	1		1		1		1		1		5			
		02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	15 Lokal	112	31.858.617.000	100	35.044.479.000	100	38.548.927.000	100	42.403.819.000	100	46.644.201.000	512	194.500.043.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				Unit Ruang Kelas Sekolah	15 unit	112		100		100		100		100		512			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar (SD) mendapat dana BOS	919 Unit	919	246.787.537.243	920	193.699.177.800	925	255.889.900.000	926	281.489.890.000	928	310.638.879.000	928	1.288.505.384.043	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Pada Sedkolah Dasar	919 Sekolah	919		920		925		926		928		928			
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	78.638 orang	79.650	83.571.038.150	81.357	88.442.404.500	83.360	132.741.421.670	86.400	146.155.048.604	90.000	153.267.934.775	90.000	604.177.847.699		
		02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru SMP	3 Lokal	80	15.479.656.000	80	16.931.986.100	80	18.741.421.670	80	20.755.048.604	80	22.997.934.775	400	94.906.047.149	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
				Ruang Kelas Baru SMP	3 unit	80		80		80		80		80		400			
		02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah SMP Penerima dana BOS	187 Sekolah	192	68.091.382.150	200	71.510.418.400	210	114.000.000.000	215	125.400.000.000	220	130.270.000.000	220	509.271.800.550	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	
				Sekolah SMP Penerima Dana Operasional Sekolah	187 Sekolah	192		200		210		215		220		220			
		02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	32.704 orang	26.764	3.709.175.000	29.440	25.148.252.500	32.888	28.958.077.750	36.176	31.792.885.525	39.793	34.913.274.077	39.793	124.521.664.852		
		02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit Gedung Sekolah Baru	16 Unit	2	1.185.000.000	2	1.303.500.000	2	1.433.850.000	2	1.576.235.000	2	1.734.958.500	10	7.233.543.500	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan Dana Bantuan Operasional TK/{AUD	16 Unit	16	656.400.000	18	722.040.000	20	794.244.000	22	873.668.400	24	961.035.240	100	4.007.387.640	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Lembaga PAUD	700 Lembaga	750	250.000.000	750	275.000.000	750	302.500.000	750	332.750.000	750	366.025.000	3.750	1.526.275.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
				Lembaga Penyelenggara PAUD	750 Lembaga	750		750		750		750		750		3.750			
		02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD	1 Dokumen	1	98.650.000	1	108.515.000	1	119.366.500	1	131.303.150	1	144.433.465	1	602.268.115	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Juara I, II, III Lomba Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi Tingkat Kabupaten	1 Paket Kegiatan	1	225.000.000	1	247.500.000	1	872.250.000	1	899.475.000	1	929.422.500	5	3.173.647.500	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta sosialisasi Program Bantuan Operasional Pendidikan PAUD terhadap Kepala Sekolah TK/PAUD	750 Orang	750	637.725.000	750	701.497.500	750	771.647.250	750	848.811.975	750	933.693.172	3.750	3.893.374.897	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
				Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Persiapan sekolah yang akan diakreditasi	380 Dokumen	380		380		380		380		380		1.900			
				Jumlah Lembaga PAUD dan Gugus PAUD Berprestasi	300 Lembaga	300		300		300		300		300		1.500			
		02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga TK/PAUD Penerima dana BOP	720 Lembaga	676	656.400.000	680	21.790.200.000	690	24.664.220.000	695	27.130.642.000	700	29.843.706.200	700	104.085.168.200	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Angka partisipasi kasar	67 Prosen	68	163.600.000	68,41	179.960.000	68,82	197.956.000	69,23	217.751.600	69,65	239.526.760	69,65	998.794.360		
		03.2.02.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah formal dan non formal	0 Persen	100	163.600.000	100	179.960.000	100	197.956.000	100	217.751.600	100	239.526.760	100	998.794.360		
		03.2.02.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Sertifikat Peserta Bimtek Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	410 Eksemplar	500	163.600.000	500	179.960.000	500	197.956.000	500	217.751.600	500	239.526.760	500	998.794.360	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan			Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,37 Tahun	12,52	193.948.467.385	12,67	312.460.200.948	12,82	365.823.206.170	12,97	401.265.671.869	13,12	471.691.649.438	13,12	1.745.189.195.810		
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Angka Lulusan SMP	99,95 Prosen	99,97		99,98		99,99		100		100,01		100,01			
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD	96 Prosen	97		97,6		0		0		0		0			
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK	60 Prosen	60,35	96.552.000	60,72	3.804.477.200	61,09	4.184.924.920	61,45	4.603.417.712	61,82	6.336.015.832	61,82	19.025.387.664		
				Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	0 Prosen	80	621.400.000	85	683.540.000	90	751.894.000	95	827.083.400	98	909.791.740	98	3.793.709.140		
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP	97,5 Prosen	98,2		98,8		0		0		0		0			
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK	0 Prosen	50	1.904.000.000	55	14.725.546.000	60	16.198.101.000	65	17.458.541.000	70	19.599.702.400	70	69.885.890.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	68,09 Prosen	70		70,04		70,08		71,3		71,7		71,7			
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV pada jenjang TK/PAUD	72 Prosen	72,5		72,9		0		0		0		145,4			
				Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	79,68 Prosen	80	359.000.000	80,5	12.148.600.000	81	15.960.760.000	81,4	17.397.946.000	81,9	18.978.982.900	81,9	64.845.288.900		
				Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	68 Prosen	70		72		75		78		80		80			
				Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts	100 Prosen	100	1.233.937.500	100	1.408.069.970	100	1.608.214.667	100	1.838.458.500	100	2.103.561.036	100	8.192.241.673		
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 Prosen	100	3.703.148.000	100	5.503.062.800	100	8.955.326.000	100	9.858.298.000	100	36.485.157.100	100	64.504.991.900		
				Meningkatnya Angka Lulusan SMP	99,95 Prosen	99,97	1.728.981.500	99,98	9.661.879.650	99,99	15.155.707.965	100	16.408.495.377	100,01	22.662.328.314	100,01	65.617.392.806		
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	70 Prosen	70,42	54.422.249.500	70,84	67.787.799.400	71,27	80.842.609.000	71,7	90.558.106.000	72,13	100.011.399.500	72,13	393.622.163.400		
				Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP	80 Prosen	80,5	17.591.215.600	81	19.311.537.500	81,5	21.343.890.800	82	23.425.479.000	82,5	25.715.228.000	82,5	107.387.350.900		
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	0 Prosen	60	59.287.297.400	65	70.177.077.400	70	82.926.428.825	75	90.274.079.119	80	98.369.876.237	80	401.034.758.981		
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	0 Prosen	60	48.193.993.900	65	101.891.031.190	70	111.873.089.814	75	121.831.418.865	80	132.881.954.142	80	516.671.487.911		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	201.249 orang	198.131	130.653.670.700	194.798	158.276.430.600	190.798	188.037.391.825	194.000	207.663.239.619	198.000	253.670.573.787	198.000	938.301.306.531		
		02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Kerja Guru	0 Lokal	250	400.000.000	250	440.000.000	250	484.000.000	250	532.400.000	250	585.640.000	1.250	2.442.040.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Pepustakaan Sekolah	4 Lokal	53	10.859.850.000	53	11.985.327.500	53	13.229.276.625	53	14.604.433.119	53	16.124.939.587	265	66.803.826.831	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Halaman dan lingkungan gedung sekolah terpagar dan tertata rapih	76 Lokasi	76	14.430.097.000	76	13.479.106.000	76	14.827.017.000	76	16.309.719.000	76	17.940.691.000	380	76.986.630.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				Sarana Air bersih dan Jamban Sekolah	24 Sekolah	68	5.060.000.000	68	5.566.000.000	68	12.455.155.700	70	13.334.043.000	70	14.287.488.000	344	50.702.686.700		
		02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Sekolah SD	46 Lokal	400	54.422.249.500	450	67.787.799.400	450	80.842.609.000	450	90.558.106.000	450	100.011.399.500	2.200	393.622.163.400	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru pada SMP Negeri	0 Unit	18	1.993.581.000	20	2.192.939.000	20	2.412.233.000	20	2.653.456.500	20	2.918.801.950	98	12.171.011.450	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Sarana Membaca Bagi Siswa	18 Lokal	50	10.900.000.000	50	12.213.679.000	50	13.435.047.000	50	14.778.552.000	50	16.256.407.000	250	67.583.685.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair Sekolah SD	108 Lokal	175	7.032.958.300	175	7.801.813.500	175	8.660.665.500	175	9.621.138.450	175	10.696.538.650	875	43.813.114.400	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Sarana Prasarana TIK	0 Paket	136	9.838.244.000	136	10.822.068.400	136	11.904.275.500	136	13.094.702.800	136	14.404.173.000	680	60.063.463.700	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku referensi, Buku dan Alat Tulis Siswa dan Raport Siswa	1 Paket	1	3.176.250.000	1	3.493.875.000	1	3.843.262.500	1	4.227.588.750	1	4.650.347.000	5	19.391.323.250	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Ruang Guru Sekolah Dasar	0 Lokal	3	5.040.000.000	3	5.544.000.000	3	6.098.400.000	3	6.708.240.000	3	7.379.064.000	15	30.769.704.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Siswa Kurang mampu mendapatkan beasiswa	0 Orang	0	3.703.148.000	0	4.073.462.800	5.000	4.480.809.000	5.000	4.928.889.000	5.000	5.421.778.900	15.000	22.608.087.700	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				-	0 -	0		0		0		0		0		0			
		02.2.01.22.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan	115 Paket	115	3.449.898.100	115	11.044.887.000	115	11.424.376.000	115	11.841.814.000	115	12.300.995.000	575	50.061.970.100	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Hasil Monev UN/US Sekolah Dasar	928 Sekolah	928	347.394.800	928	401.873.000	928	465.748.000	928	540.748.000	928	628.932.000	4.640	2.384.695.800	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				Peserta Sosialisasi penyelenggaran pendidikan sekolah dasar	561 orang	561		561		561		561		561		2.805			
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba OSN, O2SN , FLSN, Calistung dan Pasanggiri	55 Cabang Lomba	55	0	55	0	55	1.544.917.000	55	1.699.809.000	55	6.833.778.200	55	10.078.504.200	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Guru SD di Daerah Terpencil penerima tunjangan	7 orang	48	0	48	1.429.600.000	48	1.929.600.000	48	2.229.600.000	48	23.229.600.000	240	28.818.400.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	78.638 orang	79.650	55.507.152.700	81.357	117.464.027.310	83.360	130.430.081.146	86.400	142.341.411.242	90.000	160.209.762.542	90.000	605.952.434.940		
		02.2.02.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah	0 Unit	9	1.495.170.900	9	1.644.687.990	9	1.809.156.800	9	1.990.072.500	9	2.189.079.700	45	9.128.167.890	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	Ruang Lab dan Praktikum Sekolah	0 Lokal	20	1.500.000.000	20	1.650.000.000	20	1.815.000.000	20	1.996.500.000	20	2.196.150.000	100	9.157.650.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Sarana prasarana lapangan olah raga	0 Paket	200	5.025.000.000	200	5.527.500.000	200	6.080.250.000	200	6.688.275.000	200	7.357.102.500	1.000	30.678.127.500	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.10.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pagar dan halaman lingkungan gedung sekolah	10 Lokal	10	794.993.400	10	874.492.740	10	961.942.014	10	1.058.136.215	10	1.163.949.837	50	4.853.514.206	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jamban Siswa dan Sarana Air bersih	0 unit	400	5.399.705.000	400	5.966.286.200	400	6.562.915.000	400	7.219.207.000	400	7.941.128.000	2.000	33.089.241.200	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah SMP	6 Lokal	160	17.591.215.600	160	19.311.537.500	160	21.343.890.800	160	23.425.479.000	160	25.715.228.000	800	107.387.350.900	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Kerja Guru	0 Ruang	0	0	25	14.052.550.000	25	16.000.000.000	25	17.000.000.000	25	18.000.000.000	100	65.052.550.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah	0 Unit	0	0	3	4.957.546.000	3	4.975.514.000	3	4.995.279.000	3	5.017.020.000	12	19.945.359.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang Laboratorium Sekolah	20 lokal	20	5.606.739.000	20	6.167.412.900	20	6.784.154.500	20	7.462.569.600	20	8.208.826.600	100	34.229.702.600	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.02.19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Sarana Olah Raga Sekolah	3 Paket	3	300.000.000	3	360.000.000	3	432.000.000	3	518.400.000	3	622.080.000	15	2.232.480.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang WC Siswa dan Guru	0 Unit	0	0	54	4.914.540.000	60	4.914.540.000	65	5.000.000.000	80	5.250.000.000	259	20.079.080.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubaliar Sekolah SMP	1 Lokal	24	100.000.000	24	12.484.107.360	24	13.732.518.000	24	15.105.770.000	24	16.616.347.000	120	58.038.742.360	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan sarana dan prasarana kebersihan sekolah	0 Unit	160	9.408.000.000	160	10.348.800.000	160	11.383.680.000	160	12.522.048.000	160	13.774.252.800	800	57.436.780.800	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Referensi, Pengayaan Panduan Pendidikan dan Raport Siswa	1 Paket	1	1.205.550.000	1	1.326.105.000	1	1.458.715.500	1	1.604.587.050	1	1.765.045.755	5	7.360.003.305	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa tidak mempu Penerima Beasiswa	265 orang	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		7.500		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.33.	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Buku Teks Pelajaran SMP	0 Paket	36.658	500.000.000	36.658	550.000.000	36.658	605.000.000	36.658	665.500.000	36.658	732.050.000	183.290	3.052.550.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.34.	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Peserta Bimtek Guru TIK	150 orang	500	196.960.000	500	7.916.656.000	500	8.708.321.600	500	9.579.153.760	500	10.537.069.136	2.500	36.938.160.496	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.35.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat peraga dan praktik penunjang KBM	1 Paket	1	3.965.254.600	1	16.660.385.000	1	18.510.424.000	1	20.573.066.000	1	22.873.713.000	5	82.582.842.600	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan UN/US	187 Sekolah	187	146.542.700	187	161.196.970	187	177.316.667	187	195.048.000	187	214.553.160	935	894.657.497	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba OSN, O2SN, FLSN, TUB dan Pasanggiri	55 Cabang Lomba	55	0	55	0	55	1.220.846.250	55	1.372.687.000	55	6.191.171.000	55	8.784.704.250	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru Berprestasi	183 orang	209	1.532.021.500	209	1.745.223.650	209	1.988.746.015	209	2.266.970.617	209	2.584.920.178	1.045	10.117.881.960	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Peserta Pelatihan dan Workshof	160 orang	160		160		160		160		160		800			
				Peseta mendapatkan sertifikat	300 orang	300		300		300		300		300		1.500			
				Jumlah Guru Penggerak pada jenjang SMP	0 Guru	0		250		250		250		250		1.000			
		02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumah sekolah penyelenggaraan SMP Terbuka	17 Sekolah	17	740.000.000	17	845.000.000	20	965.150.000	25	1.102.662.500	30	1.260.075.876	30	4.912.888.376	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
				Dokumen Pemetaan Mutu Sekolah	3 Dokumen	5		7		9		10		12		43			
				Jumlah SMP sebagai sekolah Penggerak	80 Sekolah	0		20		20		20		20		80			
		02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	32.704 orang	26.764	2.000.552.000	29.440	18.530.023.200	32.888	20.383.025.920	36.176	22.061.958.712	39.793	25.935.718.232	39.793	88.911.278.064		
		02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru	0 Lokal	3		3		3		3		3		15		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya sarana prasarana bermain	3 Unit	3	650.000.000	3	715.000.000	3	786.500.000	3	505.780.000	3	951.665.000	15	3.608.945.000	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Bangunan Gedung TK/PAUD yang direhab perkerasan lingkungan taman dan atau pagar sekolah	3 Lokasi	3	0	3	124.146.000	3	136.561.000	3	150.217.000	3	165.239.000	15	576.163.000		
				Pemasangan Instalasi Listrik dari PLN	1 Paket	1		1		1		1		1		5			
		02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi sejumlah Ruang Kelas Sekolah	1 lokal	3	96.552.000	3	3.804.477.200	3	4.184.924.920	3	4.603.417.712	3	6.336.015.832	15	19.025.387.664	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.07.	Pengadaan Mebeluer PAUD	Meubelair Sekolah	1 Lokal	5	125.000.000	10	12.512.500.000	10	13.763.750.000	10	15.140.125.000	10	16.654.137.500	45	58.195.512.500	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Alat Peratik dan Peraga Siswa (APE Dalam dan APE Luar)	5 Paket	10	75.000.000	10	214.500.000	10	235.950.000	10	259.545.000	10	285.499.500	50	1.070.494.500	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Buku Referensi dan Raport	1 Paket / Exemplar	23.000	1.054.000.000	23.000	1.159.400.000	23.000	1.275.340.000	23.000	1.402.874.000	23.000	1.543.161.400	115.000	6.434.775.400	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dokumen model bahan ajar	1 Dokumen	1		1		1		1		1		1		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah kesetaraan	8.970 orang	9.043	980.400.000	9.947	12.832.140.000	10.941	20.950.448.100	12.035	22.414.713.400	13.238	24.237.942.640	13.238	81.415.644.140		
		02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket A	0 Paket	1	621.400.000	1	683.540.000	1	751.894.000	1	827.083.400	1	909.791.740	5	3.793.709.140	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket B	0 Paket	1		1		1		1		1		5			
				Jumlah Modul Pembelajaran Paket C	0 Paket	1		1		1		1		1		5			
		02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Lulusan kesetaraan Paket C setara SMA	1.350 orang	1.350	0	3.500	0	3.500	2.580.500.000	3.500	2.659.500.000	3.500	2.742.500.000	15.350	7.982.500.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	Kabupaten Cirebon
				Lulusan Warga Belajar Kesetaraan Paket B Setara SMP	2.500 Orang	1.250	0	1.284	0	1.300	3.237.794.100	1.400	3.189.684.000	1.500	3.349.168.000	1.500	9.776.646.100		
				Warga Belajar Paket A setara SD	2.000 Warga Belajar	254	0	254	0	254	1.000.000.000	254	1.000.000.000	254	1.000.000.000	1.270	3.000.000.000		
		02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidikan (Tutor) untuk kesetaraan Paket C	72 orang	100	359.000.000	100	408.900.000	100	466.590.000	100	533.409.000	100	610.941.900	500	2.378.840.900	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan	80 orang	100		100		100		100		100		500			
				terlaksananya pelatihan kompetensi tutor paket b	100 orang	100		120		130		140		150		640			
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	0 Buah	0		0		0		0		0		0		BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	Kabupaten Cirebon
				-	0 orang	0		0		0		0		0		0			
				Terselenggaranya Ekspo Pendidikan Masyarakat	1 Kegiatan	1		1		1		1		1		1			
				Jumlah Tutor LKP Berprestasi	26 Kategori	26		26		26		26		26		130			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Peserta Bimtek Life Skill	350 Orang	350		350		350		350		350		1.750			
		02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk Lembaga PKBM	0 Lembaga	63	0	61	11.739.700.000	63	12.913.670.000	63	14.205.037.000	65	15.625.541.000	65	54.483.948.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	0 Prosen	80	140.000.000	85	168.000.000	90	201.600.000	95	241.920.000	98	290.304.000	98	1.041.824.000		
				Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	68,09 Prosen	70		70,04		70,08		71,3		71,7		71,7			
				Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	79,68 Prosen	80		80,5		81		81,4		81,9		81,9			
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 Prosen	100	135.706.100	100	162.847.320	100	195.416.784	100	234.500.141	100	281.400.169	100	1.009.870.514		
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	0 Prosen	60	3.000.000.000	65	3.300.000.000	0	3.630.000.000	0	3.993.000.000	0	4.392.300.000	0	18.315.300.000		
		03.2.01.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah	0 persen	100	3.135.706.100	100	3.462.847.320	100	3.825.416.784	100	4.227.500.141	100	4.673.700.169	500	19.325.170.514		
		03.2.01.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Pelajaran Pokok SD	0 Paket	500	3.000.000.000	500	3.300.000.000	500	3.630.000.000	500	3.993.000.000	500	4.392.300.000	2.500	18.315.300.000	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		03.2.01.04.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Guru peserta pelatihan mendapat sertifikat	250 orang	250	135.706.100	250	162.847.320	250	195.416.784	250	234.500.141	250	281.400.169	1.250	1.009.870.514	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		03.2.02.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	Penerapan kurikulum pendidikan sesuai dengan jenjang sekolah formal dan non formal	0 Persen	100	140.000.000	100	168.000.000	100	201.600.000	100	241.920.000	100	290.304.000	100	1.041.824.000		
		03.2.02.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket A	86 Orang	100	140.000.000	100	168.000.000	100	201.600.000	100	241.920.000	100	290.304.000	500	1.041.824.000	BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	Kabupaten Cirebon
				Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket B	0 Kegiatan	1		1		1		1		1		5			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar Tutor Paket C	0 Kegiatan	1		1		1		1		1		5			
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD	96 Prosen	97	1.530.985.885	97,6	1.726.732.518	98,2	1.995.242.395	98,8	2.314.928.755	99,3	2.673.648.068	99,3	10.241.537.621		
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP	97,5 Prosen	98,2		98,8		99,4		100		100,6		100,6			
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD	72 Prosen	72,5		72,9		73,4		73,8		74,3		366,9			
		04.2.01.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Tersedianya Dokumen Data Pokok Pendidikan, dan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	0 Dokumen	2	1.530.985.885	2	1.726.732.518	2	1.995.242.395	2	2.314.928.755	2	2.673.648.068	2	10.241.537.621		
		04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen	350 orang	350	1.530.985.885	350	1.726.732.518	350	1.995.242.395	350	2.314.928.755	350	2.673.648.068	1.750	10.241.537.621	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Manajeman Bebasisa Sekolah	100 Prosen	100	11.755.328.900	100	23.221.658.700	100	28.491.280.553	100	31.832.532.258	100	35.695.440.084	100	130.996.240.495		
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Standar Pelayanan Minimal	100 Prosen	100		100		100		100		100		100			
				Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah	100 Prosen	100		100		100		100		100		100			
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Standar Pelayanan Minimal	100 Prosen	100	3.638.719.300	100	14.133.549.750	0	18.121.861.053	0	20.195.419.758	0	22.513.713.384	0	78.603.263.245		
				Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah	100 Prosen	100	5.183.948.000	100	5.583.881.200	0	6.180.809.000	0	6.628.889.000	0	7.191.778.900	0	30.769.306.100		
				Penerapan Manajeman Berbasis Sekolah	0 Prosen	100	232.661.600	100	264.227.750	0	300.610.500	0	342.623.500	0	391.227.800	0	1.531.351.150		
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Penduduk Usia sekolah SD dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	201.249 orang	198.131	5.392.648.900	194.798	5.962.713.550	190.798	8.924.420.300	194.000	9.825.609.250	198.000	10.803.772.700	198.000	40.909.164.700		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Juara I, II, dan III Guru SD Berprestasi	9 Orang	9	1.456.839.300	9	1.625.023.000	9	2.413.400.800	9	2.624.496.750	9	2.861.166.000	45	10.980.925.850	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				Jumlah Guru Penggerak pada jenjang Sekolah Dasar (SD)	0 orang	0	0	20	0	40	1.729.600.000	60	1.929.600.000	80	2.129.600.000	200	5.788.800.000		
		02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Juara Lomba Gugus dan Perpustakaan	6 orang	6	232.661.600	6	264.227.750	6	300.610.500	6	342.623.500	6	391.227.800	30	1.531.351.150	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
				Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	1 Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Jumlah SD sebagai sekolah penggerak	0 Sekolah	50		50		50		50		50		250			
		02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	PTK Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri mendapatkan Honorarium	0 orang	0		0		4.500		4.500		4.550		4.550		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.30.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Manajeman Berbasis Sekolah	925 Orang	925	3.703.148.000	925	4.073.462.800	925	4.480.809.000	925	4.928.889.000	925	5.421.778.900	925	22.608.087.700	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Penduduk Usia sekolah SMP dapat bersekolah dan terlayani kebutuhan pendidikannya	78.638 orang	79.650	3.512.430.100	81.357	13.608.945.350	83.360	15.228.860.253	86.400	16.846.323.008	90.000	18.748.447.384	90.000	67.945.006.095		
		02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tunjangan penghasil PTK Non PNS	100 Persen	100	1.704.710.100	100	2.026.222.950	100	2.410.095.453	100	2.868.605.248	100	3.416.466.072	500	12.426.099.823	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.36.	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dokumen Hasil Pelaksanaan PPDB On Line	1 dokumen	1	326.920.000	1	10.072.304.000	1	11.118.764.800	1	12.277.717.760	1	13.561.981.312	5	47.357.687.872	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	1 Dokumen	1		1		1		1		1		5		BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
		02.2.02.43.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pengadiministrasian Dana BOS bagi Bendahara dan Manajer Sekolah	187 Orang	192	1.480.800.000	200	1.510.418.400	210	1.700.000.000	215	1.700.000.000	220	1.770.000.000	220	8.161.218.400	BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	Kabupaten Cirebon
				-	0 Orang	0		0		0		0		0		0			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Penduduk Usia Pra Sekolah (Usia Dini) dapat mengikuti pengenalan pendidikan melalui pendidikan Pra Sekolah (TK / PAUD)	32.704 orang	26.764	150.249.900	29.440	409.999.800	32.888	450.000.000	36.176	495.000.000	39.793	544.500.000	39.793	2.049.749.700		
		02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru Penggerak pada Jenjang TK	0 orang	0		10		20		30		30		90		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	PTK Non PNS pada TK Negeri Penerima Honorarium dari APBD Kabupaten	49 Orang	42		45		51		55		60		60		BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
		02.2.03.19.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan BOP	720 orang	676	150.249.900	680	409.999.800	690	450.000.000	695	495.000.000	700	544.500.000	700	2.049.749.700	BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kabupaten Cirebon
				Dokumen Adminstrasi Pengelolaan dana BOP PAUD	720 Dok	676		680		690		695		700		700			
		02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Penduduk Drop out sekolah dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki Ijazah kesetaraan	8.970 orang	9.043		9.947		10.941		12.035		13.238		13.238			
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sosialiasasi terhadap Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK	0 Lembaga	72		100		100		100		100		100		BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL	Kabupaten Cirebon
				Dokumen Laporan Kegiatan	1 dokumen	1		1		1		1		1		5			
				Jumlah Data Sarana dan Prasarana PKBM dan LKP	1 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
				Terbentukanya Desa Cerdas di Kabupaten Cirebon	3 Buah	3		3		3		3		3		15			
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah	100 Prosen	100	2.700.000.000	100	3.240.000.000	100	3.888.000.000	100	4.665.600.000	100	5.598.720.000	100	20.092.320.000		
		04.2.01.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Tersedianya Dokumen Data Pokok Pendidikan, dan Dokumen hasil Penilaian Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan	0 Dokumen	2	2.700.000.000	2	3.240.000.000	2	3.888.000.000	2	4.665.600.000	2	5.598.720.000	2	20.092.320.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD	350 orang	350		350		350		350		350		1.750		SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
				Dokumen Profil Pendidikan	2 dokumen	2		2		2		2		2		10			
				Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Profil Pendidikan	1 dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 Dok	4		4		4		4		4		20			
		04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peseta Bimbingan Teknis memahami dan menguasi materi pelatihan yang telah diberikan dan bisa mengimplementasikan pada tugas yang diampunya	1.500 Orang	500	2.700.000.000	500	3.240.000.000	500	3.888.000.000	500	4.665.600.000	500	5.598.720.000	2.500	20.092.320.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Indek Kepuasan Masyarakat	78,26 Point	78,3	1.387.790.850.300	78,35	1.474.869.823.800	78,42	1.575.181.879.406	78,45	1.581.607.783.719	78,5	1.801.838.540.960	78,5	7.817.686.046.385		
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	78,26 Point	78,3	1.341.352.000	78,35	1.513.554.800	78,4	1.775.288.020	78,45	2.078.871.224	78,5	2.442.999.906	78,5	9.152.065.950		
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	78,26 Point	78,3	3.211.346.600	78,35	4.875.569.300	78,4	5.535.038.286	78,45	5.124.691.025	78,5	7.358.807.280	78,5	22.502.620.691		
				Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	78,26 Point	78,3	1.377.467.512.700	78,35	1.463.382.420.400	78,4	1.562.021.374.400	78,45	1.567.727.920.400	78,5	1.783.503.234.900	78,5	7.754.102.462.800		
				Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	78,26 Point	78,3	1.610.510.000	78,35	1.771.561.000	78,4	1.948.717.100	78,45	2.143.588.810	78,5	2.357.947.691	78,5	9.832.324.601		
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	78,26 Point	78,3	4.160.129.000	78,35	3.326.718.300	78,4	3.901.461.600	78,45	4.532.712.260	78,5	6.175.551.183	78,5	22.096.572.343		
				Indeks Kepuasan Masyarakat jenjang SD	79,5 Prosen	79,55		80,27		80,6		80,99		81,48		81,48			
				Indek Kepuasan Masyakat pada jenjang SMP	76,26 Prosen	77		77,46		77,93		78,39		78,86		78,86			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	78,2 Point	78,2	1.341.352.000	78,35	1.513.554.800	78,4	1.775.288.020	78,45	2.078.871.224	78,5	2.442.999.906	78,5	9.152.065.950		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra 2019 - 2024 dan Dokumen Renja Tahunan	3 Dokumen	3	75.000.000	3	80.000.000	3	85.000.000	3	85.000.000	3	90.000.000	3	415.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
				-	0 -	0		0		0		0		0		0			
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	4 Dok	4	260.676.000	4	299.777.400	4	344.744.010	4	396.455.612	4	455.923.953	4	1.757.576.975	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	2 dokumen	2	760.676.000	2	899.777.400	2	1.064.744.010	2	1.260.455.612	2	1.492.723.953	10	5.478.376.975	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja (SPM, IKM dan Monev)	3 dokumen	3	245.000.000	3	234.000.000	3	280.800.000	3	336.960.000	3	404.352.000	15	1.501.112.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Evaluasi dan Realisasi Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	0 Dokumen	0	1.377.277.512.700	3	1.463.167.648.400	3	1.561.763.648.400	3	1.567.418.648.400	3	1.783.132.108.400	3	7.752.759.566.300		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	1.454	1.377.277.512.700	1.454	1.463.167.648.400	1.454	1.561.763.648.400	1.454	1.567.418.648.400	1.454	1.783.132.108.400	1.454	7.752.759.566.300	DINAS PENDIDIKAN	
		01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terselenggaranya layaranan tata kekola aset barang milik Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0	156.000.000	1	187.200.000	1	224.640.000	1	269.568.000	1	323.481.600	1	1.160.889.600		
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penataan Lahan Tanah Bangunan Gedung Sekolah TK, SD dan SMP dan UPT SKB yang disewa dari masyarakat / pemerintahan desa	15 Lokal	15	156.000.000	15	187.200.000	15	224.640.000	15	269.568.000	15	323.481.600	15	1.160.889.600	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan terhadap masyarakat	78,26 Point	78,3	2.399.997.000	78,35	2.166.333.000	78,42	2.422.443.100	78,45	2.712.060.810	78,5	3.040.114.191	78,5	12.740.948.101		
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Seragam Dinas ASN dan Non ASN	1 Paket	1	1.610.510.000	1	1.771.561.000	1	1.948.717.100	1	2.143.588.810	1	2.357.947.691	5	9.832.324.601	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Sosialisasi	2 dokumen	2	599.487.000	2	180.000.000	2	216.000.000	2	259.200.000	2	311.040.000	10	1.565.727.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sertifikat Bimtek Peserta Pelatihan	10.108 Eksemplar	2.500	190.000.000	2.500	214.772.000	2.500	257.726.000	2.500	309.272.000	2.500	371.126.500	12.500	1.342.896.500	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggaranya layanan administrasi umum perkantoran	40 Unit Kerja	42	1.662.490.000	42	1.802.073.500	42	2.042.532.600	42	2.309.305.860	42	3.513.501.743	42	11.329.903.703		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	126 Unit Kerja	126	68.775.000	126	75.060.000	126	83.217.750	126	91.539.525	126	1.006.934.775	630	1.325.527.050	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlatan Gedung Kantor	0 Paket	20	250.000.000	20	300.000.000	20	350.000.000	20	400.000.000	20	450.000.000	100	1.750.000.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	1.045 Paket	1.045	252.000.000	1.045	277.200.000	1.045	304.920.000	1.045	335.412.000	1.045	368.953.200	5.225	1.538.485.200	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Behan bacaan Media masa	12.480 Eksemplar	12.600	190.285.000	12.700	209.313.500	12.800	230.244.850	12.900	253.269.335	13.000	278.596.268	64.000	1.161.708.953	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Alat Tulis Kantor	1.045 Paket	1.050	495.000.000	1.075	544.500.000	1.100	598.950.000	1.125	658.845.000	1.150	724.729.500	5.500	3.022.024.500	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman untuk rapat-rapat kedinasan	42 Unit Kerja	42	326.430.000	42	306.000.000	42	367.200.000	42	440.640.000	42	528.768.000	42	1.969.038.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah	12 Bulan	12	80.000.000	12	90.000.000	12	108.000.000	12	129.600.000	12	155.520.000	60	563.120.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Aparatur	42 Unit Kerja	42	555.000.000	42	582.000.000	42	698.400.000	42	838.080.000	42	1.005.696.000	42	3.679.176.000		
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2	0 Unit	0	300.000.000	25	360.000.000	25	432.000.000	25	518.400.000	25	622.080.000	100	2.232.480.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor	6 Paket Unit	6	255.000.000	8	222.000.000	10	266.400.000	10	319.680.000	10	383.616.000	44	1.446.696.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya biaya jasa rutin kantor	12 Bulan	12	1.172.752.000	12	558.204.800	12	695.845.000	12	815.014.000	12	950.017.800	12	4.191.833.600		
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa telepon, listrik dan air	42 Unit	42	407.752.000	42	470.604.800	42	590.725.000	42	688.870.000	42	798.645.000	42	2.956.596.800	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Teknis Tata Kearsipan	1 Dokumen	1	765.000.000	1	87.600.000	1	105.120.000	1	126.144.000	1	151.372.800	5	1.235.236.800	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kondisi sarana dan prasarana barang aset milik daerah laik pakai	42 Unit kerja	42	3.225.746.600	42	4.892.809.300	42	5.559.082.286	42	5.166.235.425	42	7.430.621.320	42	22.671.663.131		
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Kendaraan Dinas	278 Unit	278	0	278	1.100.865.300	278	1.200.943.900	278	0	278	1.301.022.600	1.390	0	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK Kendaraan Dinas	278 Unit	278	975.400.000	278	1.086.440.000	278	1.297.084.000	278	1.549.192.400	278	1.850.991.640	1.390	6.759.108.040	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
				Penyediaan Bahan Bakar untuk Kendaraan Dinas	278 Unit	278		278		278		278		278		1.390			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Meubelair Kantor	0 Paket	1	425.000.000	1	510.000.000	1	612.000.000	1	734.400.000	1	881.280.000	5	3.162.680.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peratalatan Gedung Kantor	42 Unit Kerja	42	210.000.000	42	240.000.000	42	288.000.000	42	345.600.000	42	414.720.000	42	1.498.320.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Dinas Pendidikan	42 Unit	42	1.615.346.600	42	1.955.504.000	42	2.161.054.386	42	2.537.043.025	42	2.982.607.080	42	11.251.555.091	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Harapan Lama Sekolah	12,37 Prosen	12,52		12,67		12,82		12,97		13,12		13,12			
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid	0 Dokumen	6	561.100.000	6	612.000.000	6	734.400.000	6	881.280.000	6	1.057.536.000	6	3.846.316.000		
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektipitas dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah	100 Persen	100	561.100.000	100	612.000.000	100	734.400.000	100	881.280.000	100	1.057.536.000	100	3.846.316.000		
		01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Laporan Evaluasi dan Realisasi Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	0 Dokumen	0	561.100.000	3	612.000.000	3	734.400.000	3	881.280.000	3	1.057.536.000	3	3.846.316.000		
		01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset barang milik daerah	1 Dokumen	1	490.000.000	1	540.000.000	1	648.000.000	1	777.600.000	1	933.120.000	1	3.388.720.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Daya serap keuangan	3 Dokumen	3	71.100.000	3	72.000.000	3	86.400.000	3	103.680.000	3	124.416.000	3	457.596.000	SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN	Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	0 Prosen	100		100		100		100		100		100			
				Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	100 Prosen	100		100		100		100		100		100			
TOTAL PENDANAAN						**1.969.716.415.678**		**2.163.859.728.998**		**2.435.874.783.924**		**2.528.249.537.738**		**2.868.084.573.961**		**11.962.182.208.499**			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan manusia kian mendapat perhatian dari penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah. Indikasinya, pembangunan manusia dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia atau IPM.

Adanya target IPM dalam rencana pembangunan selayaknya disambut positif karena IPM merupakan gambaran tingkat kemampuan sumber daya manusia yang terukur. Target IPM harus obyektif dan rasional. Indikator yang mendasari IPM perlu diupayakan secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sehingga target yang telah dicanangkan dapat tercapai.

Untuk mencapai target tersebut dapat dilihat pada tabel indikator kinerja Dinas Pendidikan dibawah ini.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024 DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ISU STRATEGIS

1 Melek huruf Latin dan Al Qur'an
2 Komptensi tenaga pendidik dan kependi- dikan
3 Sumberdaya sarana dan prasarana
4 Kualitas tatakelola pendidikan

VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI 1: **Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat	Meningkatnya kemampuan membaca	Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik	Peningkatan kualitas SDM bidang Pendidikan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Peningkatan akses layanan pendidikan	Peluasan jaminan akses dan fasilitas pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar serta Pendidikan Non Formal
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Peningkatan dan penguatan layanan mutu pendidik	Peningkatan kualitas SDM bidang Pendidikan
		Peningkatan infrastruktur pendidikan	Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan memanfaatkan APBN, APBD serta dana lain yang syah.
	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Manajemen Pendidikan	Peningkatan layanan tatakelola pendidikan	Pengelolaan pendidikan melibatkan masyarakat peduli pendidikan sesuai kewenangannya.
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	Peningkatan layanan tatakelola manajeman dan admintrasi perkantoran	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan

Tabel 7.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	**Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat**		Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan	23,54 Poin	23,74	23,92	24,38	24,70
1.1.1.		Meningkatnya kemampuan membaca	Angka Melek Huruf	96,00 Prosen	96,58	97,16	97,74	98,32
			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa	76,00 Prosen	76,46	76,91	77,38	77,84
1.1.2.		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan	Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,78 Tahun	6,88	6,98	7,08	7,18
1.1.3.		Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,52 Tahun	12,67	12,82	12,97	13,12
1.1.4.		Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan	Manajeman Bebasisa Sekolah	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00
			Indek Kepuasan Masyarakat	78,30 Point	78,35	78,42	78,45	78,50
			Harapan Lama Sekolah	12,52 Prosen	12,67	12,82	12,97	13,12
1.1.5.		Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan	1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid	6,00 Dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00
			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00
			Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)	100,00 Prosen	100,00	100,00	100,00	100,00

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat				Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan			Non Kumulatif	Meningkat	Poin	BPS dan Diskominfo	23,07	23,54	23,74	23,92	24,38	24,7	24,7	Data penunjang IPM yang terdiri dari Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
	Meningkatnya kemampuan membaca			Angka Melek Huruf		$\frac{\text{Jml. Penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis}}{\text{Jml. Penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS / Infokom	95,55	96	96,58	97,16	97,74	98,32	98,32	Data Non Pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	Peningkatan AMH	$\%AMH = \frac{\text{Jml. penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis}}{\text{jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS / Dinkominfo	95,55	96	96,58	0	0	0	0	Penuntasan Bebas Buta Aksara
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD yang dapat membaca dan menulis	Peningkatan angka bebas buta aksara				Siswa		0	194.798	196.039	0	0	0	0	
		02.2.02.38.		Jumlah Siswa SMP yang dapat membaca	Mengetahui siswa yang belum bisa membaca				Siswa		0	81.357	86.733	0	0	0	0	Jumlah siswa SMP yang dapat membaca menulis dan berhitung
		02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**															
		02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar yang telah mengikuti Pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2019 dan warga belajar yang buta aksara. Kegiatan HAI Tk. nasional dan Kegiatan HAI Tk. Provinsi					Warga Belajar		2.250	2.250	2.000	0	0	0	4.250	
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kab. Cirebon					Unit		0	40	40	40	40	40	200	
	Meningkatnya kemampuan membaca			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa		$\frac{\text{Jml. Siswa SD yang bisa baca menulis huruf Al Qur'an}}{\text{Jml. Seluruh Siswa SD}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76	76	76,46	76,91	77,38	77,84	77,84	Data Non Pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD		$\%AMH\ Al\ Qur'an = \frac{\text{Jml. Siswa SD yang dapat baca tulis huruf Al Qur'an}}{\text{Jml. Seluruh Siswa SD}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76	76	76,46	0	0	0	0	Penuntasan Buta Aksara Al Qur'an
				Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP		$\%AMH\ Al\ Qur'an = \frac{\text{Jml. Siswa SMP yang dapat baca tulis huruf Al Qur'an}}{\text{Jml. Seluruh Siswa SMP}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	55,7	59,5	63,3	0	0	0	0	Bebas Buta Huruf A; Qur'an

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an					Eksemplar		33.850	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
		02.2.02.38.		Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an					Eksemplar		0	25.000	25.000	0	0	0	50.000	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan			Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		$(thn)\ RLS = \frac{jml.\ Penduduk\ usia\ >15\ Th \times Lama\ Pendidikan\ yang\ dinaktikan^{*)}}{jml.\ Penduduk\ >15\ Th\ Yang\ sedang\ bersekolah\ atau\ telah\ berijazah\ **)} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Tahun	Dinas Pendidikan	6,68	6,78	6,88	6,98	7,08	7,18	7,18	Pemerataan Pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka partisipasi kasar PAUD/TK		$\frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ TK/RA/Penitipan\ Anak}{Jumlah\ anak\ usia\ 4-6\ Tahun} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	67	68	68,41	68,82	69,23	69,65	69,65	Mewujudkan pemerataan, perluasan akses pendidikan yang berkeadilan
				Angka partisipasi kasar SD		$\%APK = \frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ SD/MI/Paket\ A}{Jumlah\ anak\ usia\ 7-12\ Tahun} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	109	100	100	0	0	0	0	Mengetahui tingkat partisifasi masyarakat terhadap pendidikan
				Angka partisipasi kasar SMP		$\%APK = \frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ SMP/MTs/Paket\ B}{Jumlah\ anak\ usia\ 13-15\ Tahun} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	101,11	100	100	0	0	0	0	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		$\%APM = \frac{Jumlah\ siswa\ usia\ 7-12\ Tahun\ dijenjang\ SD/MI/Paket\ A}{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 7-12\ Tahun} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100,6	0	0	0	0	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		$\%APM = \frac{Jumlah\ siswa\ usia\ 13-15\ Tahun\ dijenjang\ SMP/MTs/Paket\ B}{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 13-15\ Tahun} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinan Pendidikan	98	98,3	98,89	0	0	0	0	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
		02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	-					unit		15	0	0	0	0	0	0	
		02.2.02.02.		Ruang Kelas Baru SMP	Pemerataan dan Perluasan Akses pemdidikan				unit		3	80	80	80	80	80	400	
		02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**															
		02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit Gedung Sekolah Baru	Pemerataan akses pendidikan				Unit		16	2	2	2	2	2	10	
		02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan Dana Bantuan Operasional TK/{AUD	Penunjang biaya operasional pendidikan pada TK Negeri				Unit		16	16	18	20	22	24	100	
		02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Lembaga PAUD					Lembaga		700	750	750	750	750	750	3.750	
				Lembaga Penyelenggara PAUD					Lembaga		750	750	750	750	750	750	3.750	
		02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD					Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Juara I, II, III Lomba Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi Tingkat Kabupaten	Meningkatnya motivsi dan kompetensi guru dalam memenuhi SNP PAUD				Paket Kegiatan		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta sosialisasi Program Bantuan Operasional Pendidikan PAUD terhadap Kepala Sekolah TK/PAUD					Orang		750	750	750	750	750	750	3.750	
				Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Persiapan sekolah yang akan diakreditasi	Persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga TK/PAUD				Dokumen		380	380	380	380	380	380	1.900	
				Jumlah Lembaga PAUD dan Gugus PAUD Berprestasi	Peningkatan manajeman dan tatakelola pendidikan				Lembaga		300	300	300	300	300	300	1.500	
		02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga TK/PAUD Penerima dana BOP	Penyediaan dana Bantuan Operasional Pendidikan, untuk membiaya pendidikan anak usia dini (PAUD)				Lembaga		720	676	680	690	695	700	700	Untuk mengetahui jumlah TK/PAUD dapat diketahui pada angka tahun berjalan
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Angka partisipasi kasar		$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK / RA / Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 - 6 Tahun}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	67	68	68,41	68,82	69,23	69,65	69,65	Mewujudkan pemerataan, perluasan akses pendidikan yang berkeadilan
		03.2.02.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**															
		03.2.02.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Sertifikat Peserta Bimtek Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	Bimbingan teknis tehadap para guru PAUD dalam penerapan Kurikulum dan Model Pembelajam				Eksemplar		410	500	500	500	500	500	500	
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan			Harapan Lama Sekolah (HLS)		$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Non Kumulatif	Meningkat	Tahun	BPS, Disdik dan Disdukcapil	12,37	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12	Angka Indikator merupakan hasil perhitungan dari BPS
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya Angka Lulusan SMP		$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{jml. Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	99,95	99,97	99,98	99,99	100	100,01	100,01	Menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD		$\text{Guru Layak Mengajar} = \frac{\text{Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	96	97	97,6	0	0	0	0	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK		$RK - Baik = \frac{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Seluruh} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	60	60,35	60,72	61,09	61,45	61,82	61,82	Mengetahui jumlah Ruang Kelas Sekolah
				Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Peningkatan angka lulusan SD sederajat	$AL = \frac{Jml.\ Lulusan}{Jml.\ Siswa\ Kelas\ Tertinggi} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	80	85	90	95	98	98	Menunjang capaian angka RLS
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	97,5	98,2	98,8	0	0	0	0	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK		$\%FS = \frac{FS}{Sek} x100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	50	55	60	65	70	70	Mengetahui tingkat kuantitatif fasilitas sarana sekolah
				Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Peningktan Angka Lulusan SMP sederajat	$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ kesetaraan\ Paket\ B}{Jml.\ warga\ belajar\ Th.\ tertinggi\ kesetaraan\ Paket\ B\ pada\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68,09	70	70,04	70,08	71,3	71,7	71,7	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV pada jenjang TK/PAUD		%GL = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	72	72,5	72,9	0	0	0	145,4	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Peningkatan angka lulusan SMA sederajat	$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ kesetaraan\ Paket\ B}{Jml.\ warga\ belajar\ Th.\ tertinggi\ kesetaraan\ Paket\ B\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,68	80	80,5	81	81,4	81,9	81,9	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	Peningkatan keahlian SDM	$Jml.\ LKP = Jml.\ Thn\ n\ + (Jml.\ Thn\ n\ X3\%)$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68	70	72	75	78	80	80	Peningkatan mutu dan kualitas SDM
				Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts		$\%AM = \frac{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 13-15\ Tahun}{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SD/MI\ Tahun\ ajaran\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI		$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SD/MI}{Jml.\ Siswa\ tingkat\ tertinggi\ pada\ jenjang\ SD/MI\ pada\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu dan relevansi pedidikan
				Meningkatnya Angka Lulusan SMP			Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	99,95	99,97	99,98	99,99	100	100,01	100,01	Menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	Mengetahui keadaan jumlah ruang kelas yang sudah rusak	$RK - Baik = \frac{Jml.\ Kondisi\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Seluruh\ Ruang\ Kelas} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	70	70,42	70,84	71,27	71,7	72,13	72,13	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP	Mengetahui jumlah ruang kelas yang sudah rusak	$RK - Baik = \frac{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Seluruh\ Ruang\ Kelas} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5	Kondisi Ruang Kelas Baik SMP
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	Mengetahui jumlah fasilitas sarana pendidikan	$\%FS = \frac{FS}{Sek} x100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	60	65	70	75	80	80	
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	Mengetahui jumlah fasilitas sarana pendidikan	$\%FS = \frac{FS}{Sek} x100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	60	65	70	75	80	80	
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**															
		02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Gedung Sekolah Baru	Pemerataan akses pendidikan				Unit		3	1	1	1	1	1	5	
		02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan				Lokal		15	112	100	100	100	100	512	Jumlah Ruang Kelas Baru pada SD
		02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Kerja Guru					Lokal		0	250	250	250	250	250	1.250	
		02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Pepustakaan Sekolah	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan				Lokal		4	53	53	53	53	53	265	
		02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Halaman dan lingkungan gedung sekolah terpagar dan tertata rapih					Lokasi		76	76	76	76	76	76	380	
				Sarana Air bersih dan Jamban Sekolah	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah sehat				Sekolah		24	68	68	68	70	70	344	
		02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Sekolah SD					Lokal		46	400	450	450	450	450	2.200	
		02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru pada SMP Negeri	Rehabilitasi Ruang Guru yang tidak layak guna				Unit		0	18	20	20	20	20	98	
		02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Sarana Membaca Bagi Siswa	Menunjang budaya baca terhadap siswa				Lokal		18	50	50	50	50	50	250	
		02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair Sekolah SD					Lokal		108	175	175	175	175	175	875	
		02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Sarana Prasarana TIK					Paket		0	136	136	136	136	136	680	
		02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku referensi, Buku dan Alat Tulis Siswa dan Raport Siswa					Paket		1	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Ruang Guru Sekolah Dasar	Ruang Guru pada SD Negeri banyak yang tidak layak guna				Lokal		0	3	3	3	3	3	15	
		02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Siswa Kurang mampu mendapatkan beasiswa	Penduduk usia sekolah SD dapat menuntaskan sekolahnya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi				Orang		0	0	0	5.000	5.000	5.000	15.000	Jumlah Siswa kurang mampu yang mendapat bantuan biaya sekolah
				-					-		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.01.22.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan					Paket		115	115	115	115	115	115	575	
		02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Hasil Monev UN/US Sekolah Dasar					Sekolah		928	928	928	928	928	928	4.640	
				Peserta Sosialisasi penyelenggaran pendidikan sekolah dasar					orang		561	561	561	561	561	561	2.805	
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba OSN, O2SN , FLSN, Calistung dan Pasanggiri	Meningkatnya Prestasi Belajar Siswa				Cabang Lomba		55	55	55	55	55	55	55	
		02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Guru SD di Daerah Terpencil penerima tunjangan	Menunjang peningkatan mutu pembelajaran				orang		7	48	48	48	48	48	240	
		02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar (SD) mendapat dana BOS	Dengan sekolah mendapatkan Dana BOS ini akan membantu pembiayaan sekolah sehingga dapat membantu masyarakat dalam menyekolahkan anaknya				Unit		919	919	920	925	926	928	928	Unit Sekolah yang mendapatkan dan BOS
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**															
		02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru SMP	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan				Lokal		3	80	80	80	80	80	400	
		02.2.02.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan sudah tidak layak guna				Unit		0	9	9	9	9	9	45	
		02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	Ruang Lab dan Praktikum Sekolah					Lokal		0	20	20	20	20	20	100	
		02.2.02.07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Sarana prasarana lapangan olah raga	Meningkatkan Minat untuk berolahraga dan prestasi di bidang olahraga meningkat				Paket		0	200	200	200	200	200	1.000	
		02.2.02.10.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pagar dan halaman lingkungan gedung sekolah					Lokal		10	10	10	10	10	10	50	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jamban Siswa dan Sarana Air bersih					unit		0	400	400	400	400	400	2.000	
		02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah SMP	Meningkatkan mutu kondisi Ruang Kelas Sekolah				Lokal		6	160	160	160	160	160	800	Jumlah RK Kelas yang direhab
		02.2.02.15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Kerja Guru	Untuk meningkatkan kinerja para tenaga pendidik				Ruang		0	0	25	25	25	25	100	Guru dapat melaksanakan tugas dengan nyaman
		02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah	Pengembangan Budaya membeca				Unit		0	0	3	3	3	3	12	Sekolah memiliki sarana tempat membaca untuk siswa
		02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang Laboratorium Sekolah	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				lokal		20	20	20	20	20	20	100	
		02.2.02.19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Sarana Olah Raga Sekolah	Mencetak prestasi bakat dan minat siswa				Paket		3	3	3	3	3	3	15	
		02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang WC Siswa dan Guru	Ketersedian Sarana Sekolah Sehat				Unit		0	0	54	60	65	80	259	Penataan Sarana dan Prasanara Sekolah
		02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubaliar Sekolah SMP					Lokal		1	24	24	24	24	24	120	
		02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan sarana dan prasarana kebersihan sekolah					Unit		0	160	160	160	160	160	800	
		02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Referensi, Pengayaan Panduan Pendidikan dan Raport Siswa					Paket		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa tidak mempu Penerima Beasiswa					orang		265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	
		02.2.02.33.	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Buku Teks Pelajaran SMP	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				Paket		0	36.658	36.658	36.658	36.658	36.658	183.290	
		02.2.02.34.	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Peserta Bimtek Guru TIK					orang		150	500	500	500	500	500	2.500	
		02.2.02.35.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat peraga dan praktik penunjang KBM					Paket		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan UN/US					Sekolah		187	187	187	187	187	187	935	
		02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba OSN, O2SN, FLSN, TUB dan Pasanggiri	Mewujudkan peningkatan Mutu pembelajaran				Cabang Lomba		55	55	55	55	55	55	55	55 Cabang Lomba yang dilombakan
		02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru Berprestasi					orang		183	209	209	209	209	209	1.045	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Peserta Pelatihan dan Workshof					orang		160	160	160	160	160	160	800	
				Peseta mendapatkan sertifikat					orang		300	300	300	300	300	300	1.500	
				Jumlah Guru Penggerak pada jenjang SMP	Guru memberikan model pembelajaran				Guru		0	0	250	250	250	250	1.000	
		02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumah sekolah penyelenggaraan SMP Terbuka	Meningkatkan angka lulusan SMP				Sekolah		17	17	17	20	25	30	30	
				Dokumen Pemetaan Mutu Sekolah	Menunjang terwujudnya mutu pembelajaran				Dokumen		3	5	7	9	10	12	43	
				Jumlah SMP sebagai sekolah Penggerak	Sekolah menyelenggarakan model pembelajaran yang berkualitas				Sekolah		80	0	20	20	20	20	80	Jumlah Sekolah rujukan sebagai sekolah penggerak
		02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah SMP Penerima dana BOS	Dengan adanya dana BOS sebagai penunjang biaya penyelenggaraan pendidikan masyarakat dapat terbantu untuk melanjutkan pendidikan secara mudah				Sekolah		187	192	200	210	215	220	220	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Pusat dan Daerah
		02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru	Daya Tampung Peserta Didik				Lokal		0	3	3	3	3	3	15	
		02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya sarana prasarana bermain					Unit		3	3	3	3	3	3	15	
				Jumlah Bangunan Gedung TK/PAUD yang direhab perkerasan lingkungan taman dan atau pagar sekolah					Lokasi		3	3	3	3	3	3	15	
				Pemasangan Instalasi Listrik dari PLN					Paket		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi sejumlah Ruang Kelas Sekolah					lokal		1	3	3	3	3	3	15	
		02.2.03.07.	Pengadaan Mebeluer PAUD	Meubelair Sekolah					Lokal		1	5	10	10	10	10	45	
		02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Alat Peratik dan Peraga Siswa (APE Dalam dan APE Luar)	Menunjang ketersediaan Ruang Kelas Sekolah yang layak untuk KBM				Paket		5	10	10	10	10	10	50	
		02.2.03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Buku Referensi dan Raport	Menunjang capaian SPM bidang pendidikan				Paket / Exemplar		1	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	115.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dokumen model bahan ajar					Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	
		02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket A	Penunjang SPM Bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket B	sebagai penunjang SPM bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Modul Pembelajaran Paket C	Penunjang SPM Bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	
		02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Lulusan kesetaraan Paket C setara SMA	Menunjang capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS)				orang		1.350	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500	15.350	Warga Belajar Kesetaraan Paket C
				Lulusan Warga Belajar Kesetaraan Paket B Setara SMP	Menunjang peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah				Orang		2.500	1.250	1.284	1.300	1.400	1.500	1.500	
				Warga Belajar Paket A setara SD	Menunjang peningkatan angka lulusan				Warga Belajar		2.000	254	254	254	254	254	1.270	
		02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidikan (Tutor) untuk kesetaraan Paket C	Menunjang Peningkatan jumlah angka lulusan SMA				orang		72	100	100	100	100	100	500	
				Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Pengembangan mutu dalam penyelenggaraan LKP				orang		80	100	100	100	100	100	500	
				terlaksananya pelatihan kompetensi tutor paket b					orang		100	100	120	130	140	150	640	
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-					Buah		0	0	0	0	0	0	0	
				-					orang		0	0	0	0	0	0	0	
				Terselenggaranya Ekspo Pendidikan Masyarakat					Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	
				Jumlah Tutor LKP Berprestasi					Kategori		26	26	26	26	26	26	130	
				Jumlah Peserta Bimtek Life Skill	Bimtek kepada penyelenggaran (Ketua Lembaga)				Orang		350	350	350	350	350	350	1.750	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk Lembaga PKBM	Lembaga PKBM Pendidikan Non Formal mendapatkan bantuan dan BOP untuk penyelenggaraan operasional pendidikan.				Lembaga		0	63	61	63	63	65	65	Jumlah PKBM yang mendapatkan BOP
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Peningkatan angka lulusan SD sederajat		Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	80	85	90	95	98	98	Menunjang capaian angka RLS
				Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Peningktan Angka Lulusan SMP sederajat	$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket B}}{\text{Jml. warga belajar Tk. tertinggi kesetaraan Paket B pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68,09	70	70,04	70,08	71,3	71,7	71,7	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Peningkatan angka lulusan SMA sederajat	$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket B}}{\text{Jml. warga belajar Tk. tertinggi Kesetaraan Paket B tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,68	80	80,5	81	81,4	81,9	81,9	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI		$\%AL = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jml. Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu dan relevansi pedidikan
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	Mengetahui jumlah fasilitas sarana pendidikan	$\%FS = \frac{FS}{Sek} x 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	60	65	0	0	0	0	
		03.2.01.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**															
		03.2.01.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Pelajaran Pokok SD	Mewujudkan peningkatan Mutu pembelajaran				Paket		0	500	500	500	500	500	2.500	
		03.2.01.04.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Guru peserta pelatihan mendapat sertifikat	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				orang		250	250	250	250	250	250	1.250	
		03.2.02.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket A	Pengendalian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan				Orang		86	100	100	100	100	100	500	
				Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket B					Kegiatan		0	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar Tutor Paket C					Kegiatan		0	1	1	1	1	1	5	
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	96	97	97,6	98,2	98,8	99,3	99,3	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	97,5	98,2	98,8	99,4	100	100,6	100,6	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD		%GL = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	72	72,5	72,9	73,4	73,8	74,3	366,9	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
		04.2.01.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**															
		04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen	Penyelenggaraan Bimtek Aplikasi Dapadik terhadap Operator Sekolah				orang		350	350	350	350	350	350	1.750	
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Manajeman Bebasisa Sekolah	Menunjang peningkatan tatakelola pendidikan	$MBS = \frac{Jml.\ Sekolah\ Yang\ Menerapan\ MBS}{Jml.\ Sekolah\ yang\ ada} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Disdik	100	100	100	100	100	100	100	Manajeman pengelolaan pendidikan
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Standar Pelayanan Minimal		SPM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai penimbang / Total unsur yang terisi	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	
				Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah		%MBS = Jml. Sekolah Yang Menerapkan MBS / Jml. Sekolah SD, SMP X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu manajeman pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Standar Pelayanan Minimal		SPM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai penimbang / Total unsur yang terisi	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	0	0	0	0	
				Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah		%MBS = Jml. Sekolah Yang Menerapkan MBS / Jml. Sekolah SD, SMP X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	0	0	0	0	Peningkatan mutu manajeman pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penerapan Manajeman Berbasis Sekolah	Penataan dan tatakelola manajeman pendidikan	$MBS = \frac{Lembaga\ Pendidikan\ Yang\ Menerapkan\ MBS}{Jml.\ Lembaga\ Pendidikan\ Non\ Formal} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	100	100	0	0	0	0	Mengetahui Lembaga Pendidikan Non Formal yang telah menerakan pengelolaan pendidikan berbasis manajeman sekolah
		02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Juara I, II, dan III Guru SD Berprestasi	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD				Orang		9	9	9	9	9	9	45	Juara Tenaga Pendidik SMP Berprestasi
				Jumlah Guru Penggerak pada jenjang Sekolah Dasar (SD)	Guru penggerak sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran				orang		0	0	20	40	60	80	200	Pencetakan Guru Penggerak dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran
		02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Juara Lomba Gugus dan Perpustakaan	Peningkatan Mutu tatakelola manajeman pendidikan				orang		6	6	6	6	6	6	30	Sekolah Juara Gugus dan Pengelolaan Perpustakaan
				Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah					Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	
				Jumlah SD sebagai sekolah penggerak	Meningkatkan mutu pembelajaran untuk mencetak angka lulusan				Sekolah		0	50	50	50	50	50	250	Sekolah menyelenggarakan model pembelajaran yang berkualitas
		02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	PTK Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri mendapatkan Honorarium	Dengan diberikannya Honorarium terhadap PTK Non PNS akan berpengaruh pada peningkatan pelayanan pendidikan, sehingga Pelayanan Minimum Pendidikan akan meningkat				orang		4.400	4.448	4.448	4.500	4.500	4.550	4.550	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada jenjang Sekolah Dasar
		02.2.01.30.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Manajeman Berbasis Sekolah					Orang		925	925	925	925	925	925	925	Peserta Bimtek Pengelolaan Dana Bos terhadap Manajer dan Bendahara BOS SD
		02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Tunjangan penghasil PTK Non PNS					Persen		100	100	100	100	100	100	500	
		02.2.02.36.	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dokumen Hasil Pelaksanaan PPDB On Line	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan				dokumen		1	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Memberikan bimbingan dan sosialisasi kinerja terhadap kepala sekolah dalam rangka persiapan menuju ke akreditasi lembaga sekolah				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.02.43.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pengadiministrasian Dana BOS bagi Bendahara dan Manajer Sekolah	Sekolah Penerima dana BOS untuk Operasional penyelenggaraan pembelajaran				Orang		187	192	200	210	215	220	220	Peserta Bimtek
				-					Orang		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru Penggerak pada Jenjang TK	Guru sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran				orang		0	0	10	20	30	30	90	Pencetakan Guru Penggerak pada jenjang TK
		02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	PTK Non PNS pada TK Negeri Penerima Honorarium dari APBD Kabupaten	BOP Daerah Kabupaten Cirebon dialokasikan untuk membiaya honoriraium PTK Non PNS pada Lembaga TK Negeri, sehinga dapat meningkatkan kinerja pelayanan guru terhadap peserta didik dan masyarakat				Orang		49	42	45	51	55	60	60	
		02.2.03.19.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan BOP	Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengadministrasian dan BOP PAUD				orang		720	676	680	690	695	700	700	Sebagai tolok ukur sekolah dalam menerapkan SPM dari segi pembiayaan sekolah
				Dokumen Adminstrasi Pengelolaan dana BOP PAUD	Dokumen Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOP				Dok		720	676	680	690	695	700	700	Dokumen Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOP
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sosialiasasi terhadap Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK	Memberikan bimbingan teknik Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK				Lembaga		0	72	100	100	100	100	100	
				Dokumen Laporan Kegiatan					dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Data Sarana dan Prasarana PKBM dan LKP	Pendataan Sarana dan Prasarana PKBM dan LPK				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Terbentukanya Desa Cerdas di Kabupaten Cirebon	Menunjang program peningkatan mutu pendidikan				Buah		3	3	3	3	3	3	15	
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah		%MBS = Jml. Sekolah Yang Menerapkan MBS X 100 Jml. Sekolah SD, SMP	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu manajeman pendidikan
		04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD	Updating data tenaga pendidik dan kependidikan				orang		350	350	350	350	350	350	1.750	
				Dokumen Profil Pendidikan	Penyusunan dan Pemetaan Data Profil Pendidikan				dokumen		2	2	2	2	2	2	10	
				Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Profil Pendidikan	Data merupakan kebutuhan dasar dalam pengambilan kebijakan				dokumen		1	1	1	1	1	1	1	
				Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penilaian Kinerja terhadap guru dan Kepala sekolah dalam rangka peningkatan Mutu PTK				Dok		0	4	4	4	4	4	20	
		04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peseta Bimbingan Teknis dalam Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dalam Penghitungan Angka Kredit tenaga fungsional				Orang		1.500	500	500	500	500	500	2.500	Peserta Bimbingan Teknis dalam penghitungan angka kredit jabatan fungsional tenaga pendidik
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Mutu layanan Pendidikan	$IKM = \frac{\text{Jml. Total dari persepsi nilai perunsur}}{\text{Total Nilai yang terisi}} X \text{ Nilai Penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,42	78,45	78,5	78,5	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} X \text{ Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} X \text{ Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidkan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
				Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} X \text{ Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan Pelayanan kepada masyakat secara efektif dan efisia

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakt
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
				Indeks Kepuasan Masyarakat jenjang SD		$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \text{ X Nilai Penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,5	79,55	80,27	80,6	80,99	81,48	81,48	Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien
				Indek Kepuasan Masyakat pada jenjang SMP		$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \text{ X Nilai Penimbang}$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76,26	77	77,46	77,93	78,39	78,86	78,86	Mewujudkan mutu pelayanan kepada Masyarakat secara efektif dan efisien
		01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra 2019 - 2024 dan Dokumen Renja Tahunan	Renstra merupakan Dokumen Perencanaan untuk jangka menengah pada setiap SKPD (5 Tahunan)				Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2019 - 2024
				-	-				-		0	0	0	0	0	0	0	-
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	Penyusunan Rencanan Kegiatan Anggaran (RKA)				Dok		4	4	4	4	4	4	20	Dokumen perencanaan anggaran tahunan
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegitan				dokumen		2	2	2	2	2	2	10	DPA
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja (SPM, IKM dan Monev)	Evaluai dan penilaian capaian kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan				dokumen		3	3	3	3	3	3	15	Dokumen capaian hasil kinerja SKPD
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan					Pegawai		0	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	
		01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**															

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Lahan Tanah Bangunan Gedung Sekolah TK, SD dan SMP dan UPT SKB yang disewa					Lokal		15	15	15	15	15	15	15	
		01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**															
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Seragam Dinas ASN dan Non ASN					Paket		1	1	1	1	1	1	5	Paket Pengadaan Pakaian Seragam Dinas
		01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Sosialisasi	Dengan sosialisasi berbagai peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat				dokumen		2	2	2	2	2	2	10	Dokumen bahan untuk penyelenggaraan Sosialisasi
		01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sertifikat Bimtek Peserta Pelatihan	Menunjang peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat				Eksemplar		10.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
		01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik					Unit Kerja		126	126	126	126	126	126	630	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlatan Gedung Kantor					Paket		0	20	20	20	20	20	100	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Memenuhi kebutuhan barang cetak penunjang adm. perkantoran pada 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan				Paket		1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	5.225	
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Behan bacaan Media masa					Eksemplar		12.480	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	64.000	
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Alat Tulis Kantor	Memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk operasional pelaksanaan administrasi pada 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan				Paket		1.045	1.050	1.075	1.100	1.125	1.150	5.500	
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman untuk rapat-rapat kedinasan					Unit Kerja		42	42	42	42	42	42	42	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					Bulan		12	12	12	12	12	12	60	Tersedianya biaya untuk transport perjalanan dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2					Unit		0	0	25	25	25	25	100	
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor					Paket Unit		6	6	8	10	10	10	44	
		01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa telepon, listrik dan air	Memenuhi kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi kantor				Unit		42	42	42	42	42	42	42	
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Teknis Tata Kearsipan					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Sarana Mobilisasi Kendaraan Dinas				Unit		278	278	278	278	278	278	1.390	
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK Kendaraan Dinas					Unit		278	278	278	278	278	278	1.390	
				Penyediaan Bahan Bakar untuk Kendaraan Dinas					Unit		278	278	278	278	278	278	1.390	
		01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Meubelair Kantor					Paket		0	1	1	1	1	1	5	Perawatan dan Pemeliharaan Meubelair Kantor
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peratalatan Gedung Kantor					Unit Kerja		42	42	42	42	42	42	42	
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Dinas Pendidikan					Unit		42	42	42	42	42	42	42	
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Harapan Lama Sekolah			Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS, Dinas Pendidikan dan Disdukcapil	12,37	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12	Angka HLS dikeluarkan dari BPS
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid	Peningkatan tatakelola manajeman perkantoran		Non Kumulatif	Meningkat	Dokumen	Dinas Pendidikan	0	6	6	6	6	6	6	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektipitas dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah	Laporan Realisasi Anggaran Keuangan		Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Penyelenggaraan Laporan Keuangan
		01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															
		01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Bimbingan teknis pengelolaan aset barang milik daerah					Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dokumen Panduan dan Pedoman Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Daya serap keuangan					Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	Peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat		Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	100	100	100	100	100	100	
				Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)			Non Kumulatif	Meningkat	Prosen		100	100	100	100	100	100	100	

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan derajat dan pendidikan masyarakat				Meningkatnya Angka Capaian Indeks Pendidikan			Non Kumulatif	Meningkat	Poin	BPS dan Diskominfo	23,07	23,54	23,74	23,92	24,38	24,7	24,7	Data penunjang IPM yang terdiri dari Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
	Meningkatnya kemampuan membaca			Angka Melek Huruf		$\frac{Jml.\ Penduduk\ (usia\ diatas\ 15\ tahun)\ yang\ bisa\ menulis}{Jml.\ Penduduk\ usia\ 15\ tahun\ ke\ atas} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS / Infokom	95,55	96	96,58	97,16	97,74	98,32	98,32	Data Non Pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Peningkatan Persentase Masyarkat Melek Aksara	Peningkatan AMH	$\%AMH = \frac{Jml.\ penduduk\ (usia\ diatas\ 15\ tahun)\ yang\ bisa\ menulis}{Jumlah\ penduduk\ usia\ 15\ tahun\ keatas} x\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS / Dinkominfo	95,55	96	96,58	96,58	0	0	96,58	Penuntasan Bebas Buta Aksara
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD yang dapat membaca dan menulis	Peningkatan angka bebas buta aksara				Siswa		0	194.798	196.039	0	0	0	196.039	
		02.2.02.38.		Jumlah Siswa SMP yang dapat membaca	Mengetahui siswa yang belum bisa membaca				Siswa		0	81.357	86.733	0	0	0	86.733	Jumlah siswa SMP yang dapat membaca menulis dan berhitung
		02.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**															
		02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar yang telah mengikuti Pendidikan Keaksaraan Dasar tahun 2019 dan warga belajar yang buta aksara. Kegiatan HAI Tk. nasional dan Kegiatan HAI Tk. Provinsi					Warga Belajar		2.250	2.250	2.000	0	0	0	4.250	
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) di Kab. Cirebon					Unit		0	40	40	40	40	40	200	
	Meningkatnya kemampuan membaca			Tingkat Capaian Angka Melek Huruf Al Qur'an Siswa		$\frac{Jml.\ Siswa\ SD\ yang\ bisa\ baca\ menulis\ huruf\ Al\ Qur'an}{Jml.\ Seluruh\ Siswa\ SD} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76	76	76,46	76,91	77,38	77,84	77,84	Data Non Pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Melek Huruf Al Qur'an jenjang SD		$\%AMH\ Al\ Qur'an = \frac{Jml.\ Siswa\ SD\ yang\ dapat\ baca\ tulis\ huruf\ Al\ Qur'an}{Jml.\ Seluruh\ Siswa\ SD} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76	76	76,46	0	0	0	76,46	Penuntasan Buta Aksara Al Qur'an
				Angka Melek Huruf Al Qur'an SMP		$\%AMH\ Al\ Qur'an = \frac{Jml.\ Siswa\ SMP\ yang\ dapat\ baca\ tulis\ huruf\ Al\ Qur'an}{Jml.\ Seluruh\ Siswa\ SMP} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	55,7	59,5	63,3	0	0	0	63,3	Bebas Buta Huruf A; Qur'an
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an					Eksemplar		33.850	50.000	50.000	0	0	0	100.000	
		02.2.02.38.		Sertifikat bukti bisa dan mampu baca tulis Al Qur'an					Eksemplar		0	25.000	25.000	0	0	0	50.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan			Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		$(thn)\ RLS = \frac{Jml.\ Penduduk\ usia > 15\ Th\ X\ Lama\ Pendidikan\ yang\ dihabiskan^{*})}{Jml.\ Penduduk > 15\ Th\ Yang\ sedang\ bersekolah\ atau\ telah\ berijazah\ **)} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Tahun	Dinas Pendidikan	6,68	6,78	6,88	6,98	7,08	7,18	7,18	Pemerataan Pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka partisipasi kasar PAUD/TK		$\frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ TK/RA/Penitipan\ Anak}{Jumlah\ anak\ usia\ 4 - 6\ Tahun} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	67	68	68,41	68,82	69,23	69,65	69,65	Mewujudkan pemerataan, perluasan akses pendidikan yang berkeadilan
				Angka partisipasi kasar SD		$\%APK = \frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ SD/MI/Peket\ A}{Jumlah\ anak\ usia\ 7 - 12\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	109	100	100	100	100	100	100	Mengetahui tingkat partisifasi masyarakat terhadap pendidikan
				Angka partisipasi kasar SMP		$\%APK = \frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ SMP/MTs/Paket\ B}{Jumlah\ anak\ usia\ 13 - 15\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	101,11	100	100	100	100	100	100	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat		$\%APM = \frac{Jumlah\ siswa\ usia\ 7 - 12\ Tahun\ dijenjang\ SD/MI/Paket\ A}{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 7 - 12\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat		$\%APM = \frac{Jumlah\ siswa\ usia\ 13 - 15\ Tahun\ dijenjang\ SMP/MTs/Paket\ B}{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 13 - 15\ Tahun} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinan Pendidikan	98	98,3	98,89	99,48	100	100	100	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
		02.2.01.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**															
		02.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Gedung Sekolah Baru	Pemerataan akses pendidikan				Unit		3	1	1	1	1	1	5	Pembangunan Unit Gedung Sekolah
		02.2.01.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar	Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan				Lokal		15	112	100	100	100	100	512	Jumlah Ruang Kelas Baru pada SD
				Unit Ruang Kelas Sekolah	Peningkatan pemerataan dan akses pendidikan				unit		15	112	100	0	0	0	212	Penambahan Ruang Kelas untuk pemenuhan daya tampung siswa
		02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar (SD) mendapat dana BOS	Dengan sekolah mendapatkan Dana BOS ini akan membantu pembiayaan sekolah sehingga dapat membantu masyarakat dalam menyekolahkan anaknya				Unit		919	919	920	925	926	928	928	Unit Sekolah yang mendapatkan dan BOS
				Penyediaan Biaya Operasional Sekolah Pada Sedkolah Dasar	Penduduk usia sekolah SD dapat bersekolah				Sekolah		919	919	920	925	926	928	928	Jumlah Sekolah Dasar Penerima Dana BOS
		02.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru SMP	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan				Lokal		3	80	80	80	80	80	400	Jumlah Ruang Kelas Baru pada SMP
				Ruang Kelas Baru					unit		0	0	0	0	0	0	0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Sekolah SMP Penerima dana BOS	Dengan adanya dana BOS sebagai penunjang biaya penyelenggaraan pendidikan masyarakat dapat terbantu untuk melanjutkan pendidikan secara mudah				Sekolah		187	192	200	210	215	220	220	Jumlah Sekolah Penerima Dana BOS Pusat dan Daerah
				Sekolah SMP Penerima Dana Operasional Sekolah	Dengan bantuan operasional sekolah dapat membantu penduduk usia sekolah SMP bisa melanjutkan sekolah pada tingkat SMP				Sekolah		187	192	200	210	215	220	220	SMP Penerima dana BOS Pusat dan Daerah
		02.2.03.	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**															
		02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit Gedung Sekolah Baru	Pemerataan akses pendidikan				Unit		16	2	2	2	2	2	10	
		02.2.03.11.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Penyediaan Dana Bantuan Operasional TK/{AUD	Penunjang biaya operasional pendidikan pada TK Negeri				Unit		16	16	18	20	22	24	100	
		02.2.03.13.	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Lembaga Penyelenggara PAUD					Lembaga		750	750	750	750	750	750	3.750	
				Lembaga PAUD					Lembaga		700	750	750	0	0	0	1.500	
		02.2.03.14.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dokumen perencanaan dalam penyelenggaraan PAUD					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Juara I, II, III Lomba Guru TK, Pengawas TK, dan Kepala TK Berprestasi Tingkat Kabupaten	Meningkatnya motivsi dan kompetensi guru dalam memenuhi SNP PAUD				Paket Kegiatan		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Peserta sosialisasi Program Bantuan Operasional Pendidikan PAUD terhadap Kepala Sekolah TK/PAUD					Orang		750	750	750	750	750	750	3.750	
				Peserta Sosialisasi dan Pembinaan Persiapan sekolah yang akan diakreditasi	Persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga TK/PAUD				Dokumen		380	380	380	380	380	380	1.900	
				Jumlah Lembaga PAUD dan Gugus PAUD Berprestasi	Peningkatan manajeman dan tatakelola pendidikan				Lembaga		300	300	300	300	300	300	1.500	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga TK/PAUD Penerima dana BOP	Penyediaan dana Bantuan Operasional Pendidikan, untuk membiaya pendidikan anak usia dini (PAUD)				Lembaga		720	676	680	690	695	700	700	Untuk mengetahui jumlah TK/PAUD dapat diketahui pada angka tahun berjalan
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Angka partisipasi kasar		$\frac{Jumlah\ Siswa\ pada\ jenjang\ TK/RA/Penitipan\ Anak}{Jumlah\ anak\ usia\ 4-6\ Tahun} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	67	68	68,41	68,82	69,23	69,65	69,65	Mewujudkan pemerataan, perluasan akses pendidikan yang berkeadilan
		03.2.02.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**															
		03.2.02.02.	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Sertifikat Peserta Bimtek Kurikulum Bahan Ajar dan Model Pembelajaran PAUD	Bimbingan teknis tehadap para guru PAUD dalam penerapan Kurikulum dan Model Pembelajarn				Eksemplar		410	500	500	500	500	500	500	
	Meningkatnya Mutu dan Relefansi Pendidikan			Harapan Lama Sekolah (HLS)		$HLS_a^t = FK\ x \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Non Kumulatif	Meningkat	Tahun	BPS, Disdik dan Disdukcapil	12,37	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12	Angka Indikator merupakan hasil perhitungan dari BPS
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SD		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	96	97	97,6	0	0	0	97,6	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik PAUD/TK		$RK - Baik = \frac{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Seluruh} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	60	60,35	60,72	61,09	61,45	61,82	61,82	Mengetahui jumlah Ruang Kelas Sekolah
				Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Peningkatan angka lulusan SD sederajat	$AL = \frac{Jml.\ Lulusan}{Jml.\ Siswa\ Kelas\ Tertinggi} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	80	85	90	95	98	98	Menunjang capaian angka RLS
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV jenjang SMP		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	97,5	98,2	98,8	0	0	0	98,8	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah PAUD/TK		$\%FS = \frac{FS}{Sek} x 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	50	55	60	65	70	70	Mengetahui tingkat kuantitatif fasilitas sarana sekolah
				Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Peningktan Angka Lulusan SMP sederajat	$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ kesetaraan\ Paket\ B}{Jml.\ warga\ belajar\ Tk.\ tertinggi\ kesetaraan\ Paket\ B\ pada\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68,09	70	70,04	70,08	71,3	71,7	71,7	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV pada jenjang TK/PAUD		%GL = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	72	72,5	72,9	0	0	0	145,4	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Peningkatan angka lulusan SMA sederajat	$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ kesetaraan\ Paket\ B}{Jml.\ warga\ belajar\ Tk.\ tertinggi\ kesetaraan\ Paket\ B tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,68	80	80,5	81	81,4	81,9	81,9	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Tersedianya jumlah Lembaga Pendidikan Kecakapan Hidup (LKP)	Peningkatan keahlian SDM	$Jml.\ LKP = Jml.\ Thn\ n + (Jml.\ Thn\ n\ X3\%)$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68	70	72	75	78	80	80	Peningkatan mutu dan kualitas SDM
				Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/Mts		$\%AM = \frac{Jumlah\ penduduk\ kelompok\ usia\ 13-15\ Tahun}{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SD/MI\ Tahun\ ajaran\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI		$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SD/MI}{Jml.\ Siswa\ tingkat\ tertinggi\ pada\ jenjang\ SD/MI\ pada\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu dan relevansi pedidikan
				Meningkatnya Angka Lulusan SMP		$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SMP/MTs}{Jml.\ Siswa\ tingkat\ tertinggi\ pada\ jenjang\ SMP/MTs\ pada\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	99,95	99,97	99,98	99,99	100	100,01	100,01	Menunjang capaian Rata-rata Lama Sekolah
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Kondisi Ruang Kelas Baik SD	Mengetahui keadaan jumlah ruang kelas yang sudah rusak	$RK - Baik = \frac{Jml.\ Kondisi\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Seluruh\ Ruang\ Kelas} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	70	70,42	70,84	71,27	71,7	72,13	72,13	
				Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah : Kondisi Keadaan Ruang Kelas Baik SMP	Mengetahui jumlah ruang kelas yang sudah rusak	$RK - Baik = \frac{Jml.\ Ruang\ Kelas\ Baik}{Jml.\ Seluruh\ Ruang\ Kelas} X\ 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	80	80,5	81	81,5	82	82,5	82,5	Kondisi Ruang Kelas Baik SMP
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	Mengetahui jumlah fasilitas sarana pendidikan	$\%FS = \frac{FS}{Sek} x100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	60	65	70	75	80	80	
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SMP	Mengetahui jumlah fasilitas sarana pendidikan	$\%FS = \frac{FS}{Sek} x100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	60	65	70	75	80	80	
		02.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Kerja Guru					Lokal		0	250	250	250	250	250	1.250	
		02.2.01.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Pepustakaan Sekolah	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pendidikan				Lokal		4	53	53	53	53	53	265	
		02.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Halaman dan lingkungan gedung sekolah terpagar dan tertata rapih	Penataan lingkungan gedung sekolah				Lokasi		76	76	76	76	76	76	380	
				Sarana Air bersih dan Jamban Sekolah	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sekolah sehat				Sekolah		24	68	68	68	70	70	344	
		02.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas Sekolah SD					Lokal		46	400	450	450	450	450	2.200	
		02.2.01.09.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru pada SMP Negeri	Rehabilitasi Ruang Guru yang tidak layak guna				Unit		0	18	20	20	20	20	98	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.01.11.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Sarana Membaca Bagi Siswa	Menunjang budaya baca terhadap siswa				Lokal		18	50	50	50	50	50	250	Jumlah Ruang Perpustakaan SD yang direnovasi
		02.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair Sekolah SD					Lokal		108	175	175	175	175	175	875	
		02.2.01.16.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Pengadaan Sarana Prasarana TIK					Paket		0	136	136	136	136	136	680	
		02.2.01.17.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku referensi, Buku dan Alat Tulis Siswa dan Raport Siswa					Paket		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Ruang Guru Sekolah Dasar	Ruang Guru pada SD Negeri banyak yang tidak layak guna				Lokal		0	3	3	3	3	3	15	
		02.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Siswa Kurang mampu mendapatkan beasiswa	Penduduk usia sekolah SD dapat menuntaskan sekolahnya dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi				Orang		0	0	2	5.000	5.000	5.000	15.002	Jumlah Siswa kurang mampu yang mendapat bantuan biaya sekolah
				PTK Non PNS mendapatkan tunjangan	Honorarium Pengawasan Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Pengoreksian hasil Ujian				Orang		0	2.500	2.700	0	0	0	2.700	Guru Honor sebagai tenaga pengawasan dan pengoreksian hasil Ujian Sekolah
		02.2.01.22.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Peraktik dan Peraga Pendidikan					Paket		115	115	115	115	115	115	575	
		02.2.01.24.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen Hasil Monev UN/US Sekolah Dasar					Sekolah		928	928	928	928	928	928	4.640	
				Peserta Sosialisasi penyelenggaran pendidikan sekolah dasar					orang		561	561	561	561	561	561	2.805	
		02.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba OSN, O2SN , FLSN, Calistung dan Pasanggiri	Meningkatnya Prestasi Belajar Siswa				Cabang Lomba		55	55	55	55	55	55	55	Penyelenggaraan berbagai lomba bakat dan kreatifitas siswa dalam rangka mencetak prestasi dari Tk. Kabupaten sampai dengan Tk. Nasional
		02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Guru SD di Daerah Terpencil penerima tunjangan	Menunjang peningkatan mutu pembelajaran				orang		7	48	48	48	48	48	240	
				Juara I, II, dan III Guru SD Berprestasi.	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD				Orang		0	0	0	9	9	9	27	
		02.2.02.	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**															
		02.2.02.05.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan sudah tidak layak guna				Unit		0	9	9	9	9	9	45	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.06.	Pembangunan Laboratorium	Ruang Lab dan Praktikum Sekolah					Lokal		0	20	20	20	20	20	100	
		02.2.02.07.	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Sarana prasarana lapangan olah raga	Meningkatkan Minat untuk berolahraga dan prestasi di bidang olahraga meningkat				Paket		0	200	200	200	200	200	1.000	
		02.2.02.10.	Pembangunan Fasilitas Parkir	Pagar dan halaman lingkungan gedung sekolah					Lokal		10	10	10	10	10	10	50	
		02.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jamban Siswa dan Sarana Air bersih					unit		0	400	400	400	400	400	2.000	
		02.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah SMP	Meningkatkan mutu kondisi Ruang Kelas Sekolah				Lokal		6	160	160	160	160	160	800	Jumlah RK Kelas yang direhab
		02.2.02.15.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang Kerja Guru	Untuk meningkatkan kinerja para tenaga pendidik				Ruang		0	0	25	25	25	25	100	Guru dapat melaksanakan tugas dengan nyaman
		02.2.02.17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah	Pengembangan Budaya membeca				Unit		0	0	3	3	3	3	12	Sekolah memiliki sarana tempat membaca untuk siswa
		02.2.02.18.	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang Laboratorium Sekolah	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				lokal		20	20	20	20	20	20	100	
		02.2.02.19.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Sarana Olah Raga Sekolah	Mencetak prestasi bakat dan minat siswa				Paket		3	3	3	3	3	3	15	
		02.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Ruang WC Siswa dan Guru	Ketersedian Sarana Sekolah Sehat				Unit		0	0	54	60	65	80	259	Penataan Sarana dan Prasanara Sekolah
		02.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubaliar Sekolah SMP					Lokal		1	24	24	24	24	24	120	
		02.2.02.27.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan sarana dan prasarana kebersihan sekolah					Unit		0	160	160	160	160	160	800	
		02.2.02.28.	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Buku Referensi, Pengayaan Panduan Pendidikan dan Raport Siswa					Paket		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah siswa tidak mempu Penerima Beasiswa	Pemberian Beasiswa Transisi				orang		265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.500	
		02.2.02.33.	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Buku Teks Pelajaran SMP	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				Paket		0	36.658	36.658	36.658	36.658	36.658	183.290	
		02.2.02.34.	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Peserta Bimtek Guru TIK					orang		150	500	500	500	500	500	2.500	
		02.2.02.35.	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat peraga dan praktik penunjang KBM					Paket		1	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.36.	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dokumen Hasil Pelaksanaan PPDB On Line	Peningkatan pelayanan penyelenggaraan pendidikan				dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan UN/US					Sekolah		187	187	187	187	187	187	935	
		02.2.02.38.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba OSN, O2SN, FLSN, TUB dan Pasanggiri	Mewujudkan Prestasi Bakat dan Kreatifitas Siswa dalam peningkatan Mutu pembelajaran				Cabang Lomba		55	55	55	55	55	55	55	55 Cabang Lomba yang dilombakan
		02.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Guru Berprestasi					orang		183	209	209	209	209	209	1.045	
				Jumlah Peserta Pelatihan dan Workshof					orang		160	160	160	160	160	160	800	
				Peseta mendapatkan sertifikat					orang		300	300	300	300	300	300	1.500	
				Jumlah Guru Penggerak pada jenjang SMP	Guru memberikan model pembelajaran				Guru		0	0	250	250	250	250	1.000	
		02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumah sekolah penyelenggaraan SMP Terbuka	Meningkatkan angka lulusan SMP				Sekolah		17	17	17	20	25	30	30	
				Dokumen Pemetaan Mutu Sekolah dan Hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Menunjang terwujudnya mutu pembelajaran				Dokumen		3	5	7	9	10	12	43	
				Jumlah SMP sebagai sekolah Penggerak	Sekolah menyelenggarakan model pembelajaran yang berkualitas				Sekolah		80	0	20	20	20	20	80	Jumlah Sekolah rujukan sebagai sekolah penggerak
		02.2.02.44.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang Kerja Tata usaha Kondisi Baik	Untuk meningkatkan kinerja para tenaga pendidik				Unit		0	0	0	20	30	30	80	Ruang kerja Tata Usaha Sekolah
		02.2.02.45.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kerja Kepala Sekolah dalam Kondisi baik	Peningkatan mutu kinerja kepala sekolah				Unit		0	0	0	10	15	20	45	Ruang Kerja Kepala Sekolah
		02.2.03.01.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Baru	Daya Tampung Peserta Didik				Lokal		0	3	3	3	3	3	15	
		02.2.03.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Tersedianya sarana prasarana bermain					Unit		3	3	3	3	3	3	15	
				Jumlah Bangunan Gedung TK/PAUD yang direhab perkerasan lingkungan taman dan atau pagar sekolah					Lokasi		3	3	3	0	0	0	6	
				Pemasangan Instalasi Listrik dari PLN					Paket		1	1	1	1	1	1	5	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Sarana Ruang Pembelajaran Lainnya (RPL)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dana prasaran sekolah				Unit		0	0	0	10	10	10	30	Kebutuhan Ruang Pembelajaran Lainnya
		02.2.03.03.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Terlaksananya Rehabilitasi sejumlah Ruang Kelas Sekolah					lokal		1	3	3	3	3	3	15	
		02.2.03.07.	Pengadaan Mebeluer PAUD	Meubelair Sekolah					Lokal		1	5	10	10	10	10	45	
		02.2.03.09.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Alat Peratik dan Peraga Siswa (APE Dalam dan APE Luar)	Menunjang ketersediaan Ruang Kelas Sekolah yang layak untuk KBM				Paket		5	10	10	10	10	10	50	
		02.2.03.10.	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Buku Referensi dan Raport	Menunjang capaian SPM bidang pendidikan				Paket / Exemplar		1	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	115.000	
		02.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dokumen model bahan ajar					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.04.09.	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket A	Penunjang SPM Bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Buku Modul Pembelajaran Paket B	sebagai penunjang SPM bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Modul Pembelajaran Paket C	Penunjang SPM Bidang Pendidikan				Paket		0	1	1	1	1	1	5	
		02.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Lulusan kesetaraan Paket C setara SMA	Menunjang capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS)				orang		1.350	1.350	3.500	3.500	3.500	3.500	15.350	Warga Belajar Kesetaraan Paket C
				Lulusan Warga Belajar Kesetaraan Paket B Setara SMP	Menunjang peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah				Orang		2.500	1.250	1.284	1.300	1.400	1.500	1.500	
				Warga Belajar Paket A setara SD	Menunjang peningkatan angka lulusan				Warga Belajar		2.000	254	254	254	254	254	1.270	
		02.2.04.15.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Pelatihan Kompetensi Tenaga pendidikan (Tutor) untuk kesetaraan Paket C	Menunjang Peningkatan jumlah angka lulusan SMA				orang		72	100	100	100	100	100	500	
				Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Pengembangan mutu dalam penyelenggaraan LKP				orang		80	100	100	100	100	100	500	
				terlaksananya pelatihan kompetensi tutor paket b					orang		100	100	120	130	140	150	640	
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terselenggaranya Ekspo Pendidikan Masyarakat					Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	
				Jumlah Tutor LKP Berprestasi					Kategori		26	26	26	26	26	26	130	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Peserta Bimtek Life Skill	Bimtek kepada penyelenggaran (Ketua Lembaga)				Orang		350	350	350	350	350	350	1.750	
				-					Buah		0	0	0	0	0	0	0	
				-					orang		0	0	0	0	0	0	0	
		02.2.04.17.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dana Bantuan Operasional Pendidikan untuk Lembaga PKBM	Lembaga PKBM Pendidikan Non Formal mendapatkan bantuan dan BOP untuk penyelenggaraan operasional pendidikan.				Lembaga		0	63	61	63	63	65	65	Jumlah PKBM yang mendapatkan BOP
		03.	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Peningkatan Capaian Angka Lulusan Kesetaraan Paket A setara SD	Peningkatan angka lulusan SD sederajat	$AL = \frac{Jml.\ Lulusan}{Jml.\ Siswa\ Kelas\ Tertinggi} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	80	85	90	95	98	98	Menunjang capaian angka RLS
				Peningkatan Capaian Angka Kelulusan Warga Belajar Paket B setara SMP	Peningktan Angka Lulusan SMP sederajat	$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ kesetaraan\ Paket\ B}{Jml.\ warga\ belajar\ Tk.\ tertinggi\ \ kesetaraan\ Paket\ B\ pada\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	68,09	70	70,04	70,08	71,3	71,7	71,7	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Peningakatan Angka Lulusan pada jenjang Kesetaraan Paket C Setara SMA	Peningkatan angka lulusan SMA sederajat	$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ kesetaraan\ Paket\ B}{Jml.\ warga\ belajar\ Tk.\ tertinggi\ kesetaraan\ Paket\ Btahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,68	80	80,5	81	81,4	81,9	81,9	Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan
				Angka Kelulusan (AL) SD/MI		$\%AL = \frac{Jumlah\ lulusan\ pada\ jenjang\ SD/MI}{Jml.\ Siswa\ tingkat\ tertinggi\ pada\ jenjang\ SD/MI\ pada\ tahun\ sebelumnya} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu dan relevansi pedidikan
				Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah : Persentasi fasilitas yang dimiliki sekolah SD	Mengetahui jumlah fasilitas sarana pendidikan	$\%FS = \frac{FS}{Sek} x100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	60	65	0	0	0	65	
		03.2.01.	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**															
		03.2.01.03.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Pelajaran Pokok SD	Mewujudkan peningkatan Mutu pembelajaran				Paket		0	500	500	0	0	0	1.000	
				Buku Pelajaran Pokok SD.					Paket		0	0	0	500	500	500	1.500	
		03.2.01.04.	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Guru peserta pelatihan mendapat sertifikat	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran				orang		250	250	250	250	250	250	1.250	
		03.2.02.01.	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket A	Pengendalian peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan				Orang		86	100	100	100	100	100	500	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar mendapatkan Sertifikat Tutor Paket B					Kegiatan		0	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah Peserta Bimtek dan Workshof Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar Tutor Paket C					Kegiatan		0	1	1	1	1	1	5	
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SD		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	96	97	97,6	98,2	98,8	99,3	99,3	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang SMP		Guru Layak Mengajar = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	97,5	98,2	98,8	99,4	100	100,6	100,6	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
				Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV dan bersertifikat pendidik pada jenjang TK/PAUD		%GL = Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA X 100	Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	72	72,5	72,9	73,4	73,8	74,3	366,9	Mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran
		04.2.01.	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**															
		04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Bimtek Aplikasi Dapodikdasmen	Penyelenggaraan Bimtek Aplikasi Dapadik terhadap Operator Sekolah				orang		350	350	350	350	350	350	1.750	
				Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Verval PTK dan Verval PD	Updating data tenaga pendidik dan kependidikan				orang		350	350	350	350	350	350	1.750	
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Manajeman Bebasisa Sekolah	Menunjang peningkatan tatakelola pendidikan	$MBS = \frac{Jml.\ Sekolah\ Yang\ Menerapan\ MBS}{Jml.\ Sekolah\ yang\ ada} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Disdik	100	100	100	100	100	100	100	Manajeman pengelolaan pendidikan
		02.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Standar Pelayanan Minimal		SPM= Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X Nilai penimbang / Total unsur yang terisi	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	
				Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah		%MBS = Jml. Sekolah Yang Menerapkan MBS / Jml. Sekolah SD, SMP X 100	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	100	100	0	0	0	100	Peningkatan mutu manajeman pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Penerapan Manajeman Berbasis Sekolah	Penataan dan tatakelola manajeman pendidikan	$MBS = \frac{Lembaga\ Pendidikan\ Yang\ Menerapkan\ MBS}{Jml.\ Lembaga\ Pendidikan\ Non\ Formal} X100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	100	100	100	100	100	100	Mengetahui Lembaga Pendidikan Non Formal yang telah menerakan pengelolaan pendidikan berbasis manajeman sekolah
		02.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Juara I, II, dan III Guru SD Berprestasi	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SD				Orang		9	9	9	0	0	0	18	Juara Tenaga Pendidik SMP Berprestasi
				Jumlah Guru Penggerak pada jenjang Sekolah Dasar (SD)	Guru penggerak sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran				orang		0	0	20	40	60	80	200	Pencetakan Guru Penggerak dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran
		02.2.01.28.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Juara Lomba Gugus dan Perpustakaan	Peningkatan Mutu tatakelola manajeman pendidikan				orang		6	6	6	6	6	6	30	Sekolah Juara Gugus dan Pengelolaan Perpustakaan
				Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
				Jumlah SD sebagai sekolah penggerak	Meningkatkan mutu pembelajaran untuk mencetak angka lulusan				Sekolah		0	50	50	50	50	50	250	Sekolah menyelenggarakan model pembelajaran yang berkualitas
		02.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	PTK Non PNS pada Sekolah Dasar Negeri mendapatkan Honorarium	Dengan diberikannya Honorarium terhadap PTK Non PNS akan berpengaruh pada peningkatan pelayanan pendidikan, sehingga Pelayanan Minimum Pendidikan akan meningkat				orang		0	0	0	4.500	4.500	4.550	4.550	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada jenjang Sekolah Dasar
		02.2.01.30.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Manajeman Berbasis Sekolah					Orang		925	925	925	0	0	0	925	Peserta Bimtek Pengelolaan Dana Bos terhadap Manajer dan Bendahara BOS SD
				Manajeman Berbasis Sekolah.					Orang		0	0	0	925	925	925	925	
		02.2.02.32.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	PTK Non PNS mendapatkan tunjangan	Honorarium Pengawasan Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Pengoreksian hasil Ujian				Orang		0	1.235	1.235	0	0	0	1.235	PTK Non PNS sebagai tenaga pengawasan dan pengersian hasil dalam pelaksanaan Ujian Sekolah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		02.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dokumen materi Sosialisasi dan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Memberikan bimbingan dan sosialisasi kinerja terhadap kepala sekolah dalam rangka persiapan menuju ke akreditasi lembaga sekolah				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		02.2.02.43.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pengadiministrasian Dana BOS bagi Bendahara dan Manajer Sekolah	Sekolah Penerima dana BOS untuk Operasional penyelenggaraan pembelajaran				Orang		187	192	200	0	0	0	200	Peserta Bimtek
				Peserta Bimtek Pengelolaan dan Pengadiministrasian Dana BOS bagi Bendahara dan Manajer Sekolah.					Orang		0	0	0	210	215	220	220	
		02.2.03.16.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Guru Penggerak pada Jenjang TK	Guru sebagai upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran				orang		0	0	10	20	30	30	90	Pencetakan Guru Penggerak pada jenjang TK
		02.2.03.18.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	PTK Non PNS pada TK Negeri Penerima Honorarium dari APBD Kabupaten	BOP Daerah Kabupaten Cirebon dialokasikan untuk membiaya honoriraium PTK Non PNS pada Lembaga TK Negeri, sehinga dapat meningkatkan kinerja pelayanan guru terhadap peserta didik dan masyarakat				Orang		49	42	45	51	55	60	60	
		02.2.03.19.	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan BOP	Peserta Bimtek dan Sosialisasi Pengelolaan dan Pengadministrasian dan BOP PAUD				orang		720	676	680	690	695	700	700	Sebagai tolok ukur sekolah dalam menerapkan SPM dari segi pembiayaan sekolah
				Dokumen Adminstrasi Pengelolaan dana BOP PAUD	Dokumen Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOP				Dok		720	676	680	690	695	700	3.441	Dokumen Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOP
		02.2.04.16.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sosialiasasi terhadap Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK	Memberikan bimbingan teknik Pengelola PKBM dan LKP yang belum terakreditasi, Sosialisasi juknis DAK Non Fisik BOP Kesetaraan, dan Sosialisasi Pelaksanaan UNBK				Lembaga		0	72	100	100	100	100	100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Data Sarana dan Prasarana PKBM dan LKP	Pendataan Sarana dan Prasarana PKBM dan LPK				Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
				Dokumen Laporan Kegiatan					dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
				Terbentukanya Desa Cerdas di Kabupaten Cirebon	Menunjang program peningkatan mutu pendidikan				Buah		3	3	3	3	3	3	15	
		04.	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Penerapan Manajamen Berbasis Sekolah		%MBS = Jml. Sekolah Yang Menerapkan MBS X 100 Jml. Sekolah SD, SMP	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	100	0	100	100	100	100	100	Peningkatan mutu manajeman pendidikan
		04.2.01.01.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen Profil Pendidikan	Penyusunan dan Pemetaan Data Profil Pendidikan				dokumen		2	2	2	2	2	2	10	
				Aplikasi Sistem Pengelolaan Data Profil Pendidikan	Data merupakan kebutuhan dasar dalam pengambilan kebijakan				dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
				Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Penilaian Kinerja terhadap guru dan Kepala sekolah dalam rangka peningkatan Mutu PTK				Dok		0	4	4	4	4	4	20	
		04.2.01.02.	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peseta Bimbingan Teknis memahami dan menguasi materi pelatihan yang telah diberikan dan bisa mengimplementasikan pada tugas yang diampunya	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis terhadap para tenaga pendidik dan kependidikan				Orang		1.500	500	500	500	500	500	2.500	Peserta Bimbingan Teknis dalam penghitungan angka kredit jabatan fungsional tenaga pendidik
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan Mutu layanan Pendidikan	$IKM = \frac{Jml.\ Total\ dari\ persepsi\ nilai\ perunsur}{Total\ Nilai\ yang\ terisi} X\ Nilai\ Penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,42	78,45	78,5	78,5	Peningkatan mutu layanan pendidikan
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan Mutu SDM dalam pelayanan terhadap masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} X\ Nilai\ penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan Pelayanan kepada masyakat secara efektif dan efisia
				Peningkatan Kedisplinan dan Mutu Pelayanan Aparatur terhadap masyarakat	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} X\ Nilai\ penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakt
				Peningkatan layanan mutu pendidikan pada jenjang SD		IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	79,5	79,55	80,27	80,6	80,99	81,48	81,48	Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peningkatan layanan mutu pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama		IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang / Total Unsur yang terisi	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	76,26	77	77,46	77,93	78,39	78,86	78,86	Mewujudkan mutu pelayanan kepada Masyarakat secara efektif dan efisien
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja (SKM, SPM dan Monev)	Evaluai dan penilaian capaian kinerja dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan				dokumen		3	3	3	3	3	3	15	Dokumen capaian hasil kinerja SKPD
				Dokumen Evaluasi Kinerja (SPM, IKM)	Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat pada lembaga penyelenggara layanan pemerintah harus selalu diukur tingkat capaian kinerjanya.				Dok		0	2	2	2	2	2	10	Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan SPM pada Jenjang SD dan SMP
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan					Pegawai		0	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	1.454	
		01.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**															
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Seragam Dinas ASN dan Non ASN					Paket		1	1	1	1	1	1	5	Paket Pengadaan Pakaian Seragam Dinas
		01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sertifikat Bimtek Peserta Pelatihan	Menunjang peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat				Eksemplar		10.108	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	
	Meningkatnya Efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajeman pendidikan			Harapan Lama Sekolah			Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	BPS, Dinas Pendidikan dan Disdukcapil	12,37	12,52	12,67	12,82	12,97	13,12	13,12	Angka HLS dikeluarkan dari BPS
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			1. Pemenuhan Dukungan Manajeman Perkantoran : a. Dokumen Perencanaan b. Laporan Kinerja dan Keuangan c. Dokumen Data dan Informasi yang Valid	Peningkatan tatakelola manajeman perkantoran		Non Kumulatif	Meningkat	Dokumen	Dinas Pendidikan	0	6	6	6	6	6	6	
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efeltipitas dalam penyusunan laporan perencanaan	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} X\ Nilai\ penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan mutu pelayanan pendidikan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektipitas dalam penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah	Laporan Realisasi Anggaran Keuangan		Non Kumulatif	Meningkat	Persen	Dinas Pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	Penyelenggaraan Laporan Keuangan
		01.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**															
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra 2019 - 2024 dan Dokumen Renja Tahunan	Renstra merupakan Dokumen Perencanaan untuk jangka menengah pada setiap SKPD (5 Tahunan)				Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	Dokumen Renstra SKPD Tahun 2019 - 2024
				-	-				-		0	0	0	0	0	0	0	-
		01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)	Penyusunan Rencanan Kegiatan Anggaran (RKA)				Dok		4	4	4	4	4	4	20	Dokumen perencanaan anggaran tahunan
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Dokumen sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegitan				dokumen		2	2	2	2	2	2	10	DPA
		01.2.02.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**															
		01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset barang milik daerah					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	Dokumen Panduan dan Pedoman Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Daya serap keuangan					Dokumen		3	3	3	3	3	3	15	
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persentasi Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran)	Peningkatan pelayanan pendidikan terhadap masyarakat		Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Dinas Pendidikan	0	100	100	100	100	100	100	
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} \times Nilai\ penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidikan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
		01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Sosialisasi	Dengan sosialisasi berbagai peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat				dokumen		2	2	2	2	2	2	10	Dokumen bahan untuk penyelenggaraan Sosialisasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**															
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik					Unit		126	126	126	126	126	126	630	
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	Memenuhi kebutuhan barang cetak penunjang adm. perkantoran pada 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan				Paket		1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	5.225	
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Behan bacaan Media masa					Eksemplar		12.480	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000	64.000	
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Alat Tulis Kantor	Memenuhi kebutuhan Alat Tulis Kantor untuk operasional pelaksanaan administrasi pada 42 unit Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan				Paket		1.045	1.050	1.075	1.100	1.125	1.150	5.500	
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan Minuman untuk rapat-rapat kedinasan					Unit Kerja		42	42	42	42	42	42	42	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah					Bulan		12	12	12	12	12	12	60	Tersedianya biaya untuk transport perjalanan dinas
		01.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa telepon, listrik dan air untuk Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Koorwil Bidang Pendidikan Kecamatan dan Kantor Sanggar Kegiatan Belajar	Memenuhi kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi kantor				Unit		42	42	42	42	42	42	42	
		01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen Teknis Pengadministrasian dan Tata Kelola Kearsipan					Dokumen		1	1	1	1	1	1	5	
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	STNK Kendaraan Dinas					Unit		278	278	278	278	278	278	1.390	
	Meningkatnya Tatakelola Dinas Pendidikan			Pemenuhan Saran dan Prasarana Aparantur (Persentasi Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik)			Non Kumulatif	Meningkat	Prosen		100	100	100	100	100	100	100	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam menunjang pemerataan dan akses pendidikan	$IKM = \frac{Total\ dari\ Nilai\ Persepsi\ Per\ Unsur}{Total\ unsur\ yang\ terisi} X\ Nilai\ penimbang$	Non Kumulatif	Meningkat	Point	Dinas Pendidkan	78,26	78,3	78,35	78,4	78,45	78,5	78,5	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
		01.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**															
		01.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Penataan Lahan Tanah Bangunan Gedung Sekolah TK, SD dan SMP dan UPT SKB yang disewa dari masyarakat / pemerintahan desa					Lokal		15	15	15	15	15	15	15	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlatan Gedung Kantor					Paket		0	20	20	20	20	20	100	
		01.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**															
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2					Unit		0	0	25	25	25	25	100	
		01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan Gedung Kantor					Paket Unit		6	6	8	10	10	10	44	
		01.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**															
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Sarana Mobilisasi Kendaraan Dinas				Unit		278	278	278	278	278	278	1.390	
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Bahan Bakar untuk Kendaraan Dinas					Unit		278	278	278	0	0	0	556	
		01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Meubelair Kantor					Paket		0	1	1	1	1	1	5	Perawatan dan Pemeliharaan Meubelair Kantor
		01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peratalatan Gedung Kantor					Unit Kerja		42	42	42	42	42	42	42	
		01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Koorwil Bid. Pendidikan Kecamatan dan Kantor SKB					Unit		42	42	42	42	42	42	42	

Cirebon, 10 Januari 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

R. DENNY SUPDIANA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620209 199003 1 004